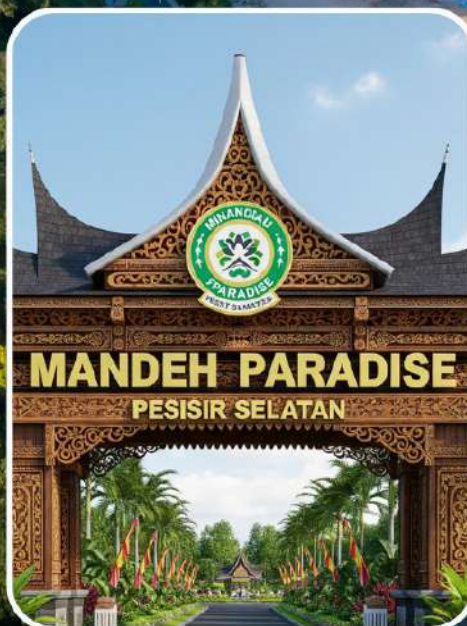
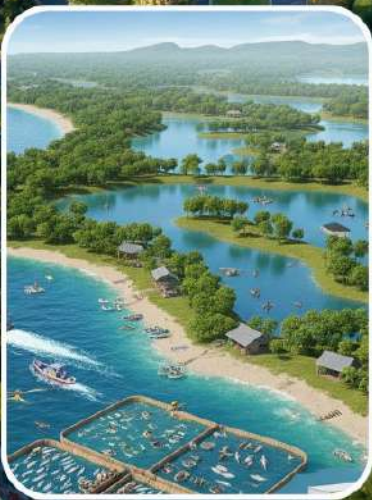


Strategi PENINGKATAN PAD DAN TRANSFORMASI FISKAL

Kabupaten Pesisir Selatan 2025–2029



*gambar hanyalah ilustrasi

STRATEGI PENINGKATAN PAD DAN TRANSFORMASI FISKAL

Kabupaten Pesisir Selatan 2025–2029

Pengarah
Mohammad Dody Fachrudin

Penulis
Bayu Agatyan

Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, kami persembahkan dokumen kajian berjudul: **“Menjadi Tuan di Rumah Fiskal Sendiri: Strategi Peningkatan PAD dan Transformasi Fiskal Kabupaten Pesisir Selatan 2025–2029”**, sebagai bagian dari komitmen Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal secara bertahap, terukur, dan berbasis data.

Kajian ini disusun secara khusus oleh Kanwil DJPb Sumatera Barat dan diperuntukkan bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sejalan dengan peran kami sebagai mitra strategis daerah dalam kerangka sinergi fiskal pusat dan daerah. Fungsi pembinaan dan advisory fiskal yang dijalankan melalui inisiatif *Regional Chief Economist (RCE)* bertujuan menghadirkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, progresif, dan sesuai arah reformasi fiskal nasional. Upaya ini diharapkan mampu mengantarkan Kabupaten Pesisir Selatan menuju rasio kemandirian fiskal minimal 50% di tahun 2029, dengan struktur PAD yang lebih produktif, efisien, dan inklusif.

Dokumen ini tidak hanya merinci strategi peningkatan PAD dalam sektor-sektor tradisional seperti pajak daerah dan retribusi, tetapi juga menawarkan pendekatan inovatif—di antaranya digitalisasi sistem penerimaan, monetisasi aset daerah, pengembangan koperasi fiskal nagari, hingga hilirisasi potensi unggulan daerah dalam sektor pertanian, energi, ekonomi kreatif, dan jasa. Semua dikemas dalam strategi lima tahunan yang terukur, lengkap dengan roadmap, simulasi fiskal, dan usulan peran OPD secara kolaboratif.

Kami berharap dokumen ini menjadi rujukan bersama bagi Bupati, DPRD, Bappeda, BPKAD, Bapenda, seluruh OPD teknis, hingga pihak swasta dan masyarakat dalam membangun kesadaran fiskal kolektif. Kemandirian fiskal bukan sekadar tujuan keuangan, tetapi cermin dari martabat dan daya tahan sebuah daerah.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atas keterbukaan dan kolaborasi yang terjalin erat selama proses kajian ini. Kanwil DJPb Sumatera Barat siap terus mendampingi dan memperkuat langkah strategis ini, tidak hanya sebagai penyusun kajian, tetapi juga sebagai bagian dari solusi pembangunan daerah.

Padang, 7 Juli 2025
**Kepala Kanwil DJPb
Provinsi Sumatera Barat**

Ditandatangani secara elektronik
Mohammad Dody Fachrudin





BAB I

REFORMASI STRATEGIS PENDAPATAN DAERAH KAB. PESISIR SELATAN



EXECUTIVE SUMMARY

“Menjemput Kemandirian Fiskal, Menata Masa Depan Daerah”

Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi tantangan mendasar dalam struktur fiskalnya. Pada tahun-tahun terakhir, lebih dari 60% sumber pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pusat. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu mencerminkan potensi ekonomi riil yang sesungguhnya tersedia—dari sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, hingga kekayaan budaya dan ekonomi rakyat yang hidup. Di sisi lain, kebijakan fiskal nasional mengalami transformasi besar: alokasi transfer pusat kini semakin berbasis kinerja, pemenuhan belanja wajib dipantau ketat melalui PMK 24/2024, dan rasionalisasi belanja pegawai menjadi syarat mutlak keberlanjutan fiskal. Di tengah semua ini, Kabupaten Pesisir Selatan tidak bisa lagi bergantung pada cara lama. Saatnya mengubah wajah fiskal daerah: dari pasif menjadi progresif, dari konsumtif menjadi produktif, dari tergantung menjadi mandiri.

Dokumen ini disusun sebagai peta jalan strategis untuk menata arah baru pengelolaan keuangan daerah. Dengan target **rasio kemandirian fiskal minimal 50% pada tahun 2029**, dan **pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 7,3%**, strategi ini tidak hanya menargetkan angka, tetapi menanamkan paradigma baru: bahwa APBD bukan sekadar alat belanja, melainkan instrumen untuk membangun daya saing, mendukung kesejahteraan, dan membiayai masa depan dengan kekuatan sendiri. Dalam konteks ini, PAD bukan hanya urusan Bapenda semata, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh OPD, seluruh sektor, dan seluruh aktor pembangunan daerah.

Secara substantif, strategi ini berdiri di atas sembilan pilar kebijakan. Dimulai dari **reformasi tata kelola PAD dan transformasi digital sistem pembayaran** berbasis QRIS dan dashboard fiskal real-time, hingga **monetisasi aset daerah—baik berwujud maupun tak berwujud—yang selama ini menjadi beban APBD tanpa imbal hasil**. Di sisi lain, dokumen ini juga mengusung program-program hilirisasi potensi unggulan daerah seperti gambir, perikanan, herbal, dan produk pangan berbasis nagari, serta mendorong ekspansi ke sektor-sektor baru: pabrik vaksin, industri drone, PLTS, data center, dan ekosistem digital UMKM. Semua diarahkan agar PAD tidak hanya berasal dari sektor lama, tetapi tumbuh dari ekonomi baru yang berkelanjutan dan inklusif.

Upaya ini diperkuat oleh **strategi peningkatan kualitas SDM fiskal melalui skema LPDP Kemenkeu, penguatan koperasi merah putih nagari sebagai agregator ekonomi kerakyatan**, serta pembentukan sistem fiskalisasi nagari yang dapat menciptakan kesadaran fiskal hingga akar rumput. Sementara itu, sinkronisasi dengan kebijakan pusat dilakukan melalui dukungan aktif terhadap pemungutan pajak pusat (PPh/PPN), joint audit bersama KPP, implementasi Perda NITKU bagi pelaku usaha luar daerah, dan pemenuhan semua parameter belanja wajib secara disiplin. Semua strategi ini dikonsolidasikan dalam **Forum Koordinasi Fiskal Daerah** bersama Kanwil DJPb, DJP, BPKAD, Bappeda, dan nagari sebagai forum sinergi fiskal pusat-daerah yang partisipatif dan terintegrasi.

Dokumen ini bukan hanya merumuskan arah, tetapi juga menyajikan langkah konkret, sistem pelaksanaan, estimasi nilai fiskal, simulasi dampak, serta peta jalan implementasi lima tahunan secara bertahap dan realistis. Ia menjadi jembatan antara visi dan aksi, antara potensi dan kebijakan, antara mandat konstitusi dan kebutuhan masyarakat.

Akhirnya, dokumen ini adalah seruan untuk bergerak bersama: menjadikan Pesisir Selatan sebagai daerah yang mampu **menghidupi belanjanya dari kekuatan ekonominya sendiri, bukan dari kemurahan pusat**. Dengan semangat kolaborasi, kecerdasan fiskal, dan keberanian untuk berubah, kita akan wujudkan Pesisir Selatan yang tidak hanya mandiri secara fiskal, tetapi juga bermartabat secara ekonomi, dan berdaulat dalam menentukan masa depannya sendiri.

DAFTAR ISI

Executive Summary.....	5
DAFTAR ISI.....	6
BAB I.....	9
REFORMASI STRATEGIS PENDAPATAN DAERAH.....	10
KAB PESISIR SELATAN.....	10
1.a. Peningkatan PAD sebagai Beban Bersama Seluruh OPD	10
1.b. Belanja Berbasis Impact (Impact Spending)	12
1.c. Perubahan Kultur dari Fokus Belanja ke Fokus Pendapatan.....	14
1.d. Proposal Wajib Mengandung Estimasi PAD.....	15
1.e. Screening Belanja Berbasis Efisiensi dan Dampak Fiskal	16
1.f. Penyiapan SDM dan Reformasi Birokrasi untuk Implementasi Strategi PAD	17
1.g. Training Plan ASN dan Sistem Implementasi Cepat Reformasi PAD	18
BAB II.....	22
DIGITALISASI PEMBAYARAN DAERAH PESISIR SELATAN.....	22
2.a. QRIS sebagai Instrumen Pembayaran PAD	22
2.b. Dashboard PAD Terintegrasi Real-Time.....	24
2.c. Integrasi Pelayanan dan Pembayaran Digital Lintas OPD	25
2.d. Insentif dan Sanksi Digital.....	26
2.e. Trigger Dividen untuk Semua BUMD sebagai Instrumen Digitalisasi PAD dan Efisiensi Fiskal..	27
2.f. Interkoneksi Sistem Pembayaran PAD Antar-OPD dan Nagari.....	29
2.g. Insentif Berbasis Kinerja Digital untuk OPD dan Nagari.....	30
2.h. Audit Digital dan Penegakan Kepatuhan Fiskal Berbasis Teknologi	31
2.i. Pengembangan Ekosistem QRIS ke Sektor Non-Tradisional	32
2.j. Sistem Reward QRIS Nagari dan UMKM untuk Meningkatkan Literasi Digital Fiskal	33
BAB III.....	37
MONETISASI ASET DAERAH (BERWUJUD DAN TAK BERWUJUD)	37
3.a. Monetisasi Aset Berwujud Melalui Pola Inbreng dan Sewa Komersial	37
3.b. Monetisasi Aset Tak Berwujud di Kabupaten Pesisir Selatan.....	40
3.c. Model Manajemen dan Evaluasi Aset Digital Kabupaten Pesisir Selatan	45
3.d. Kerangka Regulasi dan Tata Kelola Monetisasi Aset Tak Berwujud	46
BAB IV.....	49
DIVERSIFIKASI SUMBER PAD BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH	49
4a. Hilirisasi Komoditas Unggulan: Strategi Peningkatan PAD dan Nilai Tambah Ekonomi Lokal Kabupaten Pesisir Selatan.....	49

4b. Perikanan Air Tawar dan Fiskalisasi Produk Ikan Nagari: Strategi Ketahanan Pangan, Ekonomi Inklusif, dan Sumber PAD Baru Kabupaten Pesisir Selatan.....	50
4c. Peternakan dan Zona Sapi Rakyat Digital: Membangun Kedaulatan Protein, Wirausaha Tani, dan Sumber PAD di Kabupaten Pesisir Selatan.....	52
4d. Wisata dan Ekowisata Nagari sebagai Sumber PAD Digital: Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Monetisasi Budaya Alam Pesisir Selatan	54
4e. Sawah Pokok Murah dan Sistem Pangan Berbasis Nagari: Ketahanan Pangan Rakyat sebagai Sumber PAD Kabupaten Pesisir Selatan	57
4f. Pusat Produksi Pupuk Organik dan Kompos Nagari: Mendorong Pertanian Berkelanjutan dan PAD Hijau di Kabupaten Pesisir Selatan.....	59
4g. Pengelolaan Sampah Nagari sebagai Sumber PAD dan Ekonomi Sirkular di Kabupaten Pesisir Selatan	61
4h. Hilirisasi Gambir dan Penerapan IoT pada Perkebunan: Strategi Transformasi Komoditas Tradisional Menjadi Sumber PAD Modern	62
4i. Industri Kosmetik, Obat Tradisional, dan Penelitian Farmasi: Hilirisasi Biofarmaka Lokal sebagai Sumber PAD Baru.....	64
4j. Pusat Ekosistem Digital Sumbar: Pesisir Selatan sebagai Simpul Transformasi Ekonomi Digital Nagari.....	66
4k. Green Carbon Hub: Perdagangan Kredit Karbon dan Monetisasi Ekosistem Hijau Nagari	68
4l. Zona Logistik Maritim dan Pasar Ekspor Mikro: Strategi PAD Laut Berbasis Infrastruktur Digital dan Rantai Pasok UMKM	70
4m. Perikanan Laut dan Air Tawar: Hilirisasi Komoditas Spesifik sebagai Sumber PAD Inklusif dan Berkelanjutan.....	72
4n. Agrowisata dan Kampung Hortikultura Berbasis Digital: Integrasi Pertanian, Wisata, dan Retribusi PAD	74
4o. Data Center Daerah: Infrastruktur Digital Strategis untuk Kedaulatan Data dan Peningkatan PAD Berbasis Layanan Teknologi	75
4p. Pabrik Drone dan Teknologi UAV: Industri Strategis Berbasis Inovasi Lokal untuk Keamanan, Pertanian, dan PAD Daerah	77
4q. Pembangunan PLTS Skala Besar: Energi Surya untuk Efisiensi Fiskal, Transisi Hijau, dan PAD Strategis Pesisir Selatan	82
4r. PABRIK VAKSIN LOKAL PESISIR SELATAN: Strategi Kemandirian Kesehatan dan Sumber PAD Inovatif.....	87
BAB V.....	92
PENINGKATAN SDM MELALUI SKEMA LPDP UNTUK Mendukung Pengembangan Fiskal dan Sektor Strategis	92
5.a. Peningkatan SDM 50% S2 melalui LPDP	92
5.b. Imbal Balik dan Kontribusi PAD pada Masa Datang dari 50% SDM Pendidikan S2	93
5.c. PNS dari Universitas Negeri Terbaik.....	94
BAB VI.....	97

Koperasi Merah Putih Nagari	97
6.a. Struktur dan Fungsi Koperasi Merah Putih Nagari (KMPN)	97
6.b. Sektor Fokus dan Kontribusi PAD	97
6.c. Model Implementasi dan Contoh Lapangan	98
BAB VII.....	102
Infrastruktur Fiskal dan Fiskalisasi Nagari untuk Kemajuan Ekonomi Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan	102
7.a. Digitalisasi Fiskal Nagari	102
7.b. Fiskalisasi Aset Nagari	102
7.c. Penataan Transfer Fiskal Berbasis Kinerja (TFBK)	103
BAB VIII.....	106
Peningkatan Dana Transfer Daerah dan Sinergi Perpajakan Pusat–Daerah.....	106
8.a. Perbaikan Database Parameter Transfer ke Daerah.....	106
8.b. Dukungan Aktif terhadap Pemungutan Pajak Pusat (PPH dan PPN).....	107
8.c. Peningkatan Insentif Fiskal Berbasis Kinerja	108
8.d. Strategi Menghadapi PMK 24/2024 tentang Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah	109
BAB IX.....	112
Sinergi Fiskal Pusat–Daerah untuk Transformasi Pendapatan dan Belanja	112
9.a. Penguatan Forum Koordinasi Fiskal Daerah	112
9.b. Integrasi Data Fiskal dan Dashboard Bersama	112
BAB X.....	114
PENUTUP	115
DAFTAR PUSTAKA	116
Biodata Penulis	117



BAB I

REFORMASI STRATEGIS PENDAPATAN DAERAH KAB. PESISIR SELATAN



BAB I

REFORMASI STRATEGIS PENDAPATAN DAERAH

KAB PESISIR SELATAN

1.a. Peningkatan PAD sebagai Beban Bersama Seluruh OPD

Selama ini, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung terpusat pada satu instansi teknis, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sementara sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya berperan sebagai pengguna anggaran, tanpa kewajiban langsung untuk berkontribusi terhadap penerimaan daerah. Paradigma ini harus diubah secara mendasar. Dalam kerangka reformasi fiskal daerah yang adaptif dan bertanggung jawab, **setiap OPD wajib mengemban peran aktif dalam mendukung peningkatan PAD**, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan potensi sektoral masing-masing.

Setiap OPD akan menyusun **rencana kontribusi PAD tahunan** yang dituangkan dalam dokumen perencanaan (Renja OPD) dan diintegrasikan ke dalam RKPD serta RKA. Kontribusi ini tidak harus berupa pungutan fiskal langsung, tetapi bisa berupa penciptaan nilai tambah ekonomi daerah, efisiensi belanja yang menghasilkan ruang fiskal, atau pembukaan sumber pendapatan baru seperti penyewaan aset, lisensi produk, atau kerja sama operasional.

Misalnya, Dinas Pariwisata dapat mendorong retribusi dari festival budaya dan pemanfaatan destinasi wisata, Dinas Kelautan dan Perikanan dapat mengatur skema retribusi hasil tangkap dan pelabuhan, Dinas Perdagangan dapat mengoptimalkan retribusi pasar dan pengelolaan sewa lapak secara non-tunai, sementara Dinas Pendidikan dapat menghasilkan PAD dari layanan pendidikan non-formal atau pemanfaatan fasilitas publik berbasis sewa layanan.

Untuk mendukung hal ini, akan dibentuk **dashboard monitoring PAD lintas OPD** yang terintegrasi dengan sistem keuangan daerah. Setiap bulan, Bapenda bersama Bappeda dan Inspektorat akan mempublikasikan capaian PAD per OPD, baik yang bersifat langsung (pajak/retribusi) maupun tidak langsung (nilai aset yang dimonetisasi, efisiensi belanja, atau kontribusi BUMD yang dibina OPD). Capaian ini akan digunakan sebagai **salah satu indikator evaluasi kinerja OPD dan Kepala Dinas**, sehingga mendorong transformasi perilaku birokrasi dari sekadar pengguna anggaran menjadi *co-creator* penerimaan daerah.

Kebijakan ini juga menjadi instrumen konkret untuk mengimplementasikan amanat **UU No. 1 Tahun 2022** dan **PMK No. 24 Tahun 2024**, yang semakin menekankan peran aktif daerah dalam memperkuat kapasitas fiskalnya sendiri. Dengan menjadikan PAD sebagai beban bersama, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya membangun kemandirian fiskal secara teknis, tetapi juga membentuk budaya birokrasi yang produktif, kolaboratif, dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan fiskal daerah di masa depan.

Contoh Implementasi Kontribusi PAD oleh OPD Pesisir Selatan

1. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Dinas ini bertanggung jawab langsung atas pengembangan kawasan wisata strategis seperti Pantai Carocok, Kawasan Mandeh, dan event wisata budaya di sepanjang pesisir. Untuk itu, dinas ini dapat mendorong PAD melalui penyelenggaraan festival tahunan seperti *Mandeh Ocean Week* atau *Festival Pantai Selatan*. Kontribusi PAD berasal dari retribusi tiket masuk, sewa booth UMKM, penyewaan panggung dan sarana promosi, hingga kerja sama penyelenggaraan event pihak ketiga yang dikenakan lisensi. Dengan sistem pembayaran QRIS, pendapatan dapat dipantau real-time dan diproyeksi meningkat hingga Rp 5 miliar/tahun.

2. Dinas Perikanan

Sebagai OPD pengelola sektor unggulan, Dinas Perikanan dapat mendorong PAD dari modernisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI), khususnya di Painan dan Kambang. Pungutan retribusi dari hasil tangkapan, sewa cold storage, serta lisensi ekspor ikan segar dan hasil olahan dapat menjadi sumber PAD langsung. Digitalisasi transaksi dan pelaporan TPI akan memudahkan pencatatan, meningkatkan kepatuhan nelayan, dan mengurangi kebocoran. Proyeksi kontribusi PAD mencapai Rp 3 miliar per tahun.

3. Dinas Perdagangan dan UMKM

Penataan pasar tradisional menjadi pasar digital dengan sistem QRIS, e-kios, dan dashboard harian retribusi akan memberi ruang optimalisasi PAD dari sektor perdagangan rakyat. Dinas ini juga bisa mengembangkan aplikasi *PasarNagari.id* untuk mendigitalisasi transaksi pasar dan UMKM lokal. Dari

retribusi sewa kios, sewa parkir, dan pelatihan berbayar untuk pelaku UMKM, kontribusi PAD ditargetkan minimal Rp 4 miliar per tahun.

4. Dinas Lingkungan Hidup

Melalui program Bank Sampah Nagari, unit TPS3R, dan komposisasi sampah organik di pusat kota dan kawasan wisata, dinas ini dapat menciptakan PAD dari retribusi sampah rumah tangga dan hasil penjualan kompos serta produk daur ulang. Dinas juga dapat mengembangkan potensi *carbon credit* dari kawasan mangrove sebagai pendapatan baru berbasis lingkungan. Proyeksi kontribusi PAD bisa mencapai Rp 2 miliar pada tahun ketiga pelaksanaan.

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagai pengelola sarana pendidikan dan budaya, dinas ini dapat menyumbang PAD melalui sewa sarana seni dan sanggar budaya, pemberian lisensi digital tari tradisional atau pertunjukan budaya, serta kerja sama edukasi wisata budaya. PAD dapat berasal dari retribusi event sekolah seni, pelatihan kebudayaan, dan kolaborasi seni nagari. Potensi PAD mencapai Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar per tahun.

6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Melalui program Sawah Pokok Murah, digitalisasi kios pupuk, dan pasar tani berbasis QRIS, dinas ini mendorong kontribusi PAD melalui retribusi penyaluran benih bersertifikat, distribusi pupuk, dan pelabelan pangan strategis “Produk Hijau Pesisir Selatan.” Estimasi kontribusi PAD berkisar Rp 1,5–2 miliar per tahun.

7. Sekretariat Daerah/BKAD

Melalui pengelolaan aset daerah yang belum produktif—seperti rumah dinas tidak terpakai, gedung tua, dan lahan strategis yang idle—BKAD bisa mendorong monetisasi melalui pola BOT, sewa komersial, atau kerja sama pemanfaatan. Contohnya, kantor lama di pusat kota Painan bisa dikembangkan menjadi co-working space atau museum digital. Estimasi kontribusi PAD dari aset tak produktif berkisar Rp 3–5 miliar per tahun.



1.b. Belanja Berbasis Impact (Impact Spending)

Selama ini, belanja daerah cenderung dirancang berdasarkan input administratif (jumlah kegiatan, volume fisik, serapan anggaran), tanpa mempertimbangkan secara sistematis dampak fiskal, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan. Pendekatan ini tidak lagi relevan di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah serta tuntutan akuntabilitas belanja yang semakin tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan mengadopsi pendekatan **belanja berbasis dampak atau impact spending**, yaitu setiap rupiah belanja harus

memiliki keterkaitan yang jelas terhadap tujuan strategis, terutama dalam peningkatan penerimaan daerah dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Impact spending tidak semata-mata berarti mencari PAD langsung dari setiap kegiatan, melainkan merancang belanja agar menstimulasi aktivitas ekonomi dan fiskal secara terukur—baik melalui peningkatan konsumsi lokal, penciptaan lapangan kerja, monetisasi aset, atau pembentukan layanan yang dapat ditarik retribusinya. Dengan demikian, efektivitas anggaran tidak hanya dilihat dari serapan, tetapi dari rasio *return-on-expenditure* terhadap PAD dan indikator ekonomi mikro. Setiap program yang direncanakan harus mampu menunjukkan potensi efek ganda fiskal (*fiscal multiplier*) serta roadmap monetisasi manfaatnya, baik melalui retribusi, lisensi, sewa aset, atau penguatan lembaga ekonomi lokal.

Contoh Penerapan Belanja Berbasis Impact di Pesisir Selatan

📌 Contoh 1 – Festival Wisata Bahari Nagari Mandeh

- **Kegiatan:** Alokasi belanja untuk pelaksanaan event budaya dan olahraga air di Kawasan Mandeh.
- **Dampak Diharapkan:**
 - Peningkatan kunjungan wisatawan (target: 10.000 orang).
 - PAD dari retribusi tiket masuk, parkir, sewa booth, dan kontribusi UMKM sebesar Rp 800 juta.
 - Peningkatan transaksi digital QRIS UMKM lokal.
- **Catatan:** Tanpa komponen retribusi dan kerja sama bisnis, festival akan menjadi *cost center*. Dengan skema impact spending, menjadi *revenue center*.

📌 Contoh 2 – Pengadaan Perahu Fiber untuk Nelayan

- **Kegiatan:** DAK atau DAU untuk bantuan alat tangkap kepada nelayan kecil.
- **Dampak Diharapkan:**
 - Kewajiban nelayan menyetor hasil tangkapan melalui TPI yang tertib retribusi.
 - PAD meningkat dari pungutan TPI dan sewa cold storage minimal Rp 1,5 miliar per tahun.
 - Perahu dilabeli dan ditracking via GPS (monitoring kontribusi ekonomi secara digital).

📌 Contoh 3 – Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Baru dan Kambang

- **Kegiatan:** Belanja APBD untuk perbaikan infrastruktur pasar dan kios.
- **Dampak Diharapkan:**
 - Semua kios wajib terdaftar dan membayar retribusi via QRIS.
 - PAD pasar naik dari baseline Rp 700 juta menjadi Rp 1,5 miliar/tahun.
 - Sewa kios digital, laporan omzet, dan *fiscal rating* pedagang dijadikan dasar insentif pajak UMKM.

📌 Contoh 4 – Digitalisasi Perizinan dan Pembentukan Rumah Kemasan UMKM

- **Kegiatan:** Belanja Dinas Perizinan dan UMKM untuk membuat sistem layanan dan inkubasi usaha.
- **Dampak Diharapkan:**
 - UMKM yang menerima layanan wajib membayar lisensi atau mengikuti skema QRIS pembukuan omzet.
 - Potensi PAD dari pelatihan, lisensi halal, dan digital export ID.
 - Target pendapatan langsung Rp 500 juta dari pelatihan dan pendaftaran produk.



1.c. Perubahan Kultur dari Fokus Belanja ke Fokus Pendapatan

Salah satu akar struktural rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di banyak kabupaten/kota adalah dominasi budaya fiskal yang selama ini berorientasi pada belanja (spending mindset). Pemerintah daerah cenderung merancang APBD berdasarkan asumsi bahwa dana transfer pusat akan mencukupi seluruh kebutuhan belanja, sementara sisi pendapatan dianggap sekadar pelengkap, bukan fondasi. **Paradigma ini tidak lagi relevan** dalam era desentralisasi fiskal berbasis kinerja, terlebih ketika ketentuan **UU No. 1 Tahun 2022** dan **PMK No. 24 Tahun 2024** memberikan sanksi nyata berupa **pemotongan dan/atau penundaan transfer** apabila daerah gagal memenuhi kewajiban belanja wajib atau tidak menunjukkan kapasitas fiskal yang memadai.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan mendorong **perubahan kultur birokrasi fiskal**, dari hanya memikirkan alokasi anggaran menjadi fokus pada **konstruksi sumber penerimaan**. Prinsipnya adalah: *setiap belanja harus punya imbas terhadap pendapatan* – baik langsung (pajak/retribusi) maupun tidak langsung (aktivitas ekonomi, aset produktif, kinerja BUMD). Setiap OPD akan dilatih untuk memformulasikan program dengan pendekatan *revenue-aware*, yaitu bagaimana sebuah kegiatan menciptakan potensi penerimaan, efisiensi, atau monetisasi layanan publik.

Pendekatan ini juga berarti mengubah *ritme dan struktur perencanaan*: tidak lagi hanya mempertanyakan

“berapa yang ingin dibelanjakan?”, tetapi lebih dahulu menanyakan “apa dampak pendapatannya?”, “siapa yang akan dikenakan tarif, lisensi, atau retribusi?”, serta “berapa besar potensi PAD atau pengembalian fiskalnya?”. Kultur ini tidak hanya meningkatkan kapasitas fiskal, tapi juga memperkuat akuntabilitas anggaran publik dan mengurangi program seremonial yang tidak berdampak.



Contoh Implementasi Perubahan Kultur ke Fokus Pendapatan

1. Proposal Kegiatan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata

- *Sebelum:* Proposal hanya berisi item belanja event, artis, panggung, dan dokumentasi.
- *Sesudah:* Proposal wajib menyertakan potensi retribusi, skema lisensi sponsor, target QRIS UMKM, dan kontribusi PAD dari tiket.

- *Contoh:* Festival Pantai Carocok disyaratkan menyumbang minimal Rp 500 juta dari retribusi dan lisensi. OPD menolak jika tidak ada skema pengembalian PAD.

2. Belanja Hibah Alat Tangkap di Dinas Perikanan

- *Sebelum:* Diberikan gratis kepada nelayan tanpa pengawasan.
- *Sesudah:* Diterapkan kontrak kinerja: hasil tangkap wajib melalui TPI dan cold storage daerah, retribusi wajib, tracking berbasis digital.
- *Contoh:* Hibah 50 perahu fiber = potensi PAD Rp 1,5 miliar dari retribusi pelelangan dan sewa gudang.

3. Revitalisasi Pasar oleh Dinas Perdagangan

- *Sebelum:* Fokus pada rehab fisik dan peresmian.
- *Sesudah:* Proposal pasar wajib menyertakan skema retribusi digital, QRIS untuk sewa kios, target PAD naik minimum 50%.
- *Contoh:* Pasar Kambang ditargetkan menyumbang PAD Rp 1,2 miliar/tahun setelah digitalisasi.

4. Bantuan UMKM di Dinas Koperasi

- *Sebelum:* Pelatihan diberikan gratis tanpa indikator fiskal.
- *Sesudah:* UMKM peserta wajib tercatat dalam sistem PAD, memiliki omzet tercatat QRIS, dan bersedia ikut lisensi produk.
- *Contoh:* 100 pelaku UMKM dengan omzet digital Rp 10 juta/bulan → potensi pajak mikro Rp 100 juta/tahun.

5. Penataan Aset oleh Sekretariat Daerah (BKAD)

- *Sebelum:* Aset kosong dibiarkan, bahkan menyebabkan biaya perawatan.
- *Sesudah:* Diberlakukan kewajiban monetisasi aset: BOT, sewa jangka panjang, lisensi komersial.
- *Contoh:* Eks kantor lama di Painan disewakan sebagai co-working space → PAD Rp 250 juta/tahun.

Transformasi fiskal bukan hanya soal menambah pungutan, tapi lebih dalam: **mengubah cara berpikir dan bertindak birokrasi** agar seluruh proses APBD diarahkan untuk menumbuhkan penerimaan yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan. Perubahan kultur ini akan dituangkan dalam dokumen resmi RPJMD, Renstra OPD, serta SOP penilaian perencanaan anggaran di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan pendekatan ini, Pesisir Selatan bergerak menuju *earning-centered government*, bukan hanya *spending-oriented administration*.

1.d. Proposal Wajib Mengandung Estimasi PAD

Untuk memastikan bahwa seluruh belanja publik diarahkan secara strategis dalam membangun kapasitas fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan kebijakan bahwa setiap **proposal kegiatan yang diajukan oleh OPD maupun Nagari wajib memuat estimasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)** yang akan dihasilkan. Ini adalah langkah konkret dalam merombak sistem perencanaan pembangunan dari semata belanja-sentris menjadi **revenue-aware planning**. Dalam praktiknya, setiap dokumen Renja, RKPD, maupun proposal belanja dari DAK/DAU yang diajukan harus menyertakan komponen estimasi penerimaan yang muncul akibat kegiatan tersebut—baik dalam bentuk retribusi, lisensi, sewa, pemanfaatan aset, kontribusi UMKM, maupun monetisasi dampak ekonomi lokal.

Dengan demikian, setiap program dinilai bukan hanya dari urgensinya secara teknis atau administratif, tetapi dari **rasio antara belanja dan potensi penerimaan atau dampak fiskalnya**. Mekanisme ini juga akan memperkuat fungsi pengawasan fiskal oleh Bappeda dan TAPD, karena proposal yang tidak mengandung analisis fiskal akan dikembalikan atau diprioritaskan ulang. Selain sebagai instrumen penguatan PAD, kebijakan ini akan menumbuhkan kesadaran fiskal lintas OPD dan Nagari, serta mendorong budaya akuntabilitas fiskal dalam seluruh proses perencanaan pembangunan.

Contoh Implementasi Proposal Wajib Memuat Estimasi PAD (Point dan Penjelasan Alinea)

1. Proposal Festival Wisata oleh Dinas Pariwisata

- *Isi Proposal:* Penyelenggaraan Festival Pantai Carocok selama 5 hari.
 - *Estimasi PAD:*
 - Retribusi tiket: 5.000 pengunjung x Rp10.000 = Rp 50 juta
 - Sewa tenda/booth sponsor: Rp 100 juta
 - Parkir wisata digital QRIS: Rp 20 juta
 - *Total Estimasi PAD:* Rp 170 juta
- Catatan:* Proposal diterima karena estimasi PAD >20% dari biaya penyelenggaraan.

2. Proposal Rehabilitasi Pasar Kambang oleh Dinas Perdagangan

- *Isi Proposal:* Rehabilitasi 100 kios pasar dan sistem drainase.
- *Estimasi PAD:*

- Sewa kios digital per tahun: 100 kios x Rp 2 juta = Rp 200 juta
- Retribusi harian QRIS: Rp 1 juta/hari x 300 hari = Rp 300 juta
- *Total Estimasi PAD:* Rp 500 juta
- *Catatan:* Proposal prioritas tinggi karena berdampak langsung pada sektor PAD pasar.

3. Proposal Pengadaan Perahu Fiber oleh Dinas Perikanan

- *Isi Proposal:* 30 perahu bantuan untuk kelompok nelayan.
- *Estimasi PAD:*
 - Hasil tangkapan masuk TPI dengan retribusi:
 - 30 unit x 2 ton/minggu x Rp 250/kg x 40 minggu = Rp 600 juta
 - Retribusi sewa cold storage oleh koperasi: Rp 100 juta
- *Total Estimasi PAD:* Rp 700 juta
- Catatan:* Disetujui karena tercipta retribusi berulang tahunan.

4. Proposal Pelatihan Digitalisasi UMKM oleh Dinas Koperasi

- *Isi Proposal:* 100 pelaku UMKM pelatihan 5 hari.
- *Estimasi PAD:*
 - Pelatihan berbayar via QRIS: 100 x Rp 150.000 = Rp 15 juta
 - Aktivasi QRIS omzet UMKM → basis PPh UMKM dan potensi retribusi
- *Total Estimasi PAD langsung kecil, tapi potensi fiskal jangka menengah besar.*
- Catatan:* Disetujui dengan syarat skema tracking omzet pasca pelatihan.

5. Proposal Revitalisasi Gedung Seni oleh Dinas Pendidikan & Kebudayaan

- *Isi Proposal:* Renovasi gedung sanggar budaya di Painan.
- *Estimasi PAD:*
 - Sewa pentas: 12 event x Rp 5 juta = Rp 60 juta
 - Pelatihan tari berbayar: 5 kelas x Rp 5 juta = Rp 25 juta
- *Total Estimasi PAD:* Rp 85 juta/tahun
- *Catatan:* Proposal dinilai produktif karena menyumbang PAD budaya dan promosi identitas lokal.

Integrasi dalam Sistem SIPD & RKPD Digital

Setiap OPD akan difasilitasi format **Estimasi PAD Template** dalam sistem perencanaan SIPD dan RKPD online. Template ini mencakup:

- Komponen kegiatan dan potensi PAD langsung/tidak langsung
- Waktu realisasi PAD
- Basis tarif dan skema pemungutan (QRIS, retribusi, sewa, lisensi)
- Perkiraan pertumbuhan PAD tahunan pasca kegiatan

Melalui penerapan kebijakan ini, setiap rupiah belanja menjadi instrumen pertumbuhan fiskal, bukan hanya konsumsi birokratik. Proposal yang membawa nilai pendapatan akan mendapatkan **prioritas pendanaan**, sementara proposal tanpa komponen fiskal akan diminta revisi atau digabung dengan program lain yang lebih produktif. Strategi ini akan memperkuat prinsip “belanja harus memicu penerimaan” dan mendorong desain anggaran daerah yang lebih akuntabel dan visioner.

1.e. Screening Belanja Berbasis Efisiensi dan Dampak Fiskal

Untuk menjamin bahwa seluruh belanja daerah digunakan secara efisien dan memberikan dampak fiskal yang terukur, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menerapkan mekanisme **screening belanja berbasis efisiensi dan dampak fiskal**. Ini berarti bahwa sebelum sebuah kegiatan dianggarkan, akan dilakukan analisis perbandingan antara nilai belanja yang diusulkan dengan nilai potensi penerimaan (PAD) yang dihasilkan, atau *return-on-spending* terhadap dampak ekonomi dan fiskal lokal.

Belanja yang dianggap memiliki nilai manfaat rendah, duplikasi kegiatan, atau tidak mendorong pertumbuhan ekonomi dan PAD akan **direalokasikan** ke sektor yang lebih produktif. Screening ini juga menjadi alat kontrol agar belanja tidak hanya berbasis historical budget (copy-paste tahun sebelumnya), tapi benar-benar dikaitkan dengan hasil nyata terhadap kesejahteraan dan kemandirian fiskal daerah.

Metode screening dilakukan melalui pengisian Form Estimasi PAD dan Efisiensi Belanja yang diintegrasikan dalam SIPD atau digunakan manual dalam tahap awal proses RKPD. Penilaian dilakukan oleh Bappeda bersama TAPD berdasarkan nilai rasio efisiensi, urgensi, keberlanjutan, serta potensi replikasi dan multiplier effect-nya terhadap PAD dan ekonomi lokal.

Contoh Screening Belanja di Kabupaten Pesisir Selatan

1. Belanja: Rehab Gedung Serbaguna Nagari (Rp 1,2 miliar)

- *Dampak fiskal*: Tidak ada skema retribusi atau pemanfaatan komersial.
- *Screening*: Ditolak, direvisi jadi kerja sama pemanfaatan dengan koperasi seni/UMKM.
Revisi dampak: Sewa panggung + lisensi event → estimasi PAD Rp 100 juta/tahun.

2. Belanja: Festival Kuliner Painan (Rp 800 juta)

- *Dampak fiskal awal*: Belanja konsumtif, hanya seremonial.
- *Revisi*: Penambahan skema QRIS UMKM, booth berbayar, sponsor berlisensi.
Dampak setelah revisi: Estimasi PAD Rp 250 juta dan pelibatan 100 UMKM.

3. Belanja: Bantuan bibit dan alat pertanian (Rp 3 miliar)

- *Screening*: Diubah ke model oftaker koperasi, bibit dan alat sebagai *capital injection*.
PAD baru: Retribusi pupuk, komisi penjualan koperasi, lisensi “Pangan Sehat Pessel” → estimasi PAD Rp 500 juta/tahun.

FORM ESTIMASI PAD & SCREENING BELANJA

Komponen	Keterangan
Nama Kegiatan	Contoh: Revitalisasi Pasar Nagari Kambang
OPD Pengusul	Dinas Perdagangan dan UMKM
Pagu Belanja	Rp 1.500.000.000
Sumber Dana	DAU Reguler
Jenis Dampak Fiskal	PAD langsung (retribusi), PAD tidak langsung (transaksi UMKM), monetisasi aset
Komponen PAD yang Dihasilkan	Sewa kios, retribusi harian, QRIS transaksi pedagang
Estimasi PAD Tahun Pertama	Rp 700.000.000
Rasio PAD vs Belanja (%)	46,7 %
Skema Monitoring	Dashboard QRIS pasar + laporan mingguan UMKM
Catatan Screening	Layak dibiayai karena PAD ≥30%, ada multiplier ekonomi
Rencana Tindak Lanjut	Integrasi ke sistem digital PAD & pelatihan pedagang

Indikator Screening yang Digunakan:

- PAD minimal 20–30% dari pagu kegiatan untuk kegiatan dengan potensi fiskal tinggi.
- Adanya **skema monetisasi** aset atau layanan publik.
- Efek ganda terhadap sektor ekonomi lokal (UMKM, nelayan, petani).
- Peluang untuk menjadi **model replikasi** atau *scalable program*.
- Efisiensi biaya dan *lifecycle cost* yang rasional.

1.f. Penyiapan SDM dan Reformasi Birokrasi untuk Implementasi Strategi PAD

Transformasi paradigma fiskal dari *belanja-sentris* menjadi *pendapatan-sentris* tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap, adaptif, dan kompeten secara teknis. Selama ini, pendekatan birokrasi terhadap pengelolaan pendapatan daerah masih bersifat administratif, sektoral, dan reaktif—lebih banyak menunggu instruksi, dibandingkan proaktif menggali potensi penerimaan. Padahal, reformasi pengelolaan PAD membutuhkan perubahan pola pikir (mindset), keterampilan baru (reskilling), dan organisasi kerja yang dinamis, kolaboratif, serta berbasis data dan teknologi.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan bahwa implementasi kebijakan PAD sebagai beban bersama lintas OPD, penyusunan proposal berbasis estimasi PAD, serta screening belanja berbasis dampak fiskal harus diikuti dengan **perubahan birokrasi secara cepat dan simultan**, utamanya melalui penyiapan SDM kunci di seluruh level perangkat daerah. Pembentukan unit-unit teknis lintas sektor untuk inovasi PAD, penguatan tim pengawasan PAD digital, serta pelatihan rutin dengan modul fiskal modern dan tools digital adalah langkah yang akan ditempuh secara sistematis dan terjadwal.

Langkah-Langkah Strategis Penyiapan SDM & Reformasi Birokrasi Cepat

1. Identifikasi dan Penunjukan Tim Inti Reformasi PAD (Q3 2025)

- Tiap OPD wajib menunjuk minimal 2 pegawai fungsional/struktural sebagai **“Fiskal Champion”** yang akan menjadi ujung tombak perencanaan PAD dan pengelolaan retribusi, sewa, lisensi, serta monetisasi aset sektor mereka.

2. Pelatihan dan Sertifikasi PAD Digital (Q4 2025 – Q2 2026)

- Dinas teknis (Bapenda, Bappeda, BKAD, Disdag, Perikanan, Pariwisata, Pertanian) mengikuti pelatihan:
 - **Estimasi PAD & Dashboard Fiskal**

- **Pemanfaatan QRIS dan e-Retribusi**
- **Monetisasi Aset & Kerja Sama Komersial Daerah**
- **Pengelolaan PAD Berbasis Kinerja**

3. Pendampingan Teknis oleh DJPb dan BPKP (Berjalan Mulai 2026)

- Kolaborasi aktif dengan Kanwil DJPb Sumatera Barat untuk coaching klinik perencanaan dan akuntabilitas fiskal daerah.
- BPKP mendampingi audit sistem dan tata kelola PAD digital berbasis risiko.

4. Restrukturisasi Internal Bapenda dan BKAD (Q1 2026)

- Bapenda diperkuat dengan subbidang inovasi penerimaan, pemetaan potensi fiskal, dan digitalisasi PAD.
- BKAD membentuk unit pengelolaan aset daerah untuk monetisasi secara aktif.

5. Integrasi Target PAD dalam SKP dan Evaluasi Kinerja ASN (Mulai 2026)

- Kepala OPD, pejabat pengelola program, dan ASN teknis diberi target kontribusi PAD sebagai bagian dari **SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)**.
- ASN yang berhasil mengembangkan sumber PAD baru diberi insentif non-finansial dan prioritas promosi berbasis kinerja nyata.

6. Pelatihan Nagari & Pendampingan Aparatur Pemerintah Desa (2026–2027)

- Seluruh nagari difasilitasi pelatihan fiskalisasi berbasis aset, lisensi, dan sistem e-pungutan.
- Modul khusus disusun bersama Bapenda dan Bappeda untuk meningkatkan kapasitas wali nagari dan sekretaris nagari dalam mendukung PAD.

Skema Cepat (Quick-Win Reformasi Birokrasi PAD Pesisir Selatan)

Langkah Cepat	Waktu Pelaksanaan	Output
Penunjukan Fiskal Champion OPD	Q3 2025	50–70 ASN terlatih
Pelatihan Estimasi PAD & QRIS	Q4 2025	7 OPD prioritas
Finalisasi SOP dan Dashboard PAD OPD	Q1 2026	SOP baru & monitoring terintegrasi
Integrasi Target PAD dalam SKP ASN	Q2 2026	ASN dinilai berbasis hasil PAD
Pendampingan Monetisasi Aset	2026–2027	20 aset termanfaatkan
Pelatihan Nagari PAD & Insentif Kinerja	2026–2028	Peningkatan PAD nagari 30–50%

Perubahan strategi fiskal yang besar menuntut birokrasi yang lincah, responsif, dan bersedia keluar dari zona nyaman administratif. Dengan membekali SDM secara intensif, membentuk struktur kerja baru, dan memberikan ruang kreasi fiskal pada tiap OPD dan Nagari, Kabupaten Pesisir Selatan akan mampu membangun mesin fiskal lokal yang handal. Transformasi ini bukan hanya soal kompetensi teknis, tetapi **misi bersama untuk berdiri dengan kekuatan sendiri sebagai daerah yang mandiri dan bermartabat secara fiskal**.

Apakah Anda ingin skema pelatihan ini dibuat menjadi modul implementasi per tahun (2025–2029)? Saya juga bisa bantu siapkan dokumen *Training Plan* atau Surat Edaran Bupati terkait “Gerakan ASN Kontributor PAD”.

Berikut saya sajikan **Training Plan ASN dan Sistem Implementasi Cepat** untuk mendukung reformasi pengelolaan PAD di Kabupaten Pesisir Selatan. Disusun sistematis, realistis, dan berorientasi hasil — dapat dimasukkan dalam Renja Bappeda/BKPSDM/Diklat Daerah mulai 2025.

1.g. Training Plan ASN dan Sistem Implementasi Cepat Reformasi PAD

Tujuan Utama

- Membentuk **SDM fiskal daerah yang handal dan responsif** terhadap reformasi pendapatan daerah.
- Mempercepat adopsi **digitalisasi PAD**, integrasi antar-OPD, dan penumbuhan *earning-mindset* birokrasi.
- Menyusun sistem perubahan terstruktur berbasis pelatihan, asesmen kinerja, dan pendampingan lapangan.

STRUKTUR TRAINING PLAN (2025–2027)

No	Program Pelatihan	Target Peserta	Mitra	Output	Waktu
1	Estimasi PAD & Belanja Berbasis Dampak	2 pegawai/fungsional setiap OPD & Nagari	Bappeda, DJPb	Format Estimasi PAD & screening belanja	Q3 2025
2	Digitalisasi PAD (QRIS, e-Pungutan, Dashboard)	Bapenda, Dinas Pasar, DLH, Pariwisata, Perikanan	BI, Bapenda	Sistem QRIS aktif di 10 titik PAD	Q4 2025
3	Monetisasi Aset dan Kerja Sama Usaha Daerah	BKAD, BUMD, OPD Aset	Kemenkeu, BPKP	SOP Monetisasi Aset & skema KSO/BOT	Q1 2026
4	Reformasi Regulasi & Review Perda PDRD	DPRD, Bapenda, Bagian Hukum	DJPk, Kemendagri	Draft Perda PDRD berbasis UU HKPD	Q2 2026
5	Audit Digital & Kepatuhan Fiskal	Inspektorat, BPKAD, Bapenda	BPKP, DJPb	Deteksi potensi kebocoran PAD	Q3 2026
6	Fiskalisasi Nagari & Koperasi PAD	Seknag, Wali Nagari, Koperasi	DPMN, Kemenkop	Nagari punya akun QRIS & aplikasi PAD lokal	Q4 2026
7	Pelatihan ASN Pajak & Sertifikasi PAD Digital	ASN muda dari OPD teknis	DJPb, LPDP, BPSDM	Sertifikasi & rencana studi lanjut	2026–2027

SISTEM IMPLEMENTASI CEPAT (Quick Implementation System)**1. Pembentukan Tim Akselerasi PAD**

- Tim lintas OPD di bawah koordinasi Bappeda dan Bapenda.
- Bertanggung jawab menyusun SOP baru, menyebarkan materi pelatihan, dan memantau progres OPD.
- Diperkuat dengan “Fiskal Champion” dari 10 OPD dan 5 Nagari percontohan.

2. Portal e-PAD Training & Knowledge Hub

- Modul pelatihan diunggah secara daring: video, e-book, studi kasus, infografis.
- Seluruh ASN dapat mengakses dan mengikuti pelatihan berbasis penilaian (pre-post test).
- Terintegrasi dengan e-SKP dan e-Kinerja ASN.

3. Dashboard Monitoring Implementasi PAD

- Menampilkan progres pelatihan, implementasi QRIS, estimasi PAD, monetisasi aset.
- Dapat diakses oleh Bupati, TAPD, dan OPD teknis.

4. Surat Edaran Bupati: ASN Kontributor PAD

- Mewajibkan seluruh OPD mengirimkan minimal 2 staf mengikuti pelatihan PAD.
- Penilaian kinerja ASN mempertimbangkan inovasi, kontribusi, dan keberhasilan fiskal OPD.

TARGET KAPASITAS & HASIL (2025–2029)

Tahun	Output Utama	Target Kuantitatif
2025	ASN paham konsep reformasi PAD	100 ASN dari 20 OPD & 10 Nagari
2026	Implementasi Estimasi PAD & QRIS	50 kegiatan ter-screening & 100 titik QRIS aktif
2027	OPD aktif monetisasi & kerjasama usaha daerah	10 aset dimonetisasi, 5 KSO/BOT berjalan
2028	Nagari mandiri fiskal digital	25 Nagari punya sistem pungutan QRIS sendiri
2029	Pessel capai rasio kemandirian fiskal 50%	PAD > Rp 350 miliar & belanja pegawai <30%

Dengan *Training Plan* dan sistem implementasi cepat ini, Pesisir Selatan akan mengalami loncatan dalam kualitas SDM fiskalnya—dari birokrasi pasif menjadi aktor aktif pembangunan ekonomi. Proses ini bukan hanya membangun kemampuan, tetapi juga **menanamkan budaya fiskal yang modern, digital, dan progresif**, menuju target kemandirian fiskal 50% dan pertumbuhan ekonomi 7,3% pada 2029.





BAB II

DIGITALISASI PEMBAYARAN DAERAH PESISIR SELATAN

BAB II

DIGITALISASI PEMBAYARAN DAERAH PESISIR SELATAN

Digitalisasi menjadi fondasi utama dalam transformasi sistem pengelolaan PAD di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan wilayah geografis yang luas dan populasi yang tersebar di pesisir, perbukitan, dan kawasan nagari terpencil, pendekatan digital menjadi strategi paling efisien dan inklusif untuk menjangkau seluruh potensi penerimaan daerah secara cepat dan real-time. Sistem pembayaran digital yang terintegrasi bukan hanya alat untuk menutup celah kebocoran, tetapi juga menjadi **mekanisme yang mempermudah uang masuk ke kas daerah (PAD) secara langsung, transparan, dan terotomatisasi**. Masyarakat tidak lagi harus datang ke kantor OPD atau bank daerah untuk membayar pajak, retribusi, atau sewa—cukup melalui QRIS, aplikasi SuperApp PAD, atau kanal minimarket dan dompet digital yang telah terkoneksi.

Hal ini mempercepat waktu transaksi, menekan biaya pungutan, dan memperluas basis pembayar dari sektor informal, UMKM, hingga pelaku ekonomi digital rumah tangga. Bagi pemerintah daerah, sistem ini mempermudah proses rekonsiliasi harian, mengurangi piutang daerah, dan memperkuat cashflow daerah. Inisiatif digitalisasi pembayaran juga tidak hanya menyasar transaksi pemerintah ke masyarakat (*Government to Citizen/G2C*), tetapi juga antar pemerintah daerah dan pelaku usaha (*G2B*), serta antar pemerintahan nagari (*G2G*) dalam skema transfer fiskal internal berbasis kinerja. Dengan sistem digital, uang tidak hanya lebih cepat masuk, tetapi juga **lebih pasti tercatat dan lebih aman dalam pengelolaannya**. Digitalisasi di sini bukan hanya soal alat bayar, tetapi tentang menciptakan sistem fiskal yang modern, otomatis, dan menjadikan PAD sebagai instrumen pembangunan yang kokoh dan berkelanjutan.



2.a. QRIS sebagai Instrumen Pembayaran PAD

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) merupakan standar pembayaran digital nasional yang telah diterapkan secara luas oleh Bank Indonesia sebagai platform inklusif, efisien, dan aman. Dalam konteks pengelolaan PAD, QRIS adalah instrumen strategis untuk mempermudah penerimaan daerah secara langsung, cepat, dan real-time dari berbagai jenis transaksi layanan publik. Dengan QRIS, pembayaran pajak daerah, retribusi, sewa aset, layanan pasar, hingga pembayaran tiket wisata dapat dilakukan dari ponsel masyarakat tanpa harus datang ke loket atau menyetorkan tunai ke bendahara OPD. QRIS tidak hanya menutup potensi kebocoran penerimaan, tetapi juga mengubah wajah pelayanan publik menjadi modern dan akuntabel.

Untuk Kabupaten Pesisir Selatan, penerapan QRIS sangat relevan mengingat karakteristik daerah yang luas dan banyak objek PAD yang tersebar secara geografis—dari kawasan wisata seperti Pantai Carocok dan Kawasan Mandeh, pasar tradisional seperti Pasar Kambang dan Pasar Painan, hingga TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan layanan parkir di pusat kota. Dengan QRIS, seluruh titik potensi PAD bisa disambungkan langsung ke kas daerah melalui sistem kanal perbankan mitra, dengan bukti transaksi digital yang terekam otomatis. Hal ini akan sangat membantu daerah meningkatkan kecepatan setoran, akurasi pencatatan, dan mengurangi beban operasional pungutan manual.

Contoh Implementasi QRIS dalam Peningkatan PAD Pesisir Selatan

Sektor	Objek PAD	QRIS Digunakan Untuk	Potensi Kenaikan PAD
Pariwisata	Tiket masuk Pantai Carocok, wisata pulau di Kawasan Mandeh	Pembayaran tiket digital via QRIS langsung ke kas daerah	Rp 3–5 miliar/tahun
Perikanan	TPI Painan & Kambang	Retribusi hasil tangkapan & jasa lelang	Rp 2–3 miliar/tahun
Pasar Tradisional	Pasar Kambang, Pasar Barung-Barung Belantai	Sewa kios, retribusi harian pedagang via QRIS	Rp 1,5–2 miliar/tahun
Parkir & Transportasi	Parkir kawasan wisata & kota	Pembayaran parkir digital QRIS	Rp 500 juta–1 miliar/tahun
Aset Daerah	Sewa aula, kantor kosong, gedung serbaguna	Sewa dibayar via QRIS (tanpa kontak langsung)	Rp 300 juta–500 juta/tahun



Langkah Implementasi QRIS PAD Pesisir Selatan (2025–2027)

Langkah 1: Penunjukan Lokasi Prioritas dan Penetapan Target

Menentukan 100 lokasi prioritas penerapan QRIS di 2025: pasar, TPI, objek wisata, kantor pelayanan, parkir, dan UPT pelayanan.

Menargetkan 500 titik aktif QRIS pada akhir 2026, dan 1.000 titik aktif pada 2027.

Langkah 2: Kerja Sama Teknis dengan Bank Mitra & BI

Menandatangani MoU dengan Bank Nagari, Bank Indonesia, dan Himbara untuk pembukaan rekening kas OPD/Nagari yang terkoneksi dengan QRIS.

Menyusun SOP transaksi QRIS dan verifikasi laporan harian/mingguan secara digital.

Langkah 3: Penyiapan Infrastruktur dan Digitalisasi Layanan

Pengadaan stiker QRIS tetap dan scanner mobile untuk pasar dan TPI.

Integrasi QRIS dengan sistem dashboard PAD real-time yang dikembangkan Bapenda.

Langkah 4: Sosialisasi, Pelatihan, dan Insentif

Pelatihan operator di pasar, TPI, dan kantor pelayanan tentang penggunaan QRIS dan pelaporan digital.

Pemberian insentif nagari dan OPD yang mencapai target peningkatan PAD via QRIS minimal 10% dari baseline.

Langkah 5: Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Bapenda bersama Inspektorat melakukan audit QRIS triwulan.

Masyarakat diberikan bukti transaksi digital otomatis melalui WhatsApp atau SMS.

Dampak yang Diharapkan

1. PAD meningkat karena semua transaksi tercatat otomatis tanpa celah pungli atau kebocoran.
2. Beban administratif OPD dan petugas pungut menurun.
3. Masyarakat memiliki pengalaman membayar yang cepat, tanpa antre, dan transparan.
4. Terbentuk ekosistem ekonomi digital lokal berbasis kepatuhan fiskal.

2.b. Dashboard PAD Terintegrasi Real-Time

Dalam sistem pengelolaan pendapatan daerah yang modern, kebutuhan akan transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan berbasis data real-time menjadi sangat penting. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan mengembangkan **Dashboard PAD Terintegrasi Real-Time** yang menyajikan data penerimaan asli daerah dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Nagari secara langsung, akurat, dan terpusat. Dashboard ini akan menjadi *command center* fiskal daerah, memungkinkan pimpinan daerah, Bapenda, Bappeda, TAPD, hingga Inspektorat dapat memantau setiap transaksi penerimaan—baik dari QRIS, retribusi pasar, sewa aset, layanan TPI, hingga kontribusi BUMD—secara harian, mingguan, hingga bulanan.

Sistem dashboard ini tidak hanya menyajikan angka statis, tetapi akan dilengkapi dengan fitur **analitik, peta titik pungutan**, peringatan dini jika ada anomali penerimaan, serta indikator kinerja per OPD dan per nagari. Dengan teknologi ini, keputusan anggaran, intervensi fiskal, dan reward kinerja akan lebih tepat sasaran. Selain itu, dashboard juga akan terkoneksi dengan sistem e-Budgeting dan e-Planning daerah, sehingga seluruh siklus fiskal daerah berjalan dalam satu sistem yang utuh dan terintegrasi. Dashboard real-time ini akan dikelola oleh Bapenda dan menjadi pusat koordinasi lintas sektor untuk mengejar target kemandirian fiskal 50% pada tahun 2029.

Langkah Implementasi Dashboard PAD Real-Time Pesisir Selatan

Langkah 1: Penunjukan OPD dan Lokasi Pilot (2025)

- Menentukan 10 OPD dan 5 nagari sebagai *early adopter* dashboard PAD.
- Fokus awal: Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, DLH, dan Bapenda.
- Pilot area: Pasar Kambang, TPI Painan, Kawasan Wisata Mandeh, dan retribusi parkir Painan.

Langkah 2: Pemetaan Sistem Eksisting dan Kebutuhan Integrasi

- Melakukan audit sistem eksisting seperti SIMDA Pendapatan, e-Parking, dan aplikasi QRIS.
- Menyusun *blueprint* integrasi antar sistem: Bapenda – BPKAD – Bank Daerah – BI – OPD teknis.

Langkah 3: Pengembangan Aplikasi Dashboard PAD

- Aplikasi berbasis web dan mobile, dengan tampilan visual interaktif:
 - Grafik per sektor dan per hari.
 - Ranking OPD/Nagari berkontribusi PAD terbesar.
 - Notifikasi deviasi target mingguan.
 - Lokasi QRIS aktif per titik dan nilainya.
- Dibangun oleh Dinas Kominfo dan vendor mitra Pemda dengan modul pelaporan otomatis.

Langkah 4: Integrasi QRIS dan e-Pungutan

- Semua QRIS yang digunakan di titik PAD harus terkoneksi dengan dashboard ini.
- Sistem mencatat transaksi berdasarkan jenis pungutan, lokasi, dan waktu.

Langkah 5: Pelatihan Pengguna dan Peluncuran (2026)

- Pelatihan ASN Bapenda dan operator OPD.
- Sosialisasi ke camat dan wali nagari sebagai *data entry* awal dan pelapor mingguan.

Contoh Tampilan Fitur Dashboard PAD

Fitur	Fungsi
Real-Time Monitoring	Grafik dan tabel penerimaan harian dari semua sumber PAD
Peta Interaktif	Menampilkan titik lokasi QRIS aktif dan titik PAD potensial
OPD Performance	Ranking kontribusi OPD terhadap PAD dan tren capaian target
Alert System	Deteksi anomali (penurunan tajam, titik tidak aktif, potensi fraud)
Integrasi Data	Koneksi dengan data Bank Nagari, BI-FAST, dan SIMDA Pendapatan
Export & Reporting	Laporan otomatis ke TAPD, Bupati, dan Inspektorat

Dampak yang Diharapkan

1. Peningkatan kontrol fiskal secara menyeluruh: semua OPD dan nagari berada dalam satu sistem pemantauan.
2. Transparansi publik meningkat, karena data penerimaan bisa dipublikasikan secara terbatas ke masyarakat.
3. Reward kinerja berbasis data: OPD dan nagari berprestasi akan mendapatkan insentif fiskal nyata.
4. Efisiensi pengawasan, karena Inspektorat dan BPKP dapat mengakses laporan digital, tanpa audit manual konvensional.
5. Percepatan keputusan kebijakan, misalnya intervensi cepat jika ada sektor yang PAD-nya anjlok drastis.

Berikut adalah penyajian lengkap untuk **Subbab 2.c – Integrasi Pelayanan dan Pembayaran Digital Lintas OPD** dalam Bab II *Digitalisasi Pembayaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan*, dengan penjelasan konseptual, langkah teknis, dan contoh implementasi konkret.

2.c. Integrasi Pelayanan dan Pembayaran Digital Lintas OPD

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah **fragmentasi sistem pelayanan dan pembayaran antar-OPD** yang berdampak pada duplikasi data, ketidaksesuaian target penerimaan, dan rendahnya efektivitas monitoring fiskal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan membangun **ekosistem pelayanan publik terintegrasi secara digital**, di mana seluruh proses pelayanan—dari perizinan, distribusi barang subsidi, hingga jasa publik—terhubung langsung dengan sistem pembayaran dan pencatatan PAD secara otomatis.

Pendekatan ini mengubah paradigma birokrasi dari layanan administratif sektoral menjadi **layanan berbasis transaksi dan hasil fiskal**. Artinya, setiap layanan yang diberikan oleh OPD kepada masyarakat, pelaku usaha, atau koperasi nagari, secara otomatis akan menghasilkan input ke sistem PAD: melalui retribusi, sewa, lisensi, atau tarif jasa tertentu. Dalam sistem ini, satu *user ID* masyarakat atau pelaku usaha akan terhubung dengan seluruh layanan OPD (One ID for All Services), sehingga proses perizinan usaha, pembayaran pajak restoran, pelaporan omzet UMKM, dan distribusi pupuk atau alat tangkap semuanya dapat dilakukan dalam satu platform digital yang saling terhubung. Ini adalah kunci menuju **transformasi fiskal terpadu** yang berbasis keadilan pelayanan dan efisiensi digital.

Langkah-Langkah Strategis Integrasi Pelayanan dan Pembayaran Digital

Langkah 1: Mapping Layanan yang Berhubungan dengan PAD

- Identifikasi seluruh **layanan publik yang berpotensi menghasilkan PAD** di setiap OPD:
 - Dinas Perdagangan (sewa kios, izin usaha, pelatihan UMKM)
 - Dinas Pariwisata (izin event, lisensi penyelenggaraan, sewa lokasi wisata)
 - Dinas Perikanan (distribusi alat tangkap, pelelangan hasil laut)
 - Dinas Pertanian (distribusi pupuk, sertifikasi produk tani)
 - Dinas Kesehatan & Pendidikan Nonformal (sewa fasilitas, sertifikasi halal, pelatihan)

Langkah 2: Penyusunan Single Service Platform (SSP PAD)

- Pengembangan **aplikasi layanan digital** berbasis *super dashboard* yang menghubungkan semua layanan OPD ke sistem pembayaran QRIS, rekap retribusi, dan laporan fiskal.
- Masing-masing OPD memiliki *modul layanan* sendiri, tetapi database dan sistem pembayarannya terpusat.

Langkah 3: Integrasi dengan Sistem Pembayaran dan e-Planning

- Semua transaksi hasil layanan (pungutan, izin, retribusi) wajib dibayar melalui **QRIS** atau **Virtual Account (VA)** yang terekam otomatis di sistem dashboard PAD.
- Sistem ini juga akan terhubung ke **SIPD, e-Planning, dan SIMDA Pendapatan**, sehingga antara belanja, pelayanan, dan pendapatan menyatu secara sistemik.

Langkah 4: Pelatihan ASN & Uji Coba Lintas OPD (2026)

- ASN dari minimal 10 OPD dilatih untuk mengelola *dashboard layanan dan pendapatan*.
- Pilot project integrasi dilakukan di sektor pasar, wisata, dan TPI.

Langkah 5: Penerapan Insentif & Evaluasi Berbasis Transaksi

- OPD yang berhasil meningkatkan efektivitas layanan dan jumlah transaksi yang menghasilkan PAD akan mendapat **insentif kinerja**.
- Sistem evaluasi kinerja OPD dilengkapi dengan indikator “PAD per Layanan.”

Contoh Implementasi Integrasi Pelayanan–Pembayaran

OPD	Layanan Terintegrasi	Terkait PAD	Cara Integrasi
Dinas Perdagangan	Distribusi kios UMKM, izin pasar rakyat	Sewa kios, pelatihan, retribusi pasar	QRIS dibayar langsung dari aplikasi e-Pasar

Dinas Perikanan	Distribusi alat tangkap & BBM nelayan	Retribusi TPI, cold storage, sewa kapal	Akses BBM hanya diberikan jika retribusi dibayar via QRIS
Dinas Pariwisata	Sertifikasi event budaya, lisensi EO	Retribusi acara, lisensi sponsorship	Semua permohonan event wajib bayar via aplikasi PAD
Dinas Pertanian	Sertifikat produk organik dan pupuk	Retribusi pupuk dan pelabelan pangan	Sertifikat keluar hanya jika pembayaran QRIS terekam
Dinas Kesehatan	Pelatihan hygiene warung, sertifikasi halal	Retribusi pelatihan, lisensi warung sehat	Satu akun warung = akses pelatihan, sertifikat, dan pajak restoran

Dampak Strategis

1. Masyarakat mendapatkan **layanan yang lebih cepat dan transparan**, tanpa harus ke banyak tempat atau mengulang data.
2. Setiap transaksi layanan menghasilkan **input langsung ke sistem PAD**.
3. Tidak ada layanan gratis yang mengonsumsi APBD tanpa imbal balik fiskal.
4. Pemerintah daerah memiliki **sistem fiskal digital lintas sektor** yang bisa dipantau, diintervensi, dan dikembangkan sesuai potensi lokal.

2.d. Insentif dan Sanksi Digital

Dalam reformasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh sistem dan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh **perubahan perilaku birokrasi dan masyarakat** dalam mendukung kebijakan fiskal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan menerapkan sistem **insentif dan sanksi berbasis digital** yang terukur, adil, dan mendorong kinerja PAD secara berkelanjutan. Pendekatan ini selaras dengan teori ekonomi perilaku dalam administrasi publik, di mana insentif dan disinsentif yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kepatuhan fiskal, mendorong inovasi, dan menciptakan budaya kompetitif antarunit kerja.

Sistem insentif digital ditujukan untuk mendorong kinerja OPD, Nagari, dan pelaku ekonomi lokal dalam meningkatkan partisipasi terhadap sistem PAD digital—khususnya penggunaan QRIS, pelaporan real-time, dan kontribusi terhadap pertumbuhan penerimaan daerah. Di sisi lain, sanksi bersifat korektif dan digunakan untuk mencegah stagnasi, penyimpangan data, serta perilaku abai terhadap target fiskal. Pemberlakuan sistem ini akan dilandasi Peraturan Bupati dan dituangkan dalam dashboard monitoring sebagai sistem evaluasi kinerja otomatis.

Bentuk Insentif Digital

Penerima	Kriteria	Bentuk Insentif
OPD	Mencapai >90% target PAD digital	Tambahan alokasi belanja operasional berbasis kinerja; insentif ASN
Nagari	QRIS aktif ≥ 10 titik, transaksi meningkat 20%/tahun	Dana insentif fiskal nagari; prioritas program desa digital
ASN	Menginisiasi program PAD digital/inovasi layanan	Tunjangan kinerja tambahan; nominasi ASN Kontributor PAD
UMKM/Pelaku Usaha	Omzet tercatat QRIS meningkat konsisten	Pelatihan lanjutan, akses promosi & branding “UMKM Pessel Go Digital”

Bentuk Sanksi Digital

Subjek	Pelanggaran	Bentuk Sanksi
OPD/Nagari	Tidak melakukan pelaporan real-time, tidak mencapai 50% target PAD	Pemotongan operasional, evaluasi jabatan pengelola PAD
Pengelola Lokasi PAD	QRIS tidak aktif atau manipulasi laporan transaksi	Investigasi Inspektorat; audit digital dengan BPKP
BUMD	Tidak menyetor dividen sesuai KPI	Rekomendasi penggantian manajemen; pembekuan alokasi PMD
Pelaku Usaha	Menolak sistem digital, tidak melaporkan omzet	Pembekuan izin usaha; pencabutan insentif promosi

Mekanisme Implementasi Sistem Insentif–Sanksi Digital

Langkah 1: Integrasi Target dalam Dashboard

- Target PAD per OPD/Nagari disematkan dalam sistem dashboard digital (misalnya: Rp 1 miliar retribusi pasar/tahun untuk Dinas Perdagangan).
- Data QRIS, e-retribusi, dan sistem transaksi dikumpulkan otomatis harian.

Langkah 2: Penilaian Otomatis via Skoring Kinerja

- Skor berbasis: realisasi PAD (% target), peningkatan dari tahun sebelumnya, validitas data QRIS.
- Sistem memberikan notifikasi OPD mana yang layak mendapat insentif atau sanksi.

Langkah 3: Verifikasi dan Tindak Lanjut

- Inspektorat dan Bappeda melakukan verifikasi berkala dan menyusun daftar OPD/nagari penerima reward.
- Sanksi bersifat korektif dengan pendampingan teknis dan batas waktu pemulihan kinerja.

Contoh Aplikatif di Pesisir Selatan

Dinas Perikanan

- **Target QRIS aktif TPI:** 10 titik
- **Realisasi:** 12 titik aktif, transaksi naik 35%
- ☒ **Insentif:** Dana operasional tambahan Rp 100 juta & ASN teknis diikuti pelatihan nasional.

Nagari Kambang

- **Kinerja:** QRIS aktif 3 dari 10 titik, laporan tidak masuk selama 2 bulan
- ☒ **Sanksi:** Pemotongan 15% dana insentif nagari & wajib lapor progres mingguan ke Bapenda.

Dinas Pariwisata

- **Event Festival Pantai:** Menghasilkan Rp 250 juta dari QRIS
- ☒ **Insentif:** Prioritas dana promosi event tahun depan dan penghargaan PAD Berbasis Event.

Dampak Strategis

1. Mendorong OPD dan nagari bersaing positif dalam mengelola potensi PAD-nya.
2. Meningkatkan akuntabilitas fiskal berbasis data dan laporan digital.
3. Membentuk kultur kinerja yang responsif terhadap hasil dan bukan hanya anggaran.
4. Menggerakkan masyarakat (UMKM, pelaku usaha, pengelola objek) untuk aktif mendukung penerimaan daerah secara langsung.

2.e. Trigger Dividen untuk Semua BUMD sebagai Instrumen Digitalisasi PAD dan Efisiensi Fiskal

Sebagai entitas bisnis milik daerah, **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)** memegang peran penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah, baik melalui penyediaan layanan publik maupun sebagai kontributor langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui **dividen**. Namun kenyataannya, banyak BUMD daerah belum optimal menyumbang PAD karena kinerja yang tidak efisien, laporan keuangan yang tidak transparan, serta lemahnya pengawasan manajemen. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan menerapkan sistem **trigger dividen berbasis kinerja digital**, yaitu kebijakan yang mewajibkan seluruh BUMD—baik yang sudah berjalan maupun yang akan dibentuk—untuk menyetor dividen tahunan secara teratur dan berbasis dashboard digital.

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kontribusi PAD, tetapi juga menjadi **alat kontrol efisiensi manajerial dan arah strategis BUMD**. Dividen tidak lagi bersifat opsional atau hanya ditetapkan secara manual dalam RUPS tahunan, tetapi dihitung berdasarkan rasio laba bersih, efisiensi operasional, dan performa digitalisasi layanan. Selain itu, dashboard BUMD akan menjadi bagian integral dari sistem pemantauan PAD kabupaten, memungkinkan TAPD dan Bupati mengambil keputusan berbasis data, termasuk evaluasi direksi dan pemberian PMD (Penyertaan Modal Daerah) berikutnya.

Strategi Implementasi Trigger Dividen BUMD Berbasis Digital

1. Penetapan Target Minimal Dividen Tiap Tahun

- Setiap BUMD diwajibkan menyetor **minimal 5–10% dari laba bersih** sebagai dividen ke kas daerah.
- Jika BUMD masih dalam fase pengembangan (belum untung), wajib menyusun **roadmap** profitabilitas dan disetujui TAPD.

2. Digitalisasi Laporan Kinerja dan Keuangan BUMD

- BUMD wajib mengembangkan **dashboard internal** yang melaporkan omzet, laba rugi, efisiensi, beban operasional, dan transaksi QRIS (jika berlaku).
- Dashboard ini akan terhubung ke sistem keuangan daerah, memungkinkan Bappeda, BPKAD, dan Inspektorat melakukan pengawasan fiskal harian.

3. Insentif dan Sanksi Berbasis Capaian Dividen

- BUMD yang menyetor dividen di atas target akan mendapatkan prioritas PMD, promosi digital oleh Pemda, dan ruang ekspansi usaha.
- BUMD yang gagal menyetor dividen tanpa alasan objektif akan direview kinerja manajemen dan dapat diberhentikan melalui mekanisme evaluasi oleh kepala daerah.

4. Integrasi Layanan BUMD ke Sistem PAD

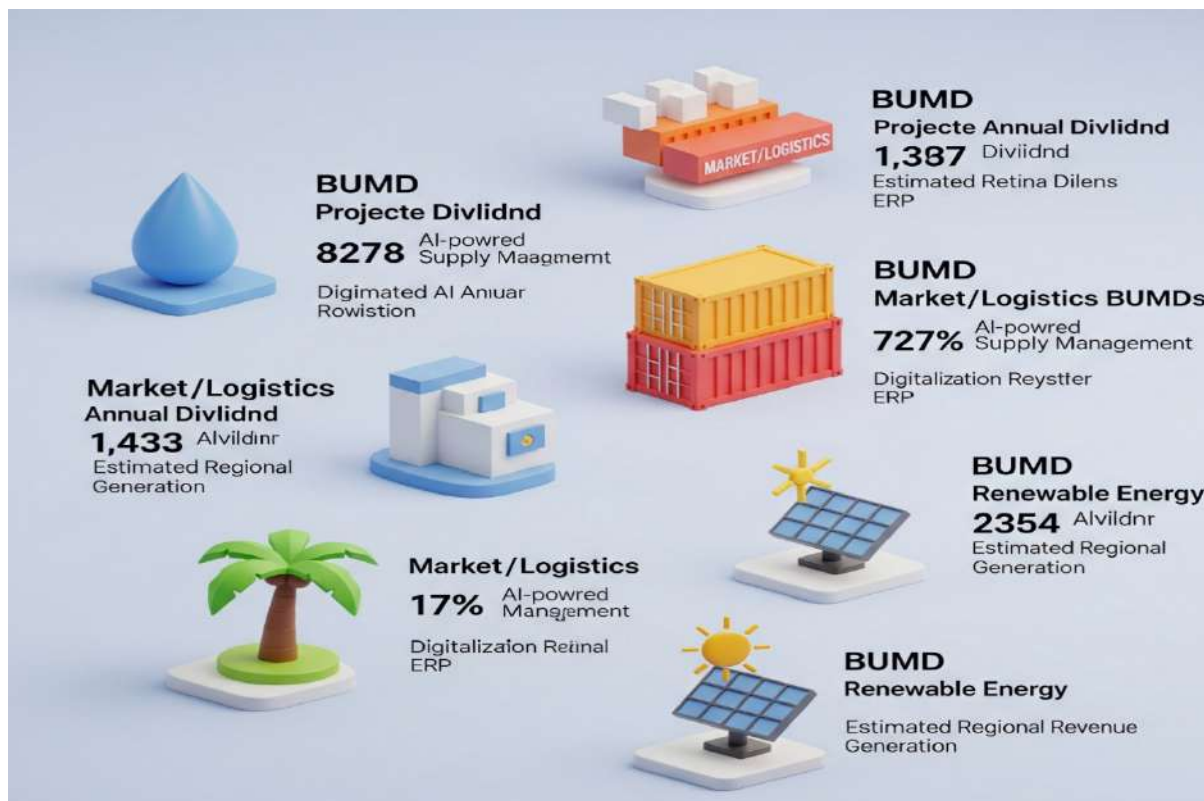
- Seluruh layanan publik yang dikelola BUMD (air minum, pasar, logistik, pertanian, rumah potong, wisata, dll.) akan menggunakan sistem **QRIS atau VA**, sehingga PAD dapat tercatat otomatis.
- BUMD juga dapat diberi kewenangan mengelola retribusi digital yang langsung masuk kas daerah dengan bagi hasil tertentu.

Contoh Implementasi di Kabupaten Pesisir Selatan

BUMD	Sektor	Target Dividen Tahunan	Sistem Digitalisasi	Potensi PAD
PDAM Tirta Langkisau	Air Minum	10% dari laba bersih	Dashboard pelanggan, smart meter, QRIS bayar tagihan	Rp 1–2 miliar
BUMD Pasar & Logistik (<i>rencana 2026</i>)	Pasar tradisional, logistik pangan	5% dari pendapatan bersih	QRIS kios, sistem sewa digital, e-retribusi	Rp 2–3 miliar
BUMD Pariwisata (<i>rencana 2026–2027</i>)	Kawasan Wisata Pantai & Mandeh	Rp 1 miliar dividen	Tiket QRIS, layanan digital AR tour, tracking pengunjung	Rp 3–4 miliar
BUMD Energi Terbarukan (<i>pilot 2027</i>)	Panel surya, pembangkit mikrohidro	PMD bergantung pada rasio laba	Sistem monitoring konsumsi & pembayaran listrik nagari	Rp 500 juta–1 miliar

Dampak Strategis

1. **Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD**, bukan hanya sebagai penyerap PMD.
2. **Mendorong efisiensi, inovasi, dan digitalisasi manajemen BUMD** yang selama ini masih konvensional.
3. **Menciptakan mekanisme akuntabilitas fiskal yang jelas**, karena kinerja BUMD terpantau harian dan bukan hanya saat audit tahunan.
4. **Mendekatkan BUMD pada ekosistem ekonomi digital daerah**, terintegrasi dengan QRIS, dashboard PAD, dan sistem pelayanan publik.



2.f. Interkoneksi Sistem Pembayaran PAD Antar-OPD dan Nagari

Salah satu tantangan dalam optimalisasi penerimaan PAD di tingkat daerah adalah **minimnya keterpaduan data dan sistem antar-OPD serta antar-pemerintahan nagari**. Akibatnya, terjadi tumpang tindih informasi, data tidak sinkron, dan banyak potensi PAD di tingkat nagari yang tidak terintegrasi dengan sistem kabupaten. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendorong percepatan pembangunan **sistem interkoneksi pembayaran PAD antar-OPD dan antar-nagari**, dalam satu platform digital yang terpadu dan terpantau secara real-time.

Dengan interkoneksi ini, setiap retribusi yang dipungut di lapangan, baik oleh dinas teknis maupun nagari, akan langsung tercatat dalam dashboard kabupaten, dan dapat dianalisis kinerjanya berdasarkan wilayah, jenis pungutan, dan waktu. Sistem ini menciptakan **fiskal governance yang transparan, terhubung, dan kolaboratif**, di mana seluruh pelaksana di lapangan menggunakan satu kanal pembayaran (QRIS/VA) dan satu sistem pelaporan. Interkoneksi ini juga membuka peluang untuk menata kembali distribusi fiskal antar-wilayah melalui skema *Transfer Fiskal Berbasis Kinerja* (TFBK), di mana nagari yang aktif menyettor penerimaan dan melakukan pelaporan digital mendapatkan reward berupa tambahan dana insentif atau akses prioritas program.

Strategi Implementasi Interkoneksi Sistem Pembayaran

1. Pengembangan Platform Pembayaran Terintegrasi

- Pembangunan sistem digital (web-based) yang menghubungkan pembayaran QRIS, VA, dan e-Retribusi dari seluruh OPD dan nagari ke satu **dashboard induk PAD kabupaten**.
- Setiap OPD dan nagari memiliki **akses role-based** untuk input, pantau, dan unduh data retribusi masing-masing.

2. Penetapan QRIS Nagari dan Subrekening OPD

- Setiap nagari difasilitasi memiliki minimal **2-5 titik QRIS**: untuk pasar, BUMNag, warung sehat, dan TPI kecil.
- OPD teknis juga mengelola QRIS masing-masing (misalnya: Dinas Perdagangan untuk pasar, DLH untuk sampah, Perikanan untuk TPI).

3. Pelatihan dan Pendampingan Operator Nagari & OPD

- Pelatihan teknis penggunaan QRIS, pelaporan digital, dan pelacakan transaksi berbasis web dilakukan bagi sekretaris nagari dan bendahara OPD.
- Setiap nagari diberi template laporan transaksi harian/mingguan dan sistem alert (jika titik QRIS tidak aktif >3 hari).

4. Sistem Validasi dan Audit Digital Terintegrasi

- Inspektorat dan BPKAD melakukan audit silang antara data sistem QRIS dan laporan nagari/OPD.
- Jika ada ketidaksesuaian nilai setoran dan transaksi, sistem memberi peringatan otomatis untuk ditindaklanjuti.

5. Skema Transfer Fiskal Berbasis Kinerja (TFBK)

- Nagari dengan kinerja PAD digital baik (aktif QRIS, tepat pelaporan, rasio peningkatan tinggi) diberi insentif APBD.
- Sebaliknya, nagari yang stagnan akan dilakukan review pembinaan, dan alokasi bisa ditahan sesuai PMK 24/2024.

Contoh Operasional Interkoneksi PAD

Wilayah	Jenis PAD	Terkoneksi Dengan	Jalur Pembayaran	Contoh Output
Nagari Kambang	Retribusi pasar & parkir	Dinas Perdagangan	QRIS Nagari → Dashboard OPD & Bapenda	Realisasi harian muncul otomatis
Nagari Surantih	Retribusi TPI & hasil laut	Dinas Perikanan	QRIS TPI & VA BUMNag	Semua transaksi terekam real-time
Nagari IV Jurai	Warung sehat & pupuk bersubsidi	DLH, Dinas Pertanian	QRIS dan sistem pupuk digital	Monitoring penggunaan subsidi & kontribusi PAD
Dinas Pariwisata	Tiket event dan sewa venue	Bapenda, Kominfo	QRIS event → terintegrasi dengan promosi digital	Rekap pengunjung, retribusi, hingga sponsor terkumpul otomatis

Dampak Strategis

1. **Peningkatan efisiensi fiskal lintas unit kerja**, karena data PAD tidak lagi tersebar di sistem terpisah.
2. **Transparansi dan kecepatan pelaporan meningkat**, karena semua transaksi terhubung dan terdigitalisasi.
3. **Penguatan fiskal nagari sebagai simpul PAD baru**, tidak hanya sebagai pelaksana pembangunan tetapi juga kontributor penerimaan.
4. **Peningkatan kepercayaan publik**, karena data transaksi dan kontribusi bisa dipantau dan dianalisis oleh semua pemangku kepentingan.

2.g. Insentif Berbasis Kinerja Digital untuk OPD dan Nagari

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif, inovatif, dan berorientasi hasil, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengembangkan **skema insentif berbasis kinerja digital** kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah nagari. Insentif ini tidak lagi ditentukan berdasarkan persepsi administratif atau pemerataan, melainkan dihitung secara objektif melalui indikator kinerja yang diukur secara real-time dalam **dashboard pendapatan daerah terintegrasi**.

Dalam konteks digitalisasi PAD, insentif menjadi **alat fiskal yang memotivasi perubahan perilaku birokrasi**, mendorong percepatan layanan digital, serta meningkatkan kepatuhan dan kreativitas dalam menggali potensi penerimaan. Dengan kata lain, insentif fiskal bukan sekadar hadiah, tetapi bagian dari *performance-based budgeting* yang mengaitkan hasil konkret (seperti capaian target retribusi, jumlah QRIS aktif, peningkatan transaksi digital, dan efisiensi pungutan) dengan dukungan fiskal tambahan. Pendekatan ini sejalan dengan praktik terbaik dari berbagai daerah yang berhasil menurunkan ketergantungan pada transfer pusat dengan mendorong inovasi dari level OPD hingga nagari.

Strategi Implementasi Insentif Berbasis Kinerja Digital

1. Penetapan Indikator Kinerja Berbasis Digital

- Indikator OPD:
 - Persentase realisasi PAD digital terhadap target
 - Rasio efisiensi pungutan digital (biaya pemungutan vs hasil)
 - Jumlah inovasi layanan berbasis QRIS/e-payment
- Indikator Nagari:
 - Jumlah titik QRIS aktif dan volume transaksi
 - Pelaporan digital mingguan/bulanan tepat waktu
 - Kontribusi terhadap sektor UMKM dan e-retribusi lokal

2. Integrasi Evaluasi Kinerja ke Dashboard PAD

- Semua indikator ditarik langsung dari sistem dashboard, tanpa laporan manual.

- Sistem memberi peringkat dan skor otomatis per triwulan untuk OPD dan nagari.

3. Skema Insentif Fiskal Progresif

- Nagari dan OPD dengan skor kinerja tinggi akan menerima:
 - Tambahan dana operasional
 - Prioritas pelatihan atau program
 - Promosi ASN penggerak
- Skor menengah tetap diberi insentif, tapi bersyarat (perbaikan kinerja)
- Skor rendah menjadi prioritas pembinaan teknis dan bisa disusul sanksi administratif

4. Pelibatan Inspektorat dan BPKAD

- Inspektorat mengaudit keabsahan data sistem, dan BPKAD menyiapkan blok alokasi insentif pada APBD perubahan atau tahun berjalan.

Contoh Penerapan di Pesisir Selatan

Subjek	Capaian	Insentif Diberikan
Dinas Perikanan	Realisasi QRIS TPI >120% target, efisiensi pungutan tinggi	Tambahan Rp 150 juta dana program & promosi nasional
Nagari Painan Selatan	QRIS aktif 8 lokasi, transaksi naik 35%, laporan tepat waktu	Insentif Rp 100 juta melalui Dana Insentif Nagari
Dinas Koperasi & UMKM	Melatih 1.000 UMKM QRIS-ready, integrasi laporan omzet ke pajak mikro	Pagu belanja UMKM dinaikkan 20% tahun berikutnya
Nagari Lunang	Kinerja rendah, laporan tidak aktif, QRIS pasif > 60 hari	Rekomendasi pembinaan & evaluasi pengurangan insentif nagari

Dampak Strategis

1. Mendorong transformasi budaya birokrasi dari *input-oriented* menjadi *outcome-oriented*, berbasis hasil digital.
2. Menumbuhkan kompetisi positif antar-OPD dan nagari dalam mendukung PAD daerah.
3. Memperkuat rasa kepemilikan fiskal di level akar rumput, karena hasil kerja digital langsung dihargai.
4. Membuka ruang penganggaran fleksibel dan adil, karena insentif dialokasikan sesuai kontribusi nyata.

2.h. Audit Digital dan Penegakan Kepatuhan Fiskal Berbasis Teknologi

Seiring transformasi digital dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mekanisme pengawasan dan audit juga harus beradaptasi dengan pendekatan baru yang lebih cepat, presisi, dan berbasis bukti elektronik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan menerapkan **sistem audit digital dan penegakan kepatuhan fiskal berbasis teknologi**, yang memungkinkan pengawasan transaksi pajak dan retribusi dilakukan secara real-time, transparan, dan terintegrasi antar lembaga pengelola keuangan daerah.

Audit digital di sini tidak lagi bergantung pada laporan manual atau inspeksi fisik semata, tetapi dilakukan melalui **analisis data transaksi QRIS, Virtual Account, e-Retribusi, dan sistem pelayanan digital lainnya**. Dengan dukungan teknologi seperti AI audit tools, dashboard anomaly detection, serta sistem integrasi antar-OPD dan nagari, seluruh proses pelaporan dan pengawasan pendapatan daerah menjadi jauh lebih efisien dan akurat. Sistem ini juga akan mendeteksi potensi penyimpangan, manipulasi, keterlambatan setor, atau ketidakcocokan antara potensi dan realisasi penerimaan di titik-titik PAD. Penegakan kepatuhan dilakukan melalui pendekatan insentif–sanksi digital serta mekanisme pengawasan kolaboratif bersama Inspektorat Daerah, BPKP, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Strategi Implementasi Audit Digital dan Penegakan Kepatuhan

1. Integrasi Sistem Transaksi ke Dashboard Audit

- Semua data dari QRIS, e-Parkir, e-Retribusi, dan sistem pelayanan digital diintegrasikan ke satu **sistem audit elektronik (e-Audit PAD)**.
- Dashboard ini dimiliki oleh Bapenda dan dapat diakses terbatas oleh Inspektorat dan BPKP.

2. Penetapan Parameter Audit Digital

- Parameter meliputi:
 - Waktu transaksi vs waktu setoran
 - Volume transaksi vs jumlah retribusi tercatat
 - Jumlah QRIS aktif vs QRIS tidak digunakan >3 hari
 - Perbandingan realisasi PAD vs baseline historis

3. Deteksi Anomali dan Alert Otomatis

- Sistem memberi peringatan otomatis jika terjadi:
 - Penurunan drastis transaksi (>30%)
 - Transaksi nol dalam 7 hari di lokasi PAD aktif
 - Keterlambatan setoran lebih dari 3 hari kerja
- Notifikasi dikirim ke OPD terkait dan Inspektorat untuk segera diverifikasi

4. Mekanisme Tindak Lanjut

- Audit digital bersifat **triwulanan**, dan hasilnya dimasukkan dalam rapat koordinasi fiskal.
- Unit kerja dengan potensi masalah akan dikunjungi untuk verifikasi fisik atau diwajibkan perbaikan sistem.

5. Penegakan Kepatuhan dan Etika Fiskal

- ASN dan OPD yang terbukti lalai atau memanipulasi laporan akan direkomendasikan sanksi sesuai ketentuan kepegawaian.
- Laporan audit digital digunakan sebagai dasar perumusan insentif kinerja, revisi anggaran, dan rotasi jabatan.

Contoh Aplikatif Audit Digital

Lokasi PAD	Jenis Audit	Hasil Deteksi	Tindak Lanjut
TPI Kambang	Volume transaksi vs setoran	Selisih 27% dari baseline 3 bulan	Audit lapangan oleh Inspektorat
Pasar Painan	QRIS non-aktif 10 hari	Tidak ada transaksi digital terdeteksi	QRIS diganti, pelatihan ulang operator
Kawasan Wisata Mandeh	Laporan retribusi nol	QRIS masih aktif, tapi tidak digunakan	Dinas Pariwisata dipanggil untuk klarifikasi
BUMD Air Minum	Laporan dividen tidak sesuai dashboard	Laba bersih tercatat lebih tinggi dari laporan RUPS	BPKAD dan BPKP audit ulang laporan BUMD

Dampak Strategis

1. Transparansi fiskal meningkat signifikan, karena semua transaksi bisa ditelusuri dan dibandingkan otomatis.
2. Efisiensi pengawasan meningkat, Inspektorat dan BPKP tidak perlu audit manual ke semua titik PAD.
3. Tertib kepatuhan fiskal ASN dan OPD meningkat, karena diawasi dan dinilai berbasis data, bukan opini administratif.
4. Budaya etika fiskal terbentuk, karena publikasi kinerja dan kepatuhan dilakukan secara terstruktur dan digital.

2.i. Pengembangan Ekosistem QRIS ke Sektor Non-Tradisional

Seiring dengan berkembangnya teknologi keuangan digital, penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) tidak hanya terbatas pada sektor formal dan layanan pemerintah, tetapi juga telah merambah ke sektor-sektor non-tradisional seperti usaha rumahan, warung kelontong, perikanan darat, kelompok tani, koperasi nagari, dan unit layanan masyarakat berbasis komunitas. Dalam konteks Kabupaten Pesisir Selatan, di mana sebagian besar pelaku ekonomi berada pada sektor informal dan tersebar di nagari-nagari terpencil, **pengembangan ekosistem QRIS ke sektor non-tradisional merupakan langkah strategis** untuk memperluas basis penerimaan PAD, mempercepat inklusi fiskal, dan memperkuat kemandirian ekonomi lokal.

Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah dapat mendorong agar setiap aktivitas ekonomi masyarakat—termasuk yang dilakukan di luar skema formal—tetap tercatat dalam sistem fiskal digital, sehingga memudahkan penghitungan retribusi, penerimaan pajak mikro, hingga penyaluran subsidi berbasis data riil. Ekosistem QRIS yang menyentuh sektor non-tradisional juga akan menjadi pendorong literasi keuangan digital di akar rumput, memperkuat relasi antara pemerintah dan pelaku ekonomi kecil, serta menciptakan budaya transaksi nontunai yang aman, murah, dan transparan.

Strategi Implementasi Ekspansi QRIS ke Sektor Non-Tradisional

1. Identifikasi Sektor Potensial Non-Tradisional

- Sektor yang disasar meliputi:
 - Warung rumah tangga & kantin sekolah
 - Kelompok tani dan peternak skala kecil
 - Nelayan tambak dan kolam air tawar
 - Sentra produk olahan nagari (keripik, madu, rendang)
 - Koperasi Nagari dan usaha rumah ibadah (pelayanan sosial)

- Jasa angkutan nagari dan parkir komunitas

2. Kolaborasi dengan BI, Perbankan, dan Koperasi

- Penyediaan QRIS bagi pelaku sektor ini dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Nagari, BRI, BNI, dan Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan pendampingan teknis dari Dinas Koperasi dan DPMN.

3. Penyusunan “QRIS Mandiri Nagari”

- Setiap nagari diberi target minimal **20 pelaku usaha non-tradisional** memiliki QRIS aktif dan terhubung ke dashboard PAD.
- QRIS ini juga disesuaikan dengan branding khas nagari, seperti: *QRIS Lunang Sejahtera*, *QRIS Kambang Maju*.

4. Insentif dan Promosi bagi Pelaku Awal

- UMKM, warung, atau petani yang menggunakan QRIS aktif dan melaporkan omzet bulanan akan mendapat insentif promosi dari pemda, termasuk pelatihan packaging, sertifikasi halal, dan pemasaran digital.

5. Integrasi Transaksi QRIS dengan Pelaporan PAD Mikro

- Semua transaksi QRIS disambungkan ke sistem rekap omzet dan digunakan sebagai basis perhitungan pajak/retribusi mikro secara otomatis, tanpa perlu pelaporan manual.

Contoh Penerapan di Lapangan

Sektor	Lokasi	Bentuk QRIS	Output ke PAD
Warung UMKM	Nagari Surantih	QRIS untuk belanja harian	Data omzet jadi basis pajak mikro UMKM
Petani hortikultura	Nagari Amping Parak	QRIS untuk jual sayuran ke koperasi	Data transaksi disetor ke sistem pajak hasil tani
Koperasi Nagari	Nagari Balai Selasa	QRIS untuk tabungan & pinjaman anggota	Kontribusi retribusi jasa keuangan lokal
Tambak ikan	Nagari Air Haji	QRIS untuk penjualan ikan	Retribusi TPI dan logistik berbasis transaksi
Jasa antar nagari	Lunang & Silaut	QRIS untuk ojek/angkutan kecil	Retribusi jasa dan perizinan dikaitkan otomatis

Dampak Strategis

1. Meningkatkan inklusi fiskal masyarakat informal, menjadikan mereka bagian dari sistem pajak daerah dengan pendekatan insentif.
2. Menciptakan sistem PAD mikro yang otomatis dan efisien, tanpa menambah beban administrasi warga.
3. Menumbuhkan budaya transparansi fiskal dari bawah, karena pelaku ekonomi mulai terbiasa dengan sistem pencatatan transaksi digital.
4. Memperkuat data dasar ekonomi nagari, yang berguna untuk perencanaan program pembangunan, subsidi, dan promosi.

2.j. Sistem Reward QRIS Nagari dan UMKM untuk Meningkatkan Literasi Digital Fiskal

Transformasi digital dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya akan berhasil jika diiringi dengan literasi digital fiskal yang tinggi di kalangan pelaku usaha dan masyarakat nagari. Salah satu pendekatan efektif untuk mempercepat proses ini adalah dengan membangun sistem reward atau penghargaan fiskal berbasis QRIS, yang diberikan kepada nagari dan pelaku usaha kecil-menengah (UMKM) yang aktif menggunakan sistem pembayaran digital secara konsisten dan transparan.

Sistem ini tidak hanya mendorong peningkatan jumlah pengguna QRIS, tetapi juga menjadi insentif positif untuk memupuk budaya kepatuhan pajak dan pencatatan transaksi yang baik. Dengan menggunakan QRIS, UMKM akan terbiasa mencatat omzet, memahami konsep pemungutan pajak, dan merasa dihargai atas kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Di sisi lain, nagari yang berhasil mendorong adopsi QRIS di lingkungannya akan memperoleh insentif fiskal dan pelatihan tambahan untuk memperkuat kapasitas keuangannya.

Pendekatan ini sejalan dengan praktik di berbagai kota seperti Surakarta, Denpasar, dan Sumedang, di mana program “*QRIS Champions*” telah terbukti meningkatkan penerimaan pajak mikro sekaligus mempercepat adopsi digitalisasi keuangan di sektor informal. Di Pesisir Selatan, sistem ini akan diadaptasi dalam bentuk “**QRIS Award Nagari**” dan “**UMKM Digital Champions**” sebagai bagian dari strategi membangun ekosistem fiskal inklusif dan modern dari bawah.

Strategi Implementasi Sistem Reward QRIS Nagari & UMKM

1. Penetapan Indikator Penilaian

- Untuk Nagari:

- Jumlah pelaku usaha/rumah tangga dengan QRIS aktif
- Volume transaksi QRIS per bulan
- Pelaporan transaksi QRIS tepat waktu
- Untuk **UMKM**:
 - Peningkatan omzet melalui QRIS (dibandingkan baseline)
 - Kepatuhan dalam pelaporan omzet & partisipasi pelatihan digital
 - Sertifikasi halal, kemasan, dan pencatatan berbasis QRIS

2. Pengembangan Dashboard Pemantauan QRIS UMKM

- Sistem memantau secara real-time: lokasi, omzet QRIS, serta partisipasi UMKM dalam transaksi digital.
- Laporan bulanan digunakan sebagai dasar penilaian pemberian reward.

3. Mekanisme Reward Berbasis Kinerja

- Untuk nagari:
 - Tambahan dana insentif nagari (maksimal Rp 100 juta/nagari/tahun)
 - Prioritas dalam program koperasi, BUMNag, dan pelatihan keuangan digital
- Untuk UMKM:
 - Sertifikasi QRIS Champion dari Bupati
 - Pelatihan gratis (branding, legalitas, ekspor), subsidi booth pada pameran daerah
 - Peluang dipromosikan dalam SuperApp UMKM Pessel

4. Penyelenggaraan “QRIS Award” Tahunan

- Diselenggarakan oleh Pemkab bekerja sama dengan BI dan perbankan mitra.
- Diumumkan 10 Nagari QRIS Terbaik dan 50 UMKM QRIS Paling Aktif.

Contoh Aplikasi di Pesisir Selatan

Subjek	Capaian	Reward
Nagari Salido	75 pelaku usaha QRIS aktif, transaksi naik 40%	Insentif nagari Rp 100 juta dan pelatihan manajemen fiskal nagari
UMKM “Sambal Mandeh”	Transaksi QRIS bulanan >Rp 20 juta, pencatatan terintegrasi	Sertifikat UMKM Digital, subsidi booth & pelatihan ekspor
Nagari Surantih	3 TPI, 1 pasar, dan 2 warung sehat terhubung QRIS	Akses prioritas ke program nagari digital dan koperasi modern
UMKM “Kerupuk Balado Minang”	Omzet tercatat QRIS naik 200% dari tahun sebelumnya	Promosi produk dalam event MICE Kabupaten & platform e-commerce lokal

Dampak Strategis

1. Peningkatan literasi fiskal masyarakat dari bawah ke atas, mempercepat perubahan perilaku keuangan yang positif.
2. Peningkatan kualitas data fiskal, karena transaksi digital terekam dan dapat dianalisis untuk penetapan kebijakan pajak mikro.
3. Pembentukan budaya fiskal digital nagari, yang menjadi basis bagi pencapaian target kemandirian fiskal 50% di tahun 2029.
4. Penguatan ekosistem UMKM lokal, karena dukungan promosi dan legalitas berbasis QRIS.





BAB III

MONETISASI ASET DAERAH (BERWUJUD DAN TAK BERWUJUD)



BAB III

MONETISASI ASET DAERAH (BERWUJUD DAN TAK BERWUJUD)

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi besar dari sisi kepemilikan aset daerah, baik dalam bentuk aset berwujud maupun aset tak berwujud. Aset berwujud meliputi ratusan hektar lahan tidur milik pemerintah di sepanjang kawasan Lunang, Silaut, dan Balai Selasa yang hingga kini belum dimanfaatkan secara ekonomi. Selain itu, terdapat sejumlah bangunan bekas kantor dinas di Painan dan wilayah pesisir lainnya yang saat ini hanya digunakan secara parsial atau bahkan kosong, namun terletak di lokasi strategis yang potensial untuk disewakan sebagai co-working space, inkubator bisnis, atau pusat pelatihan. Beberapa pasar tradisional semiaktif, seperti Pasar Kambang dan Pasar Tapan, juga memiliki nilai komersial tinggi jika dikelola dengan skema modernisasi dan pemanfaatan digital. Terminal lama di Balai Selasa, yang saat ini tidak berfungsi optimal, dapat dikembangkan sebagai pusat logistik koperasi atau shelter transportasi wisata. Selain itu, fasilitas wisata seperti kawasan Pantai Carocok, Bukit Langkisau, dan Pulau Cingkuak menyimpan peluang besar untuk dikembangkan melalui skema kerja sama operasional (KSO) atau pemanfaatan ruang promosi digital.

Sementara itu, aset tak berwujud yang dimiliki oleh daerah juga sangat kaya namun belum digarap secara sistematis. Ini termasuk branding destinasi wisata unggulan seperti *Carocok Paradise*, *Mandeh Adventure*, dan *Lunang Mangrove Trail*, yang berpotensi dimonetisasi melalui lisensi merek, penjualan hak siar, atau kemitraan komersial dengan pelaku pariwisata. Festival budaya seperti Festival Pesona Mandeh dan Festival Pantai Carocok yang rutin digelar dapat dijadikan sumber PAD dari hak penyelenggaraan, sponsorship, dan royalti digital. Selain itu, produk khas daerah seperti rendang laut, kerupuk gurita, madu hutan, dan batik Lumpo dapat diangkat sebagai aset komersial berbasis lisensi merek dagang resmi milik Pemda. Tidak kalah penting, kekayaan digital berupa konten promosi video, peta interaktif pariwisata, data spasial nagari, dan aset visual kreatif lainnya bisa dijadikan sumber PAD melalui mekanisme NFT, monetisasi platform digital, atau kerja sama lisensi dengan startup teknologi.

Melalui pendekatan monetisasi yang menyeluruh, bukan hanya nilai ekonomi dari aset-aset ini yang akan dioptimalkan, tetapi juga nilai strategisnya dalam membentuk ekosistem fiskal yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, pemanfaatan aset daerah bukan hanya sebagai pelengkap pembangunan, melainkan sebagai tulang punggung baru penerimaan daerah yang akan memperkuat langkah Pesisir Selatan dalam mencapai kemandirian fiskal 50% pada tahun 2029.

Berikut adalah penyajian detail untuk **Subbab 3.a – Monetisasi Aset Berwujud Melalui Pola Inbreng dan Sewa Komersial**, bagian dari *Bab III: Monetisasi Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan*, dengan format **point dan alinea panjang**, disertai **contoh operasional** di lapangan:

3.a. Monetisasi Aset Berwujud Melalui Pola Inbreng dan Sewa Komersial

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyadari bahwa aset berwujud seperti tanah, bangunan, dan infrastruktur publik yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi sumber PAD baru yang signifikan jika dimonetisasi secara cerdas dan legal. Selama ini, sebagian besar aset tersebut hanya tercatat dalam neraca tanpa menghasilkan kontribusi finansial nyata, bahkan menjadi beban biaya operasional dan pemeliharaan. Oleh karena itu, langkah strategis yang diambil adalah mengubah paradigma pengelolaan aset dari pasif administratif menjadi aktif produktif, melalui pola kerja sama pemanfaatan aset seperti sewa komersial, kerja sama operasional (KSO), dan inbreng ke BUMD atau koperasi lokal.

1. Identifikasi dan Valuasi Aset Idle secara Digital

Langkah pertama adalah melakukan **audit menyeluruh terhadap aset idle atau semiaktif** di seluruh wilayah kabupaten, khususnya aset yang berada di lokasi strategis seperti pusat kecamatan, kawasan wisata, atau sentra ekonomi nagari.

Proses identifikasi ini harus berbasis sistem informasi digital dan pemetaan geospasial (GIS), sehingga setiap bidang tanah, gedung, dan fasilitas bisa diklasifikasi secara visual dan dinilai berdasarkan potensi ekonominya.

Selanjutnya, dilakukan **penilaian ekonomi (economic valuation)** oleh tim appraisal independen atau tim teknis daerah atau dengan bantuan KPKNL Padang untuk menentukan harga sewa wajar atau nilai inbreng aset dalam perjanjian kerja sama.

Contoh:

- **Gedung eks Dinas di Painan** yang kosong sejak 2019, jika disewakan untuk inkubator bisnis UMKM berbasis digital, berpotensi menghasilkan PAD Rp 350 juta per tahun.

- **Lahan kosong 1,5 hektar di Lunang Timur** yang selama ini tak termanfaatkan, dapat dimasukkan sebagai inbreng dalam BUMD pangan untuk mendukung sistem logistik beras murah dan peternakan rakyat.

2. Skema Sewa Komersial untuk Aset Umum

Aset milik pemda seperti pasar tradisional, ruko, kios, tempat parkir, dan aula publik dapat dimonetisasi melalui **sewa komersial terbuka dan berbasis digital**. Model ini memungkinkan pemerintah mendapatkan pendapatan rutin dari penyewa, sambil menjaga transparansi melalui sistem lelang elektronik atau QRIS sebagai metode pembayaran. Sewa dapat dibedakan berdasarkan kelas lokasi dan kapasitas, serta diikat dalam kontrak multi-tahun agar memberikan kepastian fiskal bagi daerah.

Contoh:

- **Pasar semiaktif di Kambang** dapat ditata ulang dan disewakan ke koperasi pedagang menggunakan sistem QRIS. Jika terdapat 50 kios aktif dengan tarif sewa Rp 500 ribu/bulan, potensi PAD yang masuk sekitar Rp 300 juta per tahun.



- **Aula eks kantor camat di Air Haji**, jika disewakan sebagai ruang pelatihan swasta atau sekolah informal, dapat menghasilkan Rp 100 juta per tahun.



3. Kerja Sama Operasional (KSO) dan Bagi Hasil

Untuk aset seperti **terminal tua**, **lahan wisata**, atau **gudang logistik**, skema terbaik adalah melalui **kerja sama operasional (KSO)** antara Pemda dengan pihak ketiga, baik BUMD, koperasi, atau investor lokal. Skema ini memungkinkan pihak swasta mengelola dan mengembangkan aset tanpa mengalihkan kepemilikan, namun dengan kewajiban berbagi keuntungan atau membayar royalti tetap ke Pemda.

Contoh:

- **Terminal lama Balai Selasa**, yang saat ini tidak dimanfaatkan, dapat dijadikan **sentra logistik koperasi** dengan sistem KSO antara Dinas Perhubungan dan Koperasi Merah Putih. Potensi bagi hasil minimal 20% dari pendapatan logistik/titipan harian.

4. Inbreng Aset dalam BUMD dan BLUD

Aset yang memiliki nilai strategis tinggi namun membutuhkan pengelolaan profesional—seperti **tanah untuk gudang beras**, **rumah potong hewan**, atau **showroom produk unggulan daerah**—dapat dijadikan penyertaan modal (inbreng) dalam struktur BUMD. Hal ini sesuai dengan prinsip good corporate governance (GCG) dan memungkinkan aset berkembang secara korporasi tanpa harus dijual. Pemda tetap memiliki kendali melalui saham kepemilikan.

Contoh:

- **Lahan 2 hektar di Batang Kapas** dapat dijadikan inbreng dalam BUMD pertanian untuk pembangunan pabrik pupuk organik. Dengan target keuntungan tahunan Rp 5 miliar, dividen 10% ke Pemda akan menyumbang Rp 500 juta ke PAD.

5. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Pengelolaan Aset

Untuk mendukung monetisasi secara legal dan akuntabel, Pemda perlu memperbaharui regulasi daerah (Perda/Perbup) tentang pemanfaatan aset, termasuk sistem lelang terbuka, penetapan tarif sewa minimum, serta mekanisme audit dan pelaporan. Selain itu, perlu dibentuk **Satuan Tugas Monetisasi Aset (Satgas Aset)** lintas OPD yang fokus pada analisis, pengembangan skema kerja sama, dan pengawasan pemanfaatan aset.

Dampak Strategis Monetisasi Aset Berwujud

- a. Mengurangi beban APBD terhadap aset tidak produktif yang selama ini memakan biaya pemeliharaan.

- b. Menambah PAD secara rutin dan berkelanjutan dari hasil sewa, bagi hasil, atau dividen.
- c. Menumbuhkan ekonomi lokal melalui aktivasi aset strategis di nagari.
- d. Meningkatkan efisiensi fiskal dan memperkuat profesionalisme pengelolaan barang milik daerah (BMD).

3.b. Monetisasi Aset Tak Berwujud di Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan menyimpan potensi kekayaan tak berwujud yang sangat besar namun belum tergarap sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi tersebut mencakup nama destinasi wisata yang sudah terkenal secara nasional, festival budaya tahunan, produk khas kuliner dan kerajinan, serta konten digital promosi dan data spasial milik pemerintah. Selama ini, berbagai pihak—termasuk biro perjalanan, pelaku UMKM, media sosial, bahkan instansi nonpemerintah—menggunakan nama-nama dan simbol-simbol budaya lokal tanpa lisensi, tanpa royalti, dan tanpa kontribusi balik ke daerah.

Dalam menghadapi tantangan fiskal, monetisasi aset tak berwujud merupakan strategi efisien dan berkelanjutan: tidak membutuhkan infrastruktur fisik tambahan, tidak membebani APBD, tetapi mampu mengubah kekayaan budaya, digital, dan sosial menjadi sumber pendapatan daerah yang sah dan legal. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat memulai langkah ini melalui sistem sertifikasi, lisensi komersial, penjualan data, dan royalti digital.

1. Lisensi Nama Destinasi Wisata Populer

Langkah Implementasi:

- a. Pemda mendaftarkan nama "**Pantai Carocok**", "**Mandeh Paradise**", dan "**Pulau Cingkuak**" sebagai **merek dagang kolektif** di Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Menyusun **SK Bupati** yang mewajibkan pelaku usaha wisata, biro perjalanan, penginapan, dan UMKM oleh-oleh untuk **mendapat lisensi resmi** jika menggunakan nama-nama tersebut dalam promosi.
- c. Lisensi diberikan dalam bentuk **izin tahunan berbayar**, tergantung skala usaha dan jenis penggunaan.

Contoh Nyata di Pessel:

- a. Travel agent di Padang menjual "Paket Wisata Mandeh Paradise 3 Hari" → wajib bayar lisensi **Rp 5 juta/tahun**.
- b. Hotel di Carocok bernama "Carocok Seaview" → izin branding **Rp 2 juta/tahun**.
- c. UMKM makanan ringan memakai label "Rendang Laut Carocok" → lisensi produk **Rp 1 juta/tahun**.

Target Minimal PAD Tahunan:

50 pengguna lisensi × rata-rata Rp 2 juta = **Rp 100 juta**



Lisensi Nama Destinasi Wisata (Contoh: Mandeh Paradise)

2. Royalti Festival Budaya dan Hak Siar

Langkah Implementasi:

- a. Pemda menetapkan **hak kekayaan atas nama dan konten festival budaya tahunan** seperti:
 - *Festival Pesona Mandeh*

- Festival Pantai Carocok
- Festival Rendang Laut
- b. Menetapkan ketentuan: setiap sponsor, media peliput, atau penyelenggara yang memakai nama dan dokumentasi festival wajib membayar **royalti atau sponsorship fee**.
- c. Konten video dan foto festival dapat dijual ke YouTube, TV lokal, atau dijadikan **NFT seni budaya**.

Contoh Nyata di Pessel:

- a. Festival Pantai Carocok tahun 2024 disponsori oleh Bank Nagari, PLN, dan produsen air mineral → masing-masing bayar Rp 50 juta = total **Rp 150 juta**
- b. TV lokal membeli hak tayang ulang video Festival Pesona Mandeh → royalti **Rp 10 juta**
- c. NFT Tari Piring Nagari Salido dijual di marketplace digital seharga Rp 4 juta → 40% masuk ke PAD.

Target PAD Tahunan:

Sponsorship + hak siar + NFT = **± Rp 200–250 juta**



Sertifikasi Produk Khas dan Branding Resmi (Contoh: Rendang Laut Painan)

3. Sertifikasi Produk Khas dan Branding Resmi

Langkah Implementasi:

- a. Pemda menetapkan daftar produk khas daerah yang dilindungi sebagai **produk resmi daerah**, misalnya:
 - Rendang Laut Painan

- **Kerupuk Gurita Surantih**
- **Madu Hutan Silaut**
- **Kopi Bukit Langkisau**
- **Batik Lumpo**
- b. UMKM atau koperasi yang ingin menggunakan label ini wajib:
 - Memenuhi standar kualitas
 - Mengikuti pelatihan kemasan/pemasaran
 - Membayar **sertifikasi merek dan hak jual**

Contoh Nyata di Pessel:

Produk Lokal	Lokasi Utama	Bentuk Sertifikasi	Jumlah Pelaku	Estimasi PAD
Rendang Laut	Painan, Kambang	Lisensi label “Asli Pessel”	40 UMKM × Rp 1,5 jt	Rp 60 juta
Kerupuk Gurita	Surantih	Sertifikasi branding	20 UMKM × Rp 1 jt	Rp 20 juta
Madu Silaut	Lunang–Silaut	Sertifikasi + promosi digital	10 pelaku × Rp 2 jt	Rp 20 juta
Batik Lumpo	Koto XI Tarusan	Royalti motif & pelatihan	Koperasi lokal	Rp 15 juta

Target PAD Tahunan:

± Rp 115 juta – Rp 130 juta

4. Monetisasi Video Budaya dan NFT Digital

Langkah Implementasi:

- a. Pemda mendokumentasikan konten budaya: tari daerah, festival, kuliner, adat istiadat.
- b. Konten diunggah ke platform YouTube Pemda, TV lokal, dan dijual sebagai **NFT seni digital**.
- c. Hasil penjualan dibagi antara seniman (creator) dan kas daerah (misal: 60% seniman – 40% PAD).

Contoh Nyata:

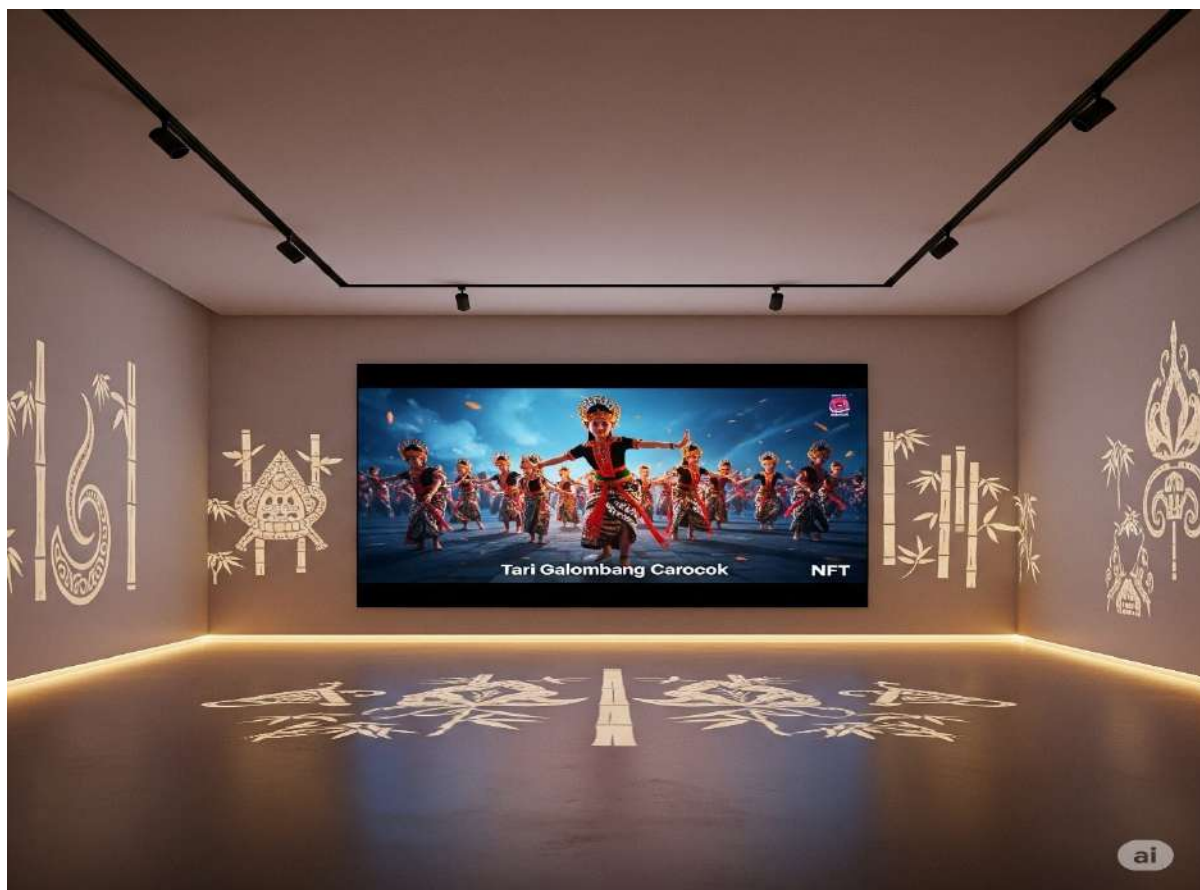
- NFT “Tari Galombang Carocok” → terjual Rp 5 juta → PAD Rp 2 juta
- Video “Mandeh dari Udara” lisensi eksklusif ke platform travel → Rp 10 juta
- Akun YouTube PesselTourism mendapat monetisasi 100.000 views = Rp 3 juta/bulan

Target PAD Tahunan:

Rp 50–75 juta, bertumbuh jika NFT dan channel YouTube aktif



Royalti Festival Budaya dan Hak Siar (Contoh: Festival Pesona Mandeh)



Monetisasi Video Budaya dan NFT Digital (Contoh: NFT Tari Galombang Carocok)

5. Lisensi Data Digital & Peta Spasial Daerah

Langkah Implementasi:

- Pemda melalui Diskominfo menyusun katalog data:
 - Peta 3D kawasan Mandeh
 - Zonasi hutan mangrove Lunang
 - Data spasial objek wisata nagari
- Pemda menjual data ini ke startup wisata, universitas, NGO lingkungan, developer aplikasi.
- Sistem berbasis **lisensi tahunan atau transaksi satu kali**.

Contoh Nyata:

- Startup wisata membeli lisensi peta Mandeh → Rp 25 juta
- Universitas riset lingkungan beli data konservasi Lunang → Rp 15 juta

Target PAD Tahunan:

Rp 30–50 juta

Total Potensi PAD dari Monetisasi Aset Tak Berwujud di Pessel

Sumber PAD	Estimasi Minimum
Lisensi nama destinasi wisata	Rp 100 juta
Royalti festival & konten siar	Rp 200–250 juta
Sertifikasi produk khas daerah	Rp 115–130 juta
NFT & konten digital budaya	Rp 50–75 juta
Lisensi data spasial & peta digital	Rp 30–50 juta
TOTAL POTENSI TAHUNAN	± Rp 500–600 juta

Monetisasi aset tak berwujud bukan hanya alternatif pendapatan daerah, tetapi juga menjadi **cara bermartabat menjaga identitas budaya lokal sambil menghasilkan nilai ekonomi**. Dengan modal budaya, kreativitas, dan dukungan teknologi, Pesisir Selatan dapat menjadi percontohan kabupaten yang **mandiri fiskal berbasis ekonomi tak berwujud**, digital, dan lestari.



Lisensi Data Digital & Peta Spasial Daerah (Contoh: Peta 3D Kawasan Mandeh)

Daftar Kekayaan Tak Berwujud Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kategori Aset	Nama/Deskripsi	Potensi Monetisasi
1	Brand Destinasi Wisata	Pantai Carocok, Mandeh Paradise, Pulau Cingkuak, Bukit Langkisau, Lunang Mangrove Trail	Lisensi nama, penggunaan merek pada produk wisata, biro perjalanan, dan UMKM
2	Festival & Event Budaya	Festival Pesona Mandeh, Festival Pantai Carocok, Festival Rendang Laut, Festival Anak Nagari	Sponsorship event, hak siar media, penjualan merchandise, NFT video event
3	Produk Khas & Identitas Daerah	Rendang Laut Painan, Kerupuk Gurita Surantih, Madu Hutan Silaut, Kopi Bukit Langkisau, Batik Lumbo	Sertifikasi merek lokal, royalti penjualan, pelabelan geografis
4	Konten Budaya Digital	Video Tari Piring, Tari Galombang, video drone Mandeh & Carocok, foto budaya lokal	Penjualan konten digital, NFT, hak lisensi konten YouTube dan platform promosi
5	Data Spasial & Visualisasi	Peta interaktif destinasi wisata, data GIS zonasi hutan dan nagari, arsip budaya digital	Lisensi data ke startup wisata, lembaga riset, developer aplikasi, institusi pendidikan
6	Materi Edukasi & Sertifikasi	Modul pelatihan budaya, kurikulum wisata nagari, pelatihan UMKM halal dan digital	Biaya pelatihan, sertifikasi, kerja sama konten edukasi daring
7	Merek & Logo Pemerintah	Logo resmi Kabupaten Pesisir Selatan, tagline promosi, desain visual pariwisata	Lisensi pemakaian untuk produk promosi, merchandise, sponsor event daerah

3.c. Model Manajemen dan Evaluasi Aset Digital Kabupaten Pesisir Selatan

Seiring meningkatnya ketergantungan pada digitalisasi dalam sistem pemerintahan dan ekonomi, Kabupaten Pesisir Selatan perlu membangun sistem pengelolaan **aset digital dan tak berwujud** yang profesional, sistematis, dan terintegrasi. Aset digital seperti **konten budaya, peta spasial, data pariwisata, hingga merek dan logo destinasi** tidak bisa dikelola secara ad hoc. Diperlukan model manajemen khusus yang mampu menjamin keberlanjutan nilai ekonominya, akuntabilitas pemanfaatannya, dan optimalisasi kontribusinya terhadap PAD.

Model manajemen aset digital ini mencakup empat aspek utama: (1) inventarisasi dan klasifikasi, (2) sistem penyimpanan dan pengamanan, (3) mekanisme lisensi dan monetisasi, serta (4) evaluasi dan pelaporan kinerja fiskalnya. Seluruhnya harus terhubung dalam sistem digital yang dapat diawasi oleh OPD teknis, Bapenda, BPKAD, dan Bappeda.

1. Inventarisasi dan Klasifikasi Aset Digital

Langkah awal adalah melakukan **pendataan resmi dan digitalisasi seluruh kekayaan tak berwujud** milik Pemda. Ini meliputi:

- Nama-nama destinasi wisata yang memiliki brand value
- Logo daerah, tagline promosi, simbol budaya
- Konten visual seperti video drone, tari, festival, dokumenter
- Data spasial, peta interaktif, dokumen sejarah digital
- Produk khas daerah dengan kekhasan geografis

Setiap item diberi **metadata lengkap**: tanggal penciptaan, pemilik hak, lokasi, nilai estimasi pasar, dan status lisensinya. Data ini dikelola dalam **Sistem Informasi Aset Digital Daerah (SIADD)** yang dapat diakses lintas OPD sesuai kewenangan.

Contoh implementasi:

- Dinas Pariwisata dan Diskominfo mencatat 100 aset visual dan 30 video budaya dalam katalog digital yang terverifikasi.
- Dinas Perindagkop mencatat 10 produk khas yang telah memiliki merek terdaftar sebagai bagian dari aset lisensi.

2. Pusat Penyimpanan dan Keamanan Aset Digital

Seluruh aset digital harus tersimpan dalam sistem penyimpanan resmi, baik on-premise (server pemda) maupun berbasis cloud pemerintah (seperti INA Digital atau Kominfo Cloud). Ini penting untuk menjaga:

- Keamanan hak cipta
- Integritas konten
- Ketersediaan akses untuk monetisasi

Pemda juga dapat membentuk **Digital Asset Vault** (Ruang Aset Digital Daerah) yang dikelola oleh Diskominfo sebagai penyedia utama infrastruktur data. Sistem ini juga harus menyediakan backup berkala dan sistem autentikasi berlapis.

Contoh implementasi:

- Konten video “Festival Carocok” disimpan dalam cloud server Diskominfo dengan watermark resmi Pemda dan enkripsi.
- File .shp peta wisata disimpan dengan izin akses terbatas untuk digunakan oleh developer aplikasi wisata.

3. Mekanisme Lisensi dan Monetisasi Digital

Aset yang telah terverifikasi dapat **dimonetisasi melalui sistem lisensi, royalti, atau NFT**, dengan prosedur yang mudah namun tetap legal:

- Pelaku usaha, media, atau akademisi yang ingin menggunakan aset digital mengajukan permohonan via portal PAD digital.
- Diskominfo atau OPD pemilik aset mengeluarkan lisensi resmi, dengan durasi, tarif, dan ruang lingkup penggunaan yang jelas.
- Sistem mencatat transaksi dan mengirim hasilnya langsung ke rekening kas daerah.

Untuk konten NFT atau video YouTube, sistem monetisasi dapat dilakukan melalui platform internasional, dengan pengelolaan oleh tim digital kreatif Pemda.

Contoh implementasi:

- Startup travel mengajukan izin pemakaian video drone Mandeh untuk aplikasi wisata → bayar lisensi Rp 15 juta → masuk kas daerah.

- NFT “Tari Piring Surantih” dijual seharga Rp 5 juta → dividen 40% ke Pemda, sisanya untuk seniman lokal.

4. Evaluasi dan Pelaporan Aset Digital

Sistem ini harus dilengkapi dengan **dashboard kinerja aset digital**, yang menampilkan:

- Jumlah aset aktif dan lisensi berjalan
- Nilai komersialisasi per aset
- Pendapatan yang sudah masuk ke PAD
- OPD pengelola dan mitra pengguna

Evaluasi dilakukan minimal **setiap triwulan** oleh tim gabungan Bappeda, Bapenda, dan Diskominfo untuk meninjau efektivitas monetisasi, menilai aset yang underperforming, dan menetapkan strategi pengembangan berikutnya.

Contoh implementasi:

- Dashboard menunjukkan 35 aset video sudah terlisensi, menghasilkan Rp 170 juta, dan 12 NFT telah dijual total Rp 60 juta.

Manfaat Model Ini bagi Pesisir Selatan

1. Memastikan pengelolaan kekayaan tak berwujud menjadi sistematis, transparan, dan berbasis nilai ekonomi.
2. Mempermudah proses penjualan, pemanfaatan, dan pengawasan aset digital lintas OPD.
3. Mendorong transformasi digital fiskal dan memperkuat PAD dari sektor kreatif tanpa membebani APBD fisik.
4. Menjadi acuan pengembangan ekonomi kreatif digital berbasis budaya lokal.

3.d. Kerangka Regulasi dan Tata Kelola Monetisasi Aset Tak Berwujud

Monetisasi aset tak berwujud membutuhkan landasan hukum dan sistem tata kelola yang jelas agar potensi pendapatan yang dihasilkan tidak menimbulkan konflik kepemilikan, pelanggaran hak cipta, atau praktik tidak transparan. Selama ini, kekayaan non-fisik seperti nama destinasi, festival budaya, video dokumenter, desain batik khas, dan produk unggulan lokal sering digunakan oleh pelaku usaha atau penyelenggara acara tanpa ikatan legal yang jelas, sehingga Pemda tidak memperoleh kontribusi fiskal apa pun.

Tanpa aturan yang tegas, aset budaya dan simbol daerah rentan digunakan secara bebas dan komersial tanpa pengawasan, yang mengakibatkan hilangnya potensi PAD dan degradasi nilai warisan lokal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu segera menyusun **kerangka regulasi dan kelembagaan khusus** dalam bentuk **Peraturan Bupati (Perbup)** dan **SOP antar-OPD** yang mengatur tata kelola, pemanfaatan, dan monetisasi aset tak berwujud secara profesional.

1. Peraturan Bupati tentang Monetisasi Aset Tak Berwujud Daerah

Langkah pertama adalah penyusunan dan pengesahan **Peraturan Bupati** yang menjadi payung hukum bagi semua bentuk lisensi, royalti, dan penggunaan kekayaan tak berwujud milik Pemda. Perbup ini harus memuat:

- **Jenis-jenis aset yang dapat dimonetisasi**, termasuk nama destinasi, logo, festival, produk khas, dan konten digital.
- **Ketentuan tentang lisensi dan tarif**: termasuk durasi lisensi, ruang lingkup penggunaan, skema komersial dan non-komersial.
- **Hak dan kewajiban pengguna** aset: baik perseorangan, UMKM, LSM, maupun perusahaan.
- **Skema pembagian hasil** jika aset melibatkan pencipta (seniman, videografer, pembatik).
- **Sanksi administratif** bagi penggunaan tanpa izin.

Contoh penerapan:

- UMKM yang ingin memakai label “Rendang Laut Painan” harus mengajukan lisensi ke Dinas Perdagangan dan membayar kontribusi PAD tahunan sesuai Perbup.
- Media TV lokal yang menayangkan ulang video “Festival Mandeh” wajib membayar royalti sesuai durasi tayang.

2. SOP Antar-OPD dalam Manajemen Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud tersebar di banyak OPD (Dinas Pariwisata, Diskominfo, Perdagangan, Pendidikan, dan Dinas Koperasi). Oleh karena itu, diperlukan **Standar Operasional Prosedur (SOP) Lintas OPD** yang mengatur:

- Proses pendaftaran dan verifikasi aset digital
- Mekanisme pengajuan lisensi oleh pengguna pihak ketiga
- Tata cara perhitungan dan penagihan royalti/lisensi
- Pelaporan bulanan/triwulan ke BPKAD dan Bappeda
- Audit dan pengawasan pemanfaatan

Contoh SOP:

- Dinas Pariwisata melakukan kurasi tahunan atas konten budaya layak jual → Diskominfo menyimpan dan melindungi digitalnya → Bapenda mengelola perizinan lisensi dan pencatatan penerimaan PAD.

3. Tim Koordinasi Aset Tak Berwujud Daerah (TIKAD)

Untuk memastikan tata kelola berjalan lancar, Pemda perlu membentuk **TIKAD (Tim Koordinasi Aset Tak Berwujud Daerah)** yang bertugas:

- Menyusun kebijakan pengelolaan aset tak berwujud
- Melakukan penilaian periodik terhadap nilai komersial aset
- Menjadi pemutus akhir dalam perselisihan hak penggunaan
- Mengelola kerja sama dengan pihak luar (sponsor, media, platform NFT, dan marketplace digital)

TIKAD bisa terdiri dari unsur Bappeda, Bapenda, Diskominfo, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, dan Bagian Hukum.

4. Pengawasan dan Transparansi Penerimaan

Seluruh penerimaan dari aset tak berwujud harus:

- **Masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)** sesuai klasifikasi PAD
- Dicatat dalam **dashboard penerimaan PAD digital**
- Diaudit oleh **Inspektorat dan BPK** setiap tahun
- Diumumkan dalam laporan tahunan keterbukaan informasi publik

Contoh:

- Royalti dari pemakaian nama “Mandeh Paradise” oleh lima biro wisata tercatat masuk ke kas daerah sebesar Rp 25 juta/tahun dan ditampilkan di laman keterbukaan PAD.

5. Integrasi dengan Sistem Nasional dan Kekayaan Intelektual

Aset daerah juga harus dilindungi melalui **pendaftaran resmi ke Kementerian Hukum dan HAM**, khususnya:

- Merek dagang destinasi wisata
- Hak cipta video festival atau tari
- Desain industri untuk batik lokal dan produk kreatif

Pemda dapat menunjuk OPD koordinator untuk mengajukan **Hak Kekayaan Intelektual (HKI)** atas nama Pemerintah Kabupaten.



BAB IV

DIVERSIFIKASI SUMBER PAD BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH



BAB IV

DIVERSIFIKASI SUMBER PAD BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki **beragam potensi unggulan sektoral dan geografis** yang belum sepenuhnya dioptimalkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagian besar penerimaan daerah saat ini masih bergantung pada pajak dan retribusi klasik (hotel, restoran, pasar), serta dana transfer dari pusat. Padahal, jika ditinjau dari sektor riil, Pesisir Selatan menyimpan kekuatan pada komoditas unggulan seperti **perikanan air laut dan air tawar, pertanian pangan dan hortikultura, peternakan rakyat, pariwisata bahari dan budaya, serta sektor energi dan kehutanan berbasis nagari**. Diversifikasi PAD menjadi penting agar struktur pendapatan daerah menjadi lebih sehat, tidak tergantung pada satu atau dua sektor saja, serta adaptif terhadap perubahan ekonomi global dan kebijakan fiskal nasional.

Melalui pendekatan hilirisasi, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, dan pemanfaatan teknologi digital, Pemkab Pesisir Selatan dapat menjadikan sektor-sektor ini bukan hanya sebagai penggerak ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai **penopang fiskal daerah secara langsung**.

4a. Hilirisasi Komoditas Unggulan: Strategi Peningkatan PAD dan Nilai Tambah Ekonomi Lokal Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki berbagai komoditas unggulan strategis—seperti gambir, kelapa, pinang, jagung, serai wangi, kopi, rempah, dan hasil perikanan—namun sebagian besar masih dijual dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi. Hal ini menyebabkan kebocoran nilai tambah, melemahnya posisi tawar petani, serta potensi fiskal yang belum tergarap optimal. Padahal, tren nasional dan global saat ini menunjukkan bahwa komoditas yang diolah dalam rantai hilir memberikan margin 2 hingga 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan bahan mentah.

Melalui program Hilirisasi Komoditas Unggulan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan:

- Peningkatan kontribusi sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan terhadap PAD
- Penciptaan industri mikro dan menengah berbasis nagari
- Pembentukan sistem lisensi produk, QRIS usaha tani, dan retribusi usaha hilir
- Meningkatkan ekspor mikro dan daya saing produk lokal di pasar dalam dan luar negeri

Komoditas Unggulan dan Potensi Hilirisasi

Komoditas	Produk Hilirisasi Potensial	Potensi PAD
Gambir	Ekstrak katekin, antioksidan kosmetik, obat herbal	Lisensi produk, retribusi pabrik mini gambir
Kelapa	Minyak VCO, sabun, arang aktif, nata de coco	Pajak usaha mikro, royalti produk lokal
Pinang	Ekstrak catechin, obat cacing, permen herbal	Sewa mesin pengolahan, retribusi pemasaran
Jagung	Tepung, pakan ternak, keripik jagung	QRIS UMKM pangan, lisensi kemasan
Perikanan	Abon ikan, bakso ikan, frozen fillet, kerupuk ikan	Pajak industri mikro dan retribusi ekspor
Kopi	Bubuk kemasan, kopi cold brew, kopi fermentasi (specialty)	Lisensi merek “Kopi Pessel” dan kemasan ekspor
Rempah lokal	Jahe bubuk, minyak atsiri, aromaterapi	Pajak hasil hutan bukan kayu & retribusi pasar digital

Estimasi Potensi PAD Tahunan

Sumber PAD dari Hilirisasi	Estimasi (Rp / Tahun)
Lisensi produk hilir dan branding lokal	Rp 500 juta – Rp 800 juta
Fee dari rumah produksi dan alat pengolahan	Rp 300 – 500 juta
Pajak usaha kecil menengah (QRIS & NIB digital)	Rp 200 – 400 juta
Royalti produk ekspor mikro	Rp 400 – 600 juta
Total Potensi PAD Tahunan	Rp 1,4 – 2,3 miliar

Langkah Strategis Implementasi

1. Pemetaan Komoditas dan Industri Nagari

- Identifikasi 3–5 komoditas unggulan per wilayah (contoh: gambir–Tarusan, kelapa–Lunang, kopi–Batang Kapas)

- Petakan pelaku usaha, koperasi, dan aset yang bisa diinbreng ke rumah produksi
- 2. **Pendirian Mini Pabrik / Rumah Produksi**
 - Gunakan skema KPBU atau CSR untuk pembangunan fasilitas
 - Bangun “Mini Lab” untuk pengemasan, uji mutu, dan pelabelan
- 3. **Sistem Sertifikasi, QRIS, dan Digitalisasi Distribusi**
 - Daftarkan produk dengan merek lokal (misal: “Kelapa Pessel”, “Gambir Sejahtera”)
 - Integrasi pembayaran dan retribusi via QRIS
 - Pemasaran via marketplace daerah dan mitra ekspor
- 4. **Kelembagaan dan Dukungan Perusda**
 - Perusda menjadi mitra utama untuk lisensi, ekspor, dan layanan fiskal
 - Bekerja sama dengan koperasi nagari dan pelaku UMKM

Mitra Strategis

- **BRIN & BPOM:** Inovasi teknologi dan keamanan pangan
- **Perusda Pangan & Ekspor Daerah**
- **Bank Nagari / BSI:** Pembiayaan modal kerja dan alat produksi
- **Startup e-commerce:** Saluran distribusi digital
- **Kementerian Perdagangan dan Koperasi:** Sertifikasi dan promosi luar negeri

Tahapan 2025–2029

Tahun	Agenda
2025	Identifikasi komoditas, MoU mitra, FS hilirisasi
2026	Pembangunan mini plant dan pelatihan UMKM hilir
2027	Launching produk hilir dan lisensi fiskal digital
2028	Ekspansi ekspor mikro dan sistem PAD dari hasil hilir
2029	Optimalisasi retribusi, QRIS, dan royalti ekspor produk unggulan

Dampak Strategis

- Meningkatkan **nilai tambah ekonomi lokal hingga 3–5 kali lipat**
- Membuka lapangan kerja hilir dan wirausaha muda daerah
- Menjadikan **produk Pesisir Selatan tampil dalam skala nasional dan ekspor**
- Menghasilkan PAD berkelanjutan dari sektor primer yang naik kelas menjadi industri

Hilirisasi bukan hanya soal produksi, tapi tentang mengambil kembali nilai tambah ekonomi yang selama ini hilang. Kabupaten Pesisir Selatan akan tumbuh bukan hanya sebagai produsen bahan mentah, tapi sebagai daerah pencipta produk bernilai tinggi dan sumber pendapatan fiskal mandiri.

4b. Perikanan Air Tawar dan Fiskalisasi Produk Ikan Nagari: Strategi Ketahanan Pangan, Ekonomi Inklusif, dan Sumber PAD Baru Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan dikenal sebagai wilayah pesisir dengan kekayaan laut yang besar, namun di sisi lain, potensi perikanan air tawar belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, dengan bentang wilayah yang luas, aliran sungai yang stabil, dan banyaknya lahan tidur serta kolam terbenkakai, Pessel memiliki peluang besar mengembangkan budidaya ikan air tawar sebagai sumber ekonomi baru berbasis rumah tangga, koperasi, hingga skala industri mikro.

Lebih dari itu, pengembangan perikanan air tawar bisa menjadi basis program ketahanan pangan lokal, menyerap tenaga kerja pemuda dan perempuan, serta menyediakan basis fiskalisasi baru berupa:

- Retribusi hasil panen dan pemasaran ikan
- Pajak usaha mikro budidaya berbasis QRIS
- Lisensi produk olahan ikan seperti abon, bakso, kerupuk, dan frozen food

Dengan pendekatan hilirisasi dan fiskalisasi berbasis nagari, sektor perikanan air tawar bisa menjadi motor PAD baru yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi.

Komoditas Potensial dan Produk Turunan

Jenis Ikan	Produk Hilirisasi Potensial
Lele	Lele frozen, lele asap, abon lele
Nila / Mujair	Nila fillet, bakso ikan, nugget
Patin	Patin saus asam manis, fillet ekspor
Gurami	Gurami frozen, gurami bakar kemasan
Mas / Koi Konsumsi	Kerupuk ikan, olahan siap saji

Komponen Strategis Program



Komponen	Fungsi Utama
Budidaya Air Tawar Terpadu (BATARU)	Kolam terpal, bioflok, dan kolam pekarangan berbasis rumah tangga
Inkubator Ikan Nagari	Pelatihan benih, pakan, panen, dan pengemasan produk
Sentra Pakan Mandiri Nagari	Produksi pakan lokal dari dedak, limbah jagung, dan fermentasi
Pusat Pengolahan dan Pengemasan Ikan	Pengolahan higienis, label halal, QRIS, dan sertifikasi
Pasar Ikan Digital Nagari	Marketplace berbasis aplikasi, sistem rating, dan traceability

Estimasi Potensi PAD Tahunan

Sumber PAD	Estimasi (Rp / Tahun)
Retribusi hasil panen (ikan/tahun)	Rp 300 – 500 juta
QRIS distribusi dan transaksi digital	Rp 200 – 400 juta
Pajak lisensi produk olahan ikan	Rp 400 – 700 juta
Fee marketplace dan digital branding	Rp 100 – 200 juta
Total Potensi PAD Tahunan	Rp 1 – 1,8 miliar

Tahapan Implementasi (2025–2029)

Tahun	Agenda Strategis
2025	Pemetaan lokasi kolam dan potensi keluarga peternak
2026	Pelatihan bioflok, produksi benih, dan produksi pakan mandiri
2027	Pendirian unit pengolahan ikan dan koperasi pemasaran
2028	Digitalisasi sistem transaksi dan launching marketplace ikan
2029	Ekspansi fiskalisasi berbasis lisensi produk dan ekspor mikro

Mitra Strategis

Mitra	Peran
BRIN & BBAT Sukabumi	Transfer teknologi bioflok dan benih unggul
Bank Nagari / BUMNag	Pembiayaan kolam, pakan, dan pengemasan produk

Startup eFishery, Aruna	Integrasi teknologi dan pasar digital
Dinas Perikanan Provinsi	Pendampingan teknis dan hilirisasi produk
Perusda Perikanan Pessel	Operator unit produksi dan pemungut lisensi PAD

Dampak Strategis

- **Memperluas basis ekonomi masyarakat perdesaan dan perempuan**
- Menambah konsumsi protein lokal dan memperkuat ketahanan pangan nagari
- Menjadi sumber **PAD dari sektor non-tradisional** yang inklusif dan berjangka panjang
- Menjadikan Pessel sebagai **pionir ekonomi ikan darat digital di Sumatera Barat**

Dari kolam sederhana bisa lahir fiskal yang luar biasa. Perikanan air tawar adalah **komoditas rakyat yang jika ditata secara profesional dan digital**, dapat menjadi penopang PAD dan sumber kesejahteraan baru bagi Kabupaten Pesisir Selatan.

4c. Peternakan dan Zona Sapi Rakyat Digital: Membangun Kedaulatan Protein, Wirausaha Tani, dan Sumber PAD di Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kombinasi ideal antara **lahan padang penggembalaan**, populasi petani-peternak tradisional, dan kebutuhan konsumsi daging lokal yang terus meningkat. Namun, hingga saat ini, sektor peternakan—terutama sapi—belum dikembangkan secara terintegrasi sebagai **rantai pasok ekonomi, fiskal, dan ketahanan gizi**. Mayoritas aktivitas masih bersifat rumah tangga, tanpa sentralisasi manajemen, pengolahan, maupun pengukuran kontribusi ke PAD.

Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendorong pembentukan **Zona Sapi Rakyat Digital**, yaitu kluster peternakan berbasis kelompok tani dan nagari, didukung oleh infrastruktur digital untuk:

- Pemantauan ternak (IoT sensor, e-tagging, dan traceability)
- Produksi pakan hijauan & fermentasi mandiri
- Pemotongan bersertifikat halal
- Distribusi dan transaksi berbasis QRIS serta lisensi usaha
- Retribusi hasil ternak, olahan daging, pupuk kandang, dan jasa peternakan





Komponen Strategis Zona Sapi Rakyat Digital

Komponen	Fungsi dan Inovasi
Sentra Budidaya Sapi Nagari	Kelompok ternak berbasis desa dengan manajemen kolektif
Unit Produksi Pakan Hijauan & Fermentasi	Mengurangi biaya pakan dan meningkatkan kualitas daging
RPH Mini Halal & Unit Olahan Daging	Penyembelihan higienis, produksi dendeng, sosis, rendang
Sistem Digital Ternak dan QRIS	E-tagging sapi, tracking pertumbuhan, dan sistem jual beli berbasis QRIS
Pupuk Organik dari Kotoran Ternak	Produk bernilai tambah dari limbah ternak

Produk Hilirisasi dan Potensi Pajak

Produk / Layanan	Potensi PAD
Daging segar, rendang kemasan	Pajak usaha mikro, retribusi pasar
Dendeng sapi, sosis lokal	Lisensi produk dan royalti label "Sapi Pessel"
Pupuk kandang, kompos cair	Retribusi produksi pupuk & lisensi branding
Jasa pemotongan / penggemukan	Retribusi RPH dan fee sewa kandang digital
Event peternakan (kontes, expo)	Retribusi event dan sponsor BUMN/CSR

Estimasi Potensi PAD Tahunan

Sumber PAD	Estimasi (Rp / Tahun)
Fee pemotongan & distribusi ternak	Rp 200 – 400 juta
Lisensi produk olahan sapi	Rp 400 – 600 juta
Pajak usaha pakan & pupuk ternak	Rp 300 – 500 juta
QRIS transaksi jual beli sapi & produk	Rp 100 – 200 juta
Total Potensi PAD Tahunan	Rp 1 – 1,7 miliar

Tahapan Implementasi (2025–2029)

Tahun	Agenda Strategis
2025	Pemetaan kelompok ternak & pelatihan pakan hijauan
2026	Pendirian kandang kolektif dan sentra fermentasi pakan
2027	Digitalisasi ternak, penandaan sapi (e-tag) dan distribusi QRIS

2028	Operasional unit olahan daging dan RPH mini halal
2029	Integrasi retribusi dan ekspor mikro produk sapi lokal

Mitra Strategis

Mitra	Fungsi
Dinas Peternakan Provinsi & BRIN	Riset pemuliaan, pakan, dan teknologi IoT
Bank Nagari / BSI	Pembiayaan kandang dan sapi bakalan
Startup Agritech (e-Farm, Agretik)	Pemantauan sapi berbasis aplikasi
Perusda Peternakan & BUMNag	Pengelola usaha, penarik retribusi, mitra fiskal digital
CSR BUMN (Bulog, Pertamina)	Bantuan sapi bibit, alat pengolahan, dan branding

Dampak Strategis

- Meningkatkan **produktivitas peternakan berbasis data**
- Memberikan **nilai tambah hingga 2–3x lipat** dibanding jual sapi hidup
- Menjadi **sumber PAD baru dari subsektor daging dan pupuk**
- Menumbuhkan UMKM daging olahan halal dan premium
- Mengangkat citra Pessel sebagai **sentra sapi rakyat digital Sumatera**

Ternak bukan hanya warisan, tapi masa depan fiskal. Dengan pendekatan digital, kolektif, dan berbasis hilirisasi, sapi rakyat bisa menjadi sapi daerah—penyumbang PAD, pekerjaan, dan gizi masyarakat secara berkelanjutan.

4d. Wisata dan Ekowisata Nagari sebagai Sumber PAD Digital: Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Monetisasi Budaya Alam Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten dengan kekayaan sumber daya wisata alam dan budaya tertinggi di Sumatera Barat. Dari kawasan wisata Mandeh yang disebut sebagai “The Raja Ampat of the West,” hingga Pulau Cingkuak, Air Terjun Bayang Sani, Bukit Langkisau, dan ratusan potensi ekowisata nagari seperti gua, sungai, air panas, dan puncak perbukitan—semuanya masih sebagian besar belum dikembangkan secara sistematis sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selama ini, pengelolaan destinasi wisata banyak dilakukan secara manual, minim digitalisasi, tanpa sistem retribusi otomatis, serta belum terintegrasi ke dalam skema fiskal daerah berbasis QRIS, tiket digital, atau lisensi budaya. Potensi PAD dari sektor wisata dan budaya belum tergali maksimal, padahal tren wisata saat ini bergerak ke arah:

- **Sustainable tourism**
- **Ekowisata berbasis lokal**
- **Digital tourism (AR/VR, Tiket QR, NFT Budaya)**

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui program “**Digital Ekowisata Nagari**” akan mengembangkan dan memonetisasi destinasi wisata berbasis digital, budaya, dan sistem retribusi transparan.



Komponen Strategis Ekowisata PAD Nagari

Komponen	Fungsi Strategis
----------	------------------

Tiket Digital QRIS Berbasis Lokasi	Tiket masuk wisata berbasis ponsel dan GPS, terhubung ke dashboard PAD
Lisensi Budaya dan Event Nagari	Setiap pementasan, tari, pertunjukan dikenai lisensi dan royalti digital
Marketplace Wisata Nagari	Penjualan paket wisata, penginapan, guide, dan kuliner secara daring
NFT Budaya dan Wisata	Foto ikonik, tari tradisional, dan kuliner bisa dijual sebagai NFT resmi daerah
AR/VR Tour Lokasi	Virtual tour destinasi untuk promosi dan edukasi berbayar
Pemetaan dan Penilaian Wisata Berbasis Data	Setiap objek wisata diberi nilai ekonomi dan fiskal untuk dihitung PAD-nya

Teknologi dan Infrastruktur Pendukung

- Aplikasi SuperApp Wisata Pessel: Tiket, jadwal, pembayaran, rating, pelaporan PAD real-time
- Dashboard PAD Wisata: Terintegrasi dengan QRIS dan e-ticket
- Integrasi dengan **Nagari Tourism Board** dan **Perusda Pariwisata**
- Kolaborasi dengan Google Maps, Traveloka, dan Startup Lokal

Estimasi Potensi PAD Tahunan

Sumber PAD	Estimasi (Rp / Tahun)
Tiket digital dan retribusi destinasi	Rp 1 – 2 miliar
Lisensi event dan NFT budaya	Rp 300 – 500 juta
Pajak penginapan wisata berbasis QRIS	Rp 500 – 800 juta
Fee marketplace dan promosi digital	Rp 200 – 400 juta
Total Potensi PAD Tahunan	Rp 2 – 3,7 miliar

Tahapan Implementasi (2025–2029)

Tahun	Agenda Strategis
2025	Penetapan 10 Destinasi Prioritas dan digitalisasi tiket QRIS
2026	Peluncuran SuperApp Wisata dan NFT Budaya
2027	Operasional penuh marketplace & sistem royalti event
2028	Integrasi AR/VR dan ekspor wisata budaya digital
2029	Optimalisasi retribusi dan lisensi budaya untuk PAD daerah

Mitra Strategis

Mitra	Fungsi
Kementerian Pariwisata	Promosi, pelatihan, dan dana DAU Pariwisata
BRIN / Telkom	Teknologi SuperApp, QR, dan AR Tour
Startup Lokal & UMKM Nagari	Operator souvenir, homestay, dan jasa guide
Bank Nagari / BUMNag	Kanal pembayaran QRIS dan pengelolaan fiskal wisata
Perusda Wisata & Bapenda	Penarik retribusi, royalti, dan dashboard PAD digital

Dampak Strategis

- Mendorong **wisata berkualitas, berdaya saing, dan berdampak fiskal langsung**
- Memberikan ruang ekonomi bagi pemuda nagari (guide, konten kreator, NFT)
- Meningkatkan **transparansi PAD dan retribusi wisata berbasis digital**
- Menjadikan Pesisir Selatan sebagai pelopor **ekowisata berbasis fiskalisasi digital di Sumbar**

Pantai, pulau, air terjun, dan budaya Pesisir Selatan bukan sekadar keindahan—mereka adalah aset fiskal yang bisa dicairkan secara cerdas dan berkelanjutan. Lewat digitalisasi dan lisensi budaya, wisata akan menjadi jembatan antara warisan dan kemajuan fiskal.

Model Royalti Pertunjukan dan Lisensi Budaya untuk Peningkatan PAD Kabupaten Pesisir Selatan

Prinsip Utama Model

Aspek	Penjelasan
Lisensi Budaya	Izin resmi yang dikeluarkan oleh Pemda untuk penggunaan elemen budaya (tari, lagu, motif, ikon) dalam kegiatan komersial
Royalti Budaya	Pembayaran berkala (per event/per tahun) oleh pengguna budaya lokal yang mendapatkan nilai ekonomi darinya
NFT Budaya (opsional)	Representasi digital dari karya budaya yang dijual, dilacak, dan dikenai fee saat berpindah tangan

Event-Based Retribution	Penarikan retribusi langsung dari acara seni, festival, atau pertunjukan yang menggunakan budaya lokal
-------------------------	--

Contoh Lisensi Budaya (Legal & Komersial)

Objek Budaya	Bentuk Lisensi / Royalti	Nilai Retribusi (Est.)
Tari Piring Pesisir Selatan	Lisensi pertunjukan hotel/wisata	Rp 1 juta–3 juta/event
Motif Batik “Pessel Laut”	Lisensi penggunaan untuk fesyen	Rp 2 juta/tahun/pemilik merek
Tari & Musik dalam Festival	Retribusi pertunjukan / royalti	5–10% dari tiket atau sponsor
Logo Pulau Mandeh	Hak pakai komersial di brosur/digital	Rp 1–5 juta/penggunaan
Lisensi Kuliner Tradisional	Sertifikat “kuliner asli Pessel” untuk restoran	Rp 500 ribu–1 juta/tahun

Contoh Daftar NFT Budaya Pesisir Selatan

No	Kategori	Objek Budaya / Karya Digital	Format NFT	Keterangan Nilai Budaya & Komersial	Estimasi Harga NFT (Rp)	Potensi Royalti PAD (10–20%)
1	Tari Tradisional	Tari Piring Bayang	Video MP4 + AR	Tarian Minang khas Pesisir Selatan, sangat populer untuk event wisata	5–10 juta	500 ribu – 2 juta
2		Tari Gelombang Teluk Pugung	3D Animation NFT	Tari kontemporer berbasis gerak gelombang laut	4–7 juta	400 – 1,4 juta
3		Tari Lako Gadang Lunang	Motion Graphic	Gerak tari upacara nagari yang langka	2–5 juta	200 – 1 juta
4	Musik & Instrumen	Musik Talempong Nagari Nyiur Melambai	Audio MP3 + Score PDF	Musik khas nagari digunakan dalam penyambutan adat	1–3 juta	100 – 600 ribu
5		Saluang Pagi dari Batang Kapas	Audio + Audio NFT Metadata	Melodi tiupan bambu khas Sumbar, cocok untuk musik latar dan meditasi	2–4 juta	200 – 800 ribu
6	Fotografi Budaya	Sunrise Mandeh	JPEG HD + GeoTag	Foto lanskap ikonik dengan potensi pasar NFT global	1–2 juta	100 – 400 ribu
7		Perahu Nelayan Tradisional Sungai Pisang	JPEG + Metadata Lokasi	Simbol budaya pesisir masyarakat tradisional	1–3 juta	100 – 600 ribu
8	Motif & Tekstil	Motif Batik “Langkisau Laut”	Vector SVG / JPEG	Dapat digunakan pada fashion, dekorasi, dan lisensi tekstil	1,5 – 3 juta	150 – 600 ribu
9		Motif Ukiran Rumah Gadang Mandeh	Vector + 3D Model	Detail ukiran digital, potensial interior digital dan NFT desain	2 – 4 juta	200 – 800 ribu
10	Cerita Rakyat	Legenda Si Puti Ganting	eBook PDF + Audio	Narasi tradisional khas daerah Tarusan, dapat digunakan di pendidikan	2 – 5 juta	200 – 1 juta
11		Cerita Hantu Laut Bukit Langkisau	Video Animasi + Narasi	Unik, dapat menjadi NFT horor berbasis budaya	2 – 3 juta	200 – 600 ribu
12	Kuliner & Resep	Rendang Ikan Salai	PDF Resep + Ilustrasi	Dapat dijadikan NFT + lisensi waralaba kuliner	2 – 5 juta	200 – 1 juta
13		Samba Lado Sungai Pisang	NFT Sertifikat + Panduan	Potensi branding restoran dan promosi kuliner ekspor	1 – 2 juta	100 – 400 ribu
14	Event Budaya	Festival Bayang Sani	Foto + Tiket Digital NFT	NFT untuk peserta / dokumentasi resmi festival	500 ribu – 2 juta	50 – 400 ribu
15		Parade Adat Nagari Taratak	Poster + Video NFT	Lisensi penyelenggaraan event / souvenir digital resmi	1 – 3 juta	100 – 600 ribu
16	Objek Wisata Digital	Virtual Tour Pulau Cingkuak (AR)	360° Video / VR NFT	Paket VR untuk pariwisata digital, dapat dijual sebagai NFT koleksi	4 – 8 juta	400 – 1,6 juta

No	Kategori	Objek Budaya / Karya Digital	Format NFT	Keterangan Nilai Budaya & Komersial	Estimasi Harga NFT (Rp)	Potensi Royalti PAD (10–20%)
17		Bukit Langkisau Drone Shot	HD Video NFT + GeoMapping	Untuk investor travel, pariwisata digital global	2 – 5 juta	200 – 1 juta
18	Upacara Adat	Doa Laut Festival Nelayan Sungai Tunu	Audio NFT + QR Lisensi	Dapat digunakan sebagai pembuka festival, NFT spiritual	1 – 3 juta	100 – 600 ribu
19		Ritual Petuah Adat Nagari Lumpo	Audio + PDF Transkripsi	Edukasi budaya, konten sekolah, atau NFT museum digital	1 – 2 juta	100 – 400 ribu
20	Aset Digital Gabungan	Paket NFT "Heritage Pessel Series" (10 karya)	Bundle NFT: Tari, foto, lagu, cerita	Dapat dijual dalam lelang NFT koleksi resmi pemerintah daerah	15 – 25 juta	1,5 – 5 juta

4e. Sawah Pokok Murah dan Sistem Pangan Berbasis Nagari: Ketahanan Pangan Rakyat sebagai Sumber PAD Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki luas wilayah $\pm 6.000 \text{ km}^2$ dan lebih dari 2.300 km^2 di antaranya merupakan kawasan potensial pertanian, termasuk area persawahan dan lahan tidur yang belum digarap secara optimal. Berdasarkan data Dinas Pertanian Pessel (2023), terdapat lebih dari 5.200 hektare sawah tadah hujan, di mana ± 1.400 hektare di antaranya termasuk kategori suboptimal atau tidak dimanfaatkan secara aktif. Di sisi lain, kebutuhan konsumsi beras masyarakat mencapai ± 110.000 ton/tahun, sedangkan produksi dalam daerah hanya mampu menyuplai 65–70% dari kebutuhan tersebut, terutama di musim paceklik.

Selain itu, angka inflasi bahan pokok di Pessel selama 2023 tercatat naik 5,2% (year-on-year) akibat distribusi yang tidak efisien dan ketergantungan terhadap pasokan luar daerah. Fenomena ini memperkuat urgensi menciptakan sistem “Sawah Pokok Murah” berbasis nagari yang mengintegrasikan aspek produksi, distribusi, fiskalisasi, dan keadilan sosial.

Tujuan Strategis Program

1. Mengaktifkan lahan tidur dan suboptimal melalui kemitraan pemerintah–petani–nagari.
2. Menyediakan beras pokok murah untuk program bantuan pangan daerah (sekolah, MBG, ASN, dan masyarakat miskin).
3. Membangun sistem distribusi pangan berbasis koperasi nagari dan kanal digital (QRIS, dashboard produksi).
4. Menjadikan ekosistem pangan ini sebagai sumber PAD baru melalui retribusi, branding, lisensi, dan integrasi program publik.



Lokasi Prioritas Aktivasi Sawah Pokok Murah

Kecamatan	Nagari Sasaran	Luas (ha)	Potensi	Kelompok Tani Utama	Status Eksisting
-----------	----------------	-----------	---------	---------------------	------------------

Koto XI Tarusan	Nagari Barung-Barung Belantai	75 ha	KT "Sawah Mandiri"	Sawah nonaktif, bisa disambungkan ke irigasi
Sutera	Nagari Ampiang Parak	65 ha	KT "Parak Sejahtera"	Tadah hujan, tersedia sumber air dangkal
Lengayang	Nagari Lakitan Tengah	90 ha	KT "Bina Tani Lakitan"	Sebagian aktif, produktivitas rendah
IV Jurai	Nagari Surantih	70 ha	KT "Surantih Mandiri"	Potensi petani muda besar
Basa Ampek Balai	Nagari Gantiang Mudik Selatan	60 ha	KT "Tunas Harapan"	Dekat pusat pemerintahan kabupaten

Total Potensi: ±360 hektare aktifasi sawah murah fase awal (2025–2026), dengan proyeksi produksi 1.800–2.200 ton beras/tahun.

Komponen Program dan Implementasi

1. Pengaktifan Sawah Tidur melalui Kemitraan Tripartit

- Skema inbreng aset: Lahan oleh masyarakat/nagari, pupuk oleh Pemda, tenaga kerja oleh petani
- Perjanjian bagi hasil dengan koperasi sebagai off-taker tetap (kontrak beli-putus)
- Produksi beras menjadi "Beras Nagari Pessel" untuk pasar lokal dan program MBG

2. Distribusi dan Fiskalisasi Berbasis Koperasi Digital

- Koperasi pangan nagari menjadi distributor resmi
- QRIS digunakan untuk transaksi antar sekolah, ASN, pasar, dan rumah tangga
- Dashboard produksi – distribusi – fiskal ditautkan ke Bapenda

3. Lisensi dan Branding Produk

- Produk diberi label "Beras Pessel – Sawah Rakyat"
- Dikenakan lisensi tahunan (retribusi mikro) Rp 50.000–Rp 200.000 per pelapak/mitra
- Lisensi juga diberikan ke produsen kemasan, logistik, dan mitra warung digital

4. Integrasi ke Program Pemerintah

- Beras hasil sawah langsung digunakan untuk:
 - Makanan Bergizi Gratis (MBG)
 - Belanja rutin dinas (nasi kotak, konsumsi rapat)
 - Subsidi pangan keluarga miskin
- Anggaran belanja daerah diputar kembali ke sistem produksi lokal (circular budgeting)

Tahapan Implementasi 2025–2029

Tahun	Kegiatan Kunci
2025	Identifikasi lokasi, MoU dengan kelompok tani dan nagari, skema pembiayaan
2026	Penanaman perdana, produksi pertama, digitalisasi logistik
2027	Peluncuran label "Beras Rakyat Pessel", integrasi program MBG
2028	Ekspansi ke nagari baru, retribusi QRIS, integrasi ke belanja rutin OPD
2029	Evaluasi fiskal, ekspor antardaerah, ekspansi kemitraan sektor swasta

Kemitraan Strategis

Mitra	Peran Strategis
Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	Koordinator teknis produksi dan pengawasan kualitas
BUMD Pangan / BULOG	Off-taker pembeli utama beras lokal
Bank Nagari / BSI	Pembiayaan tani dan platform QRIS koperasi
BRIN / BPTP Kementan	Varietas padi adaptif dan pupuk hayati lokal
Dinas Pendidikan & Sosial	Konsumen tetap dari MBG, ASN, dan bansos

Dampak Ekonomi dan Fiskal

- Ketahanan pangan lokal meningkat (pengurangan ketergantungan pasokan luar daerah hingga 20%)
- Harga pangan lebih stabil → pengendalian inflasi daerah
- Pendapatan petani meningkat melalui kontrak off-taker tetap
- PAD tumbuh dari sektor non-tradisional yang adil dan partisipatif
- Model "Circular Public Expenditure" → belanja pemerintah → produksi rakyat → PAD

Sawah bukan hanya ruang tanam, tetapi instrumen ekonomi makro berbasis rakyat. Dengan sistem pangan lokal yang terintegrasi dan fiskalisasi digital, Pesisir Selatan dapat membangun ketahanan pangan sekaligus kemandirian fiskal dari bawah—dari petani, nagari, hingga ke kas daerah.

4f. Pusat Produksi Pupuk Organik dan Kompos Nagari: Mendorong Pertanian Berkelanjutan dan PAD Hijau di Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu wilayah dengan basis pertanian yang luas, namun masih sangat tergantung pada **pupuk kimia bersubsidi**. Berdasarkan data Dinas Pertanian Pessel (2023), estimasi kebutuhan pupuk urea dan NPK petani mencapai 22.000 ton/tahun, sementara alokasi subsidi hanya memenuhi 50–60% kebutuhan. Kesenjangan ini menyebabkan petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga mahal, mengurangi margin usaha tani dan menurunkan produktivitas lahan.

Di sisi lain, kabupaten ini memiliki potensi luar biasa untuk produksi pupuk organik berbasis **limbah pertanian, kotoran ternak, dan limbah rumah tangga organik**, khususnya di nagari-nagari sentra sawah dan peternakan. Namun, potensi ini belum dikapitalisasi secara sistematis sebagai **industri lokal penghasil PAD dan instrumen transisi pertanian hijau**.

Oleh karena itu, program “**Pusat Produksi Pupuk Organik dan Kompos Nagari**” menjadi solusi strategis untuk:

- Menyediakan pupuk murah dan berkelanjutan bagi petani
- Mengurangi ketergantungan pada subsidi pusat
- Menciptakan sumber PAD baru dari retribusi, penjualan, dan lisensi produk
- Mendukung transisi pertanian hijau dan ekonomi sirkular



Lokasi Prioritas dan Bahan Baku Kompos

Kecamatan	Nagari Prioritas	Potensi Bahan Baku	Lembaga Pengelola
Koto XI Tarusan	Barung-Barung Belantai	Jerami, limbah pasar, kotoran sapi	Koperasi Tani Hijau
IV Jurai	Surantih	Limbah sayuran, pasar tradisional	BUMNag Surantih Maju

Sutera	Ampiang Parak	Kotoran kambing, sekam, dedak	KT Agro Mandiri
Lengayang	Lakitan Tengah	Limbah ternak dan rumah tangga	UPTD Kompos Nagari
Batang Kapas	Pasar Baru	Limbah pertanian, restoran	Koperasi Agrokompos

Komponen Strategis Program Kompos Nagari

1. Pembangunan Unit Produksi Kompos Nagari

- Skala mini (2–5 ton/hari) di lokasi dekat sawah dan ternak
- Menggunakan sistem fermentasi aerasi (Bio-Decomposer) dan pengadukan manual/semi otomatis

2. Skema Inbreng Aset dan Insentif PAD

- Lahan kompos dan pupuk padat/cair dikenai retribusi daerah (5–10%)

3. Sertifikasi dan Branding Produk

- Produk diberi label “**Pupuk Hijau Pessel**” yang wajib disertifikasi uji mutu oleh UPTD Pertanian
- Produk masuk ke sistem pengadaan MBG, pertanian sekolah, dan bantuan benih

4. Distribusi dan Penjualan Digital

- Penjualan via **e-commerce pertanian lokal** (e-Pangan, Warung Nagari)
- Pembayaran menggunakan **QRIS dan sistem voucher petani** (digitalisasi subsidi)

Estimasi Potensi PAD Tahunan

Sumber PAD	Estimasi (Rp / Tahun)
Penjualan kompos dan pupuk cair	Rp 800 juta – 1,2 miliar
Retribusi lisensi dan uji mutu produk	Rp 150 – 300 juta
QRIS dan fee distribusi pupuk ke kelompok	Rp 100 – 250 juta
Penjualan ke program publik (MBG, Bansos)	Rp 300 – 500 juta
Total Potensi PAD Tahunan	Rp 1,35 – 2,25 miliar

Tahapan Implementasi 2025–2029

Tahun	Agenda Strategis
2025	Pemetaan lokasi dan MoU nagari–koperasi–Pemda
2026	Pembangunan unit kompos mini, pelatihan SDM lokal
2027	Sertifikasi dan branding produk pupuk nagari
2028	Integrasi ke sistem belanja publik dan e-commerce nagari
2029	Ekspansi volume dan skema ekspor antar daerah

Mitra Strategis

Mitra	Peran Strategis
DLH & Dinas Pertanian	Penyedia bahan baku limbah dan pembinaan teknis
UPTD Sertifikasi Pertanian	Pengujian mutu pupuk dan kompos
BUMNag / Perusda Agro Hijau	Operator unit produksi dan penarik retribusi
Bank Nagari / CSR BUMN	Pembiayaan dan skema KPBU skala mikro
BRIN / Litbang Pertanian	Riset teknologi dekomposer lokal

Dampak Strategis

- Mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk bersubsidi nasional
- Meningkatkan **produktivitas pertanian organik** dan daya tahan lahan
- Menciptakan **lapangan kerja baru di desa** melalui koperasi dan unit produksi
- Memberikan **sumber PAD hijau yang berkelanjutan dan terukur**
- Mendukung target pengurangan emisi karbon melalui ekonomi sirkular

Limbah bukanlah akhir, melainkan awal dari potensi fiskal baru. Melalui pupuk organik dan kompos nagari, Pesisir Selatan bisa memimpin transformasi pertanian hijau yang tidak hanya sehat untuk tanah—tapi juga sehat untuk kas daerah.

4g. Pengelolaan Sampah Nagari sebagai Sumber PAD dan Ekonomi Sirkular di Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan menghasilkan rata-rata ± 180 ton sampah per hari (Dinas Lingkungan Hidup, 2023), namun hanya sekitar 55–60% yang berhasil tertangani oleh armada dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Mayoritas sampah masih berakhir di TPA Rawang, yang sudah hampir melebihi kapasitas maksimalnya. Masalah klasik seperti minimnya pemilahan di sumber, armada terbatas, serta rendahnya partisipasi masyarakat membuat pengelolaan sampah menjadi beban anggaran tahunan tanpa kontribusi fiskal yang berarti.

Padahal, jika dikelola dengan pendekatan ekonomi sirkular dan digitalisasi fiskal, sampah bukan hanya bisa dikurangi, tapi juga diubah menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)—baik melalui retribusi berbasis layanan, penjualan hasil olahan, maupun insentif karbon dan lisensi pengelolaan limbah.

Program “Zero Waste Nagari & Ekonomi Sirkular Berbasis PAD” akan menjadi model pengelolaan sampah modern berbasis lokal dan digital di Pesisir Selatan.

Komponen Strategis Pengelolaan Sampah Nagari

Komponen	Fungsi Strategis
Bank Sampah Digital Nagari	Tempat penukaran sampah anorganik dengan e-voucher atau saldo QRIS
Unit Pengolahan Kompos dan Maggot	Pemanfaatan limbah organik menjadi kompos premium atau pakan ikan/ayam
Retribusi Sampah Berbasis QRIS	Sistem retribusi transparan, tracking volume, dan layanan via ponsel
Lisensi Pelaku Daur Ulang Lokal	Penarikan fee/lisensi kepada pelaku daur ulang swasta atau koperasi
Insentif Karbon / Carbon Credit	Skema konversi volume pengurangan sampah organik ke pasar karbon
Kemitraan Ekspor RDF & Sampah Plastik	Pengolahan plastik campuran menjadi RDF (Refused Derived Fuel) untuk pabrik semen atau ekspor



Lokasi Pilot Project 2025–2026

Kecamatan	Nagari	Potensi Harian (Ton Sampah)	Fasilitas Prioritas
IV Jurai	Surantih	± 8 ton	Bank Sampah Digital, Kompos, Maggot
Koto XI Tarusan	Carocok Tarusan	± 10 ton	Retribusi QRIS, Ekspor RDF, pusat daur ulang
Lengayang	Lakitan Tengah	± 6 ton	Komunitas Pemilah, pupuk & pelabelan karbon

Sutera	Ampiang Parak	±5 ton	BUMNag Sampah & e-Voucher Carbon Clean
--------	---------------	--------	--

Estimasi Potensi PAD Tahunan

Sumber PAD	Estimasi (Rp / Tahun)
Retribusi QRIS pelayanan sampah nagari	Rp 500 – 700 juta
Penjualan kompos dan maggot	Rp 200 – 350 juta
Fee lisensi pengelola daur ulang	Rp 100 – 250 juta
Penjualan RDF ke sektor semen / energi	Rp 300 – 600 juta
Skema karbon (voluntary carbon market)	Rp 150 – 300 juta
Total Estimasi PAD	Rp 1,25 – 2,2 miliar

Tahapan Implementasi 2025–2029

Tahun Agenda Strategis

- 2025 Pembentukan Bank Sampah Digital & pilot QRIS retribusi
- 2026 Operasional kompos dan maggot di 3 nagari prioritas
- 2027 Skema carbon offset dan lisensi pelaku daur ulang
- 2028 Ekspor RDF dan penguatan regulasi digitalisasi sampah
- 2029 Sistem insentif karbon terintegrasi ke dashboard PAD

Mitra Strategis dan Skema KPBU/CSR

Mitra	Peran Strategis
DLH & Dinas Pangan	Pembinaan teknis, regulasi & distribusi kompos
Bank Nagari / QRIS	Kanal pembayaran retribusi dan insentif digital
Perusda Hijau / BUMNag	Operator lapangan dan pengelola aset sampah
PT Semen Padang / Semen Indonesia	Off-taker RDF sebagai bahan bakar alternatif
Startup lingkungan (CarbonEthics, Waste4Change)	Pendampingan verifikasi karbon dan sistem pelaporan sirkular

Dampak Strategis Program

- a. Mengurangi volume sampah ke TPA hingga 50%
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui insentif ekonomi langsung
- c. Menciptakan lapangan kerja hijau di bidang pengelolaan limbah
- d. Menjadikan sampah sebagai instrumen fiskal dan lingkungan
- e. Mendukung tujuan pembangunan rendah karbon (carbon credit PAD)

Sampah bukan musuh fiskal. Ia adalah aset yang tertidur, yang jika disentuh oleh sistem dan teknologi, bisa berubah menjadi emas sirkular bagi kas daerah. Dengan pendekatan ekonomi sirkular digital berbasis nagari, Pesisir Selatan dapat menjadi model pengelolaan sampah berbasis PAD pertama di Sumatera Barat.

4h. Hilirisasi Gambir dan Penerapan IoT pada Perkebunan: Strategi Transformasi Komoditas Tradisional Menjadi Sumber PAD Modern

Komoditas gambir telah lama menjadi ciri khas kawasan selatan Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya di Kecamatan Lunang, Lengayang, dan Sutera. Saat ini, sebagian besar produksi gambir hanya dijual dalam bentuk blok mentah, tanpa nilai tambah dan tanpa kontribusi yang berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ironisnya, dalam rantai pasok nasional maupun global, ekstrak catechin dari gambir Pessel digunakan oleh industri farmasi, kosmetik, dan makanan—tetapi keuntungannya dinikmati oleh daerah lain.

Melihat potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu mengambil langkah strategis melalui program hilirisasi gambir yang tidak hanya mengandalkan pengolahan fisik, tetapi juga didukung oleh teknologi digital berbasis Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan efisiensi budidaya dan kualitas produk. Pendekatan ini akan mentransformasi sektor pertanian konvensional menjadi sumber ekonomi modern yang berkontribusi langsung terhadap PAD melalui lisensi, produksi bersama BUMD, dan integrasi ke pasar digital lokal dan ekspor mikro.

Langkah-Langkah Strategis Implementasi

1. Pengorganisasian Petani dan Kelembagaan Produksi:

- Membentuk **koperasi petani gambir** dan **Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)** pengolahan gambir di setiap kecamatan potensial.
- Koperasi ini akan menjadi mitra utama BUMD “Pessel Agroindustri” yang dikelola sebagai unit usaha hilirisasi daerah.

2. Penerapan Teknologi IoT untuk Budidaya dan Panen:

- Pemasangan **sensor kelembaban tanah, pencahayaan, dan suhu daun** untuk menentukan waktu panen optimal.
- Sistem dashboard IoT disediakan oleh mitra startup pertanian seperti **eFishery AgriTech** atau **RiTx Bertani**, yang menghubungkan data kebun dengan koperasi dan BUMD.

3. Pendirian Mini Plant Ekstraksi Catechin:

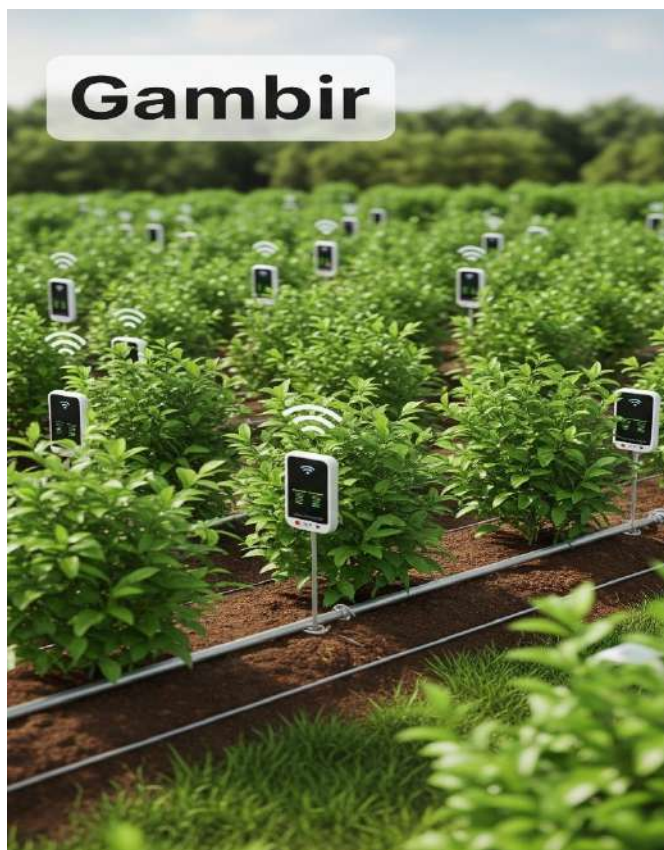
- Pabrik kecil berbasis **ekstraksi etanol atau air panas** (hydro-extraction) dibangun dengan kapasitas 100 kg/hari, menggunakan alat sederhana hasil kolaborasi dengan LIPI atau BRIN.
- Produk hilir berupa: **pasta catechin, teh herbal gambir, sabun antibakteri gambir, dan kapsul luka herbal**.

4. Sertifikasi dan Branding Produk:

- Produk akan diberi **label resmi “Gambir Pessel”** dan didaftarkan sebagai **produk unggulan daerah** yang hanya bisa digunakan jika membayar royalti atau lisensi.

5. Penjualan Digital & Skema Pasar Lokal–Ekspor:

- Produk dijual melalui:
 - **PasarNagari.id** (e-commerce lokal)
 - E-katalog pengadaan
 - Marketplace ekspor mikro (Shopee, Tokopedia Internasional)
 - Sistem bundling untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)



Kerja Sama Pihak Ketiga dan Pemanfaatan Aset Daerah

- **Inbreng Aset Daerah:**
Pemda menyediakan **eks gedung UPT Pertanian di Lunang atau Sutera** sebagai lokasi mini plant, berikut lahan ±1.000 m² sebagai kawasan industri herbal rakyat.
- **BUMD atau Perusda:**

Dibentuk BUMD baru atau divisi khusus di bawah **Perusda Agroindustri Pessel** untuk mengelola produksi, pengemasan, dan lisensi produk hilir gambir.

- **Mitra Eksternal:**

- **BRIN / LIPI:** Riset & teknologi ekstraksi
- **Unand Fakultas Farmasi:** Formulasi produk dan uji klinis herbal
- **Bank Nagari / LPDB:** Pembiayaan koperasi produksi
- **Startup AgriTech:** IoT dan pemantauan budidaya

Estimasi Dampak Fiskal dan Sumber PAD

Komponen Hilirisasi Gambir	Estimasi PAD Tahunan (Rp)
Fee lisensi dan royalti produk	Rp 300.000.000 – Rp 500.000.000
Retribusi produksi BUMD Herbal	Rp 200.000.000 – Rp 300.000.000
Pajak mikro dari koperasi	Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000
Penjualan via marketplace	Rp 100.000.000 – Rp 200.000.000
Total Potensi PAD	± Rp 800 juta – Rp 1,1 miliar/tahun

Tahapan Implementasi (2025–2029)

Tahun	Kegiatan Kunci
2025	Identifikasi petani, pembentukan koperasi, pemetaan aset daerah, MoU teknologi IoT
2026	Instalasi pabrik kecil, pelatihan, uji coba panen digital, produksi terbatas
2027	Sertifikasi produk, aktivasi marketplace, mulai branding & lisensi
2028	Ekspansi pasar lokal dan regional, optimalisasi produksi & diversifikasi produk
2029	Replikasi ke nagari lain, ekspor mikro, kontribusi PAD penuh

Hilirisasi gambir dengan dukungan teknologi digital adalah **wujud konkret transformasi fiskal berbasis potensi lokal**. Program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mengubah Kabupaten Pesisir Selatan menjadi pelopor **ekonomi agraria digital** berbasis kekayaan hayati. Dengan skema kerja sama koperasi–Perusda–teknologi, gambir yang dulunya simbol kemiskinan, kini menjadi **sumber PAD baru yang adil, lestari, dan berkelanjutan**.

4i. Industri Kosmetik, Obat Tradisional, dan Penelitian Farmasi: Hilirisasi Biofarmaka Lokal sebagai Sumber PAD Baru

Kabupaten Pesisir Selatan dianugerahi keanekaragaman hayati tropis yang luar biasa: gambir, daun sirih, jahe merah, serai wangi, kayu manis, temulawak, dan madu hutan. Tanaman-tanaman ini selama ini hanya dimanfaatkan secara tradisional di tingkat rumah tangga dan dijual mentah oleh petani dengan nilai ekonomi rendah. Padahal, jika diolah secara tepat, komoditas tersebut dapat menjadi bahan baku industri kosmetik herbal, suplemen kesehatan, dan produk farmasi alami, yang memiliki pasar domestik dan global yang sangat besar—terutama di sektor produk halal, kecantikan organik, dan wellness.

Saat ini Indonesia hanya mengekspor bahan mentah farmasi (crude drug), sementara nilai tambah industri dimiliki oleh negara lain. Maka, Pesisir Selatan memiliki peluang besar untuk mendirikan Mini Industri Kosmetik & Obat Tradisional Daerah, berbasis koperasi dan BUMD, untuk mengolah kekayaan hayati menjadi produk bernilai tinggi dan legal (bersertifikat BPOM dan Halal) yang sekaligus menjadi sumber PAD inovatif dan berkelanjutan.

Langkah-Langkah Strategis

1. Pemetaan Biofarmaka Lokal dan Kluster Tanaman Obat

Melalui dukungan Dinas Pertanian dan BRIN, Pemkab memetakan sentra tanaman obat (TOGA) di nagari:

- Gambir di Lunang
- Daun sirih dan serai di Sutera dan Lengayang
- Jahe merah dan temulawak di Bayang Utara
- Madu hutan di Lunang dan Silaut

Data ini digunakan untuk menentukan **kluster produksi bahan baku kosmetik dan obat herbal**.

2. Pendirian Mini Plant Kosmetik & Herbal

Gedung eks Dinas Perikanan atau bekas UPT bisa dialihfungsikan sebagai:

- Tempat produksi sabun cair herbal, krim anti jerawat, teh herbal, kapsul albumin

- Ruang riset dan pelatihan formulator kosmetik lokal
- Gudang & ruang inkubasi koperasi herbal

Peralatan sederhana seperti pengaduk sabun, alat ekstraksi, mesin pengisi kemasan, dan label printer disiapkan melalui dana APBD, KPBU, atau kemitraan CSR.

3. Pembentukan Perusda dan Koperasi Produksi

- Pemda membentuk unit usaha baru di bawah Perusda Pessel Agroindustri
 - Aset berupa gedung dan peralatan di-inbrenge ke Perusda
 - Koperasi Herbal Nagari sebagai pelaksana produksi harian
 - Perusda menjadi pemegang lisensi, merek, dan distributor utama
- Produk yang dihasilkan diberi label resmi seperti:

“Herbal Gadang – Kosmetik dan Suplemen Asli Pesisir Selatan”

“Pessel Organik – Sabun & Krim dari Tanaman Lokal”

4. Sertifikasi, Branding, dan Distribusi Digital

- Kerja sama dengan BPOM untuk uji mutu
- Sertifikasi halal dari LPPOM MUI atau Badan Halal Unand
- Pelatihan desain kemasan dan branding oleh akademisi (UNP, ISI)
- Distribusi melalui:
 - E-Katalog daerah
 - Marketplace (Shopee, Tokopedia)
 - Toko oleh-oleh pariwisata dan Carocok Mart

Kerja Sama & Pemanfaatan Aset Daerah

Komponen	Detail
Aset Daerah	Gedung eks Dinas Kelautan di Salido, atau bekas kantor UPT pertanian
Inbrenge ke	Perusda Agroindustri sebagai unit kosmetik dan herbal
Mitra Teknis	BRIN, Fakultas Farmasi Unand, Politeknik Pertanian, PT Kimia Farma, Bio Farma
Mitra Pembiayaan	LPDB-KUMKM, CSR perusahaan nasional, dana KPBU daerah



Estimasi PAD dan Dampak Ekonomi

Sumber PAD	Estimasi (Rp/tahun)
Fee lisensi merek & retribusi produksi	Rp 300 – 500 juta
Royalti distribusi dan penjualan online	Rp 400 – 600 juta
Pajak mikro koperasi produksi kosmetik/herbal	Rp 100 – 150 juta
Retribusi pasar & e-Katalog	Rp 100 juta
Total Potensi PAD per Tahun	Rp 900 juta – Rp 1,35 M

Tahapan Pelaksanaan (2025–2029)

Tahun	Langkah Strategis
2025	Pemetaan biofarmaka lokal, alih fungsi aset, pembentukan koperasi & Perusda
2026	Pelatihan, instalasi alat produksi, uji BPOM dan Halal, produksi awal
2027	Distribusi digital, promosi nasional, rekrut reseller
2028	Ekspansi produk: kapsul herbal, skincare, teh terapi
2029	Penetrasi ekspor mikro: Malaysia, Singapura, Afrika, diaspora

Industri kosmetik dan herbal daerah berbasis komoditas lokal bukan sekadar sektor baru PAD, tetapi **gerakan kedaulatan bioekonomi daerah**. Dengan pendekatan hilirisasi, legalitas, digitalisasi, dan branding yang kuat, Kabupaten Pesisir Selatan dapat menjadi pelopor **kosmetik halal tropis Indonesia** yang tumbuh dari nagari, dikelola bersama, dan berkontribusi langsung bagi keuangan daerah.

4j. Pusat Ekosistem Digital Sumbar: Pesisir Selatan sebagai Simpul Transformasi Ekonomi Digital Nagari

Transformasi digital bukan hanya sebuah tren global, tetapi juga kebutuhan struktural bagi daerah yang ingin memperluas basis ekonominya dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki posisi geografis dan sosial-budaya yang sangat strategis untuk menjadi simpul pertumbuhan digital di kawasan selatan Sumatera Barat.

Dengan populasi usia produktif tinggi, persebaran UMKM yang luas, dan potensi kekayaan budaya yang melimpah, Pessel dapat mengembangkan **Pusat Ekosistem Digital Sumbar (PEDD)**—sebuah pusat inovasi daerah yang menginkubasi ekonomi kreatif digital, marketplace lokal, pelatihan teknologi, dan produksi konten digital. Inisiatif ini akan menghubungkan nagari-nagari dengan ekonomi digital, menciptakan nilai tambah baru, serta membuka jalur PAD dari lisensi digital, royalti konten, dan retribusi ekonomi daring.

Langkah-Langkah Strategis

1. Konversi Aset Daerah menjadi Creative & Digital Hub

- Bangunan eks Dinas Koperasi di Painan atau gedung lama kantor bupati disiapkan sebagai **Digital Hub Daerah**
- Fasilitas meliputi:
 - Studio konten (video, podcast, desain grafis)
 - Inkubator startup
 - Co-working space
 - Lab pelatihan coding, desain UI/UX, dan e-commerce

2. Pembentukan Perusda Digital dan Koperasi Kreatif

- Dibentuk unit usaha digital daerah di bawah **Perusda Pessel Digital Nusantara**
- Mitra produksi konten digital: komunitas muda, sekolah, pemuda nagari
- Diciptakan **Koperasi Kreatif Nagari (KKN)** untuk memproduksi aset digital dan mengelola lisensi daerah
- Produk digital yang bisa dilisensikan:
 - NFT Jam Gadang Painan
 - Tari adat & musik tradisional
 - Video pariwisata dan pendidikan
 - Sertifikat digital halal, pelatihan, dan lisensi usaha

3. Pengembangan Marketplace dan Ekosistem Digital Daerah

- Peluncuran platform digital daerah: **PesselMart.id** (produk UMKM, seni, dan kuliner)
- Peluncuran portal digital budaya dan edukasi: **VisitPessel.com**
- Pembuatan sistem QRIS berbasis Nagari & sistem langganan konten edukatif

4. Digitalisasi UMKM dan Ekonomi Kreatif Nagari

- Pelatihan 1.000 UMKM menjadi merchant digital
- Integrasi QRIS, invoice digital, dan pelaporan omzet daring
- Pemberian insentif fiskal untuk konten digital bersertifikat Pessel

Kemitraan & Pemanfaatan Aset Daerah

Komponen	Detail
Aset Daerah	Eks kantor Dinas Koperasi Painan (atau Gedung Kebudayaan Carocok)
Inbreng ke	Perusda Pessel Digital Nusantara (Pusat Ekosistem Digital Sumbar)

Mitra Teknis	Kominfo RI, Tokopedia Academy, Telkom Indonesia, Startup digital lokal
Mitra Komunitas	Pelajar, santri, karang taruna, komunitas film dan fotografi



Estimasi PAD dari Ekosistem Digital

Sumber PAD	Estimasi per tahun (Rp)
Fee lisensi konten digital daerah	Rp 300 – 500 juta
Pajak mikro pelaku ekonomi kreatif	Rp 200 – 400 juta
Fee platform (marketplace & QRIS)	Rp 150 – 300 juta
Retribusi co-working & pelatihan	Rp 100 – 200 juta
NFT, e-ticketing, dan sertifikat digital	Rp 100 – 150 juta
Total Potensi PAD per Tahun	Rp 850 juta – Rp 1,55 M

Tahapan Implementasi (2025–2029)

Tahun	Agenda Strategis
2025	Pemilihan aset digital hub, pembentukan Perusda dan koperasi kreatif
2026	Instalasi studio konten, pelatihan pemuda digital, peluncuran NFT budaya lokal
2027	Aktivasi marketplace, sistem lisensi, dan event kreatif tahunan
2028	Monetisasi aset budaya digital, koneksi e-katalog nasional, ekspor digital
2029	Ekspansi kerja sama konten digital lintas daerah dan diaspora

Pengembangan Pusat Ekosistem Digital di Pesisir Selatan akan menjadikan kabupaten ini bukan hanya penonton era digital, tetapi pemain utama ekonomi kreatif digital berbasis nagari. Transformasi ini akan mendorong inklusi teknologi, membuka peluang kerja baru, memonetisasi budaya lokal, dan membangun sumber PAD baru yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan.

Berikut adalah penyajian lengkap untuk **Subbab 4k – Green Carbon Hub dan Perdagangan Kredit Karbon di Kabupaten Pesisir Selatan**, disusun dalam bentuk:

- Alinea penjelasan berbasis konteks nasional dan global
- Langkah konkret implementasi
- Skema Perusda berbasis aset daerah (inbreng)
- Mitra strategis
- Estimasi PAD dan tahapan implementasi

4k. Green Carbon Hub: Perdagangan Kredit Karbon dan Monetisasi Ekosistem Hijau Nagari

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki bentang alam luar biasa yang mencakup kawasan hutan lindung, hutan nagari, mangrove, sawah organik, hingga lahan agroforestri rakyat yang belum banyak disentuh program monetisasi karbon. Dalam konteks global, **perdagangan kredit karbon** kini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang semakin relevan, terutama setelah terbitnya **Peraturan Presiden No. 98/2021** dan **PMK No. 215/2022 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK)** yang membuka peluang daerah untuk mengakses pasar karbon nasional maupun internasional.

Dengan adanya skema **kompensasi terhadap upaya penyerapan emisi**, Pemda kini dapat memonetisasi kawasan hijau yang dikelola oleh nagari dan masyarakat menjadi **aset fiskal** melalui sistem offset karbon. Kabupaten Pesisir Selatan sangat potensial mengambil peran sebagai **Green Carbon Hub Sumatera Barat**, mengingat besarnya tutupan hutan tropis, kawasan mangrove, dan areal pertanian organik.

Langkah-Langkah Strategis

1. Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Hijau Berpotensi Karbon

- Kawasan target:
 - Mangrove Lunang dan Sutera
 - Hutan Nagari Silaut, Bayang Utara, Koto XI Tarusan
 - Sawah organik di Tarusan dan Lengayang
 - Kebun agroforestri gambir dan kopi di Lunang Selatan
- Pemetaan dilakukan dengan teknologi GIS, drone LIDAR, dan integrasi ke **Sistem Registri Nasional (SRN-KLHK)**

2. Sertifikasi Penyerapan Karbon (Carbon Sequestration)

- Bekerja sama dengan lembaga verifikasi nasional (APCC, PT Bumitama, TUV Rheinland) untuk menghitung emisi yang diserap
- Validasi dilakukan melalui SRN dan Kementerian Lingkungan Hidup

Potensi serapan:

40–80 ton CO₂e/ha/tahun

Harga pasar: Rp 75.000 – Rp 150.000/ton

3. Pembentukan BLUD atau Perusda Perdagangan Karbon

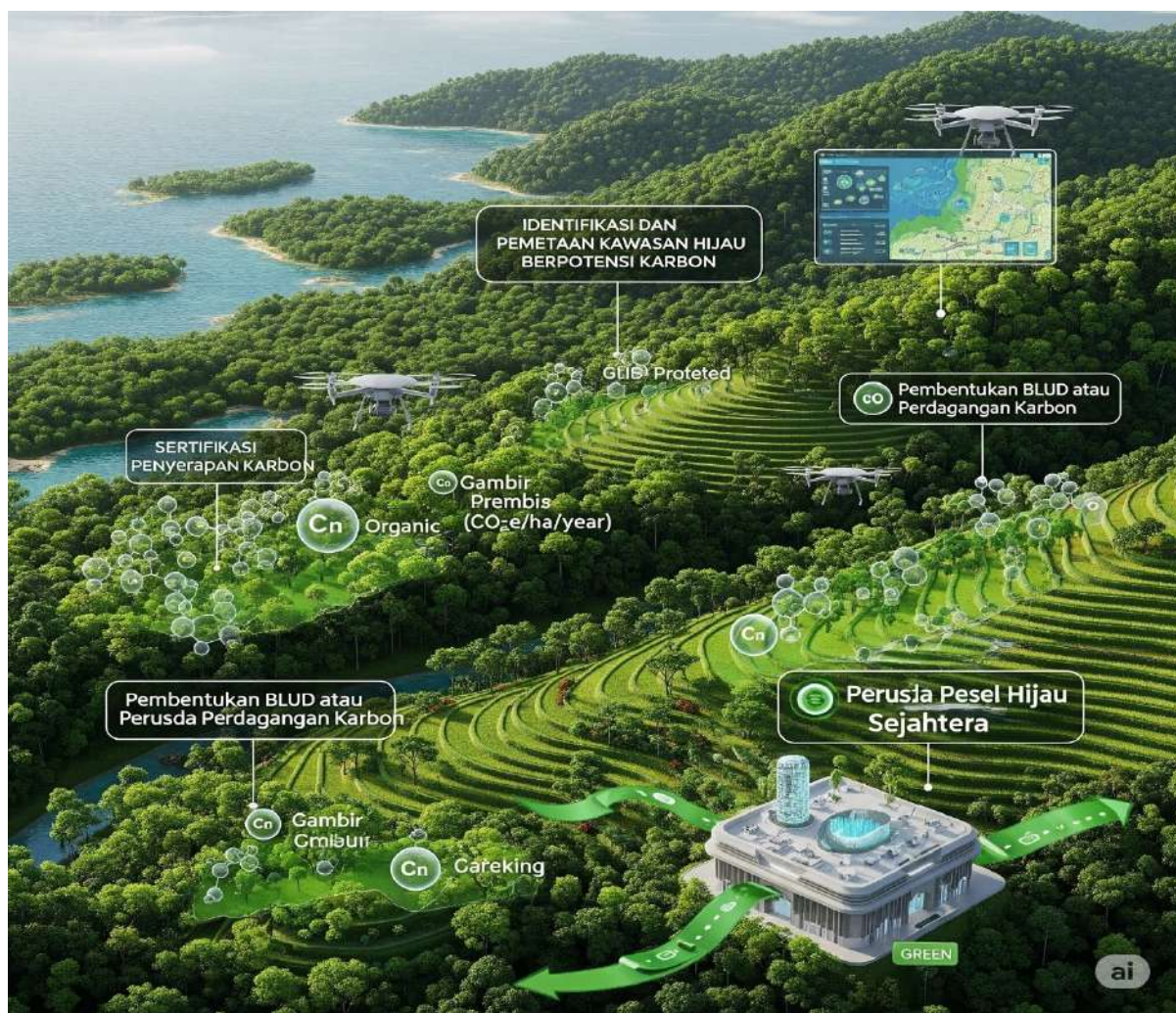
- Perusda “**Pessel Hijau Sejahtera**” dibentuk untuk mengelola perdagangan karbon, CSR hijau, dan insentif konservasi
- Aset yang di-*inbreng*:
 - Kawasan mangrove Pemda
 - Lahan konservasi desa
 - Pusat edukasi karbon di bekas UPT KPHL Lunang
- Tugas Perusda:
 - Mendaftar proyek karbon
 - Mengelola dana kompensasi
 - Mendistribusikan hasil ke masyarakat dan PAD

4. Perdagangan Karbon dan Distribusi PAD

- Perusda akan menjual offset karbon kepada:
 - Perusahaan tambang, semen, atau sawit yang butuh kompensasi
 - Donor internasional (misalnya: Norwegia, Jerman, GCF)
 - Korporasi nasional (Pertamina, PLN, Bank Himbara)

Skema distribusi hasil:

- 40% untuk PAD daerah
- 40% untuk komunitas pengelola hutan
- 20% untuk program konservasi dan reforestasi lanjutan



Mitra dan Dukungan Lembaga

Komponen	Mitra Strategis
Verifikasi karbon	TUV Rheinland, PT APCC, Sucofindo
Mitra akademik	Unand, BRIN, IPB
Mitra donor & buyer	KfW Jerman, Norad, CIF, CSR Telkom, Pertamina
Mitra lokal	Nagari, kelompok tani hutan, karang taruna

Estimasi Potensi PAD dan Dampak

Sumber PAD	Estimasi (Rp/tahun)
Fee transaksi karbon (2–5%)	Rp 1,5 – 2,5 miliar
Jasa konservasi, pelatihan, dan edukasi hijau	Rp 300 – 500 juta
Insentif CSR dan royalti karbon daerah	Rp 500 juta – Rp 1 miliar
Total Potensi PAD	Rp 2,3 – 4 miliar/tahun

Tahapan Implementasi (2025–2029)

Tahun	Kegiatan Strategis
2025	Pemetaan lahan karbon, penyusunan regulasi Perusda, MoU dengan verifier nasional
2026	Pendaftaran proyek karbon di SRN dan validasi emisi, pendirian Pusat Karbon Pessel
2027	Penjualan offset tahap 1, kemitraan CSR nasional

2028	Distribusi insentif ke nagari, ekspansi kawasan karbon baru
2029	Koneksi ke pasar karbon internasional dan sertifikasi global (Gold Standard, Verra)

Green Carbon Hub bukan hanya pendekatan konservasi, tetapi juga model **fiskalisasi sumber daya lingkungan secara berkeadilan**. Dengan membangun Perusda perdagangan karbon, Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan kepemimpinan dalam **transisi ekonomi hijau**, memperkuat PAD, memperkaya nagari, dan ikut menjaga bumi.

Transformasi dari "daerah pinggiran" menjadi **produsen nilai ekonomi karbon** dapat menjadi model nasional dalam era pasca-transisi energi dan perubahan iklim.

4l. Zona Logistik Maritim dan Pasar Ekspor Mikro: Strategi PAD Laut Berbasis Infrastruktur Digital dan Rantai Pasok UMKM

Kabupaten Pesisir Selatan, dengan garis pantai lebih dari 200 km, pelabuhan rakyat di Painan, Salido, dan Tarusan, serta hasil laut melimpah seperti tuna, gurita, kerapu, dan kerang, memiliki potensi besar menjadi simpul ekspor mikro produk kelautan dan UMKM. Namun, hingga kini, rantai logistik ekspor masih belum terstruktur, pelabuhan kecil belum mendukung ekspor langsung, dan pelaku usaha sulit mengakses pasar luar negeri karena keterbatasan agregasi, sertifikasi, dan digitalisasi.

Sejalan dengan strategi hilirisasi dan perluasan ekspor berbasis rakyat dalam RPJMN dan arahan Inpres 1 Tahun 2025, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan pengembangan **Zona Logistik Maritim dan Pasar Ekspor Mikro** sebagai prioritas strategis. Zona ini tidak hanya mendekatkan akses pasar global ke nelayan dan UMKM, tetapi juga menjadi **sumber PAD baru dari jasa logistik, retribusi ekspor, dan lisensi digital**.



Langkah-Langkah Strategis

1. Pengembangan Fisik Zona Logistik Maritim

- Pusat logistik maritim dirancang di Salido dan Tarusan:
 - **Cold Storage** untuk ikan beku & ekspor
 - **Packing House** mini untuk abon, fillet, rendang laut
 - **Gudang agregator ekspor mikro**
 - **Digital Docking System** (sistem pelabuhan pintar berbasis AI)
- Pekerjaan awal menggunakan inbreng aset: **eks pelabuhan rakyat Salido**, lahan pemda ±2 ha

2. Pendirian Marketplace Ekspor Lokal: PesselExport.id

- Platform digital daerah untuk ekspor mikro, didukung QRIS, logistik, invoice internasional, dan sertifikasi halal
- Produk awal:
 - Rendang tuna beku
 - Abon gurita
 - Kerupuk ikan & udang
 - Teh herbal gambir dan serai
- Platform dikelola oleh Perusda Ekspor Pessel dan koperasi eksportir

3. Pembentukan Perusda Logistik dan Ekspor

- Nama: **Perusda Pesisir Niaga Internasional**
- Fungsi:
 - Mengelola fasilitas logistik
 - Menerbitkan lisensi ekspor mikro
 - Menyediakan layanan gudang beku, kemasan, tracking DHE
- Pemda meng-inbreg:
 - Aset pelabuhan mini
 - Bangunan eks Dinas Kelautan
 - Cold storage bantuan KKP

4. Integrasi dengan Pelabuhan Teluk Bayur dan Bea Cukai

- Produk dikirim via pelabuhan rakyat → agregasi di Teluk Bayur → ekspor
- Perusda menjalin MoU dengan:
 - **INSW** (Indonesia National Single Window)
 - **Bea Cukai Padang**
 - **Kementerian Perdagangan**
 - **Bank Indonesia** (pengelolaan DHE)

Mitra dan Pemanfaatan Aset

Komponen	Mitra dan Aset
Aset Daerah	Pelabuhan rakyat Salido, gudang Dinas Kelautan, tanah Pemda
Mitra Digital	Tokopedia Ekspor, Kominfo, Bank Indonesia, PT Pos Logistik
Mitra Pembeli	Diaspora Malaysia–Timur Tengah, Singapore Buyers Group
Mitra Legalitas	BPOM, LPPOM MUI, BRIN, Unand – sertifikasi & ekspor

Estimasi PAD dari Zona Ekspor Maritim

Sumber PAD	Estimasi (Rp / Tahun)
Retribusi logistik dan cold storage	Rp 400 – 600 juta
Fee lisensi ekspor dan marketplace	Rp 300 – 500 juta
Retribusi pelabuhan mini & dok digital	Rp 200 – 300 juta
Royalti digital produk & sertifikasi halal	Rp 100 – 200 juta
Total Potensi PAD	Rp 1,2 – 1,6 miliar

Tahapan Implementasi (2025–2029)

Tahun	Agenda Strategis
2025	Identifikasi aset, MoU mitra ekspor, pelatihan koperasi eksportir
2026	Renovasi pelabuhan mini, instalasi cold storage, peluncuran platform ekspor
2027	Aktivasi ekspor mikro, integrasi INSW & tracking DHE
2028	Ekspansi pasar ekspor dan produk halal premium
2029	Replikasi zona ekspor ke Lunang dan Amping Parak

Zona Logistik Maritim dan Pasar Ekspor Mikro merupakan jawaban konkret terhadap tantangan keterisolasian pelaku ekonomi pesisir dan UMKM lokal terhadap pasar global. Dengan mengembangkan sistem ekspor mikro yang efisien, digital, dan berbasis masyarakat, Kabupaten Pesisir Selatan dapat menciptakan **PAD baru dari laut yang inklusif, berbasis komunitas, dan siap ekspor**.

Berikut adalah penyajian lengkap dan sistematis untuk **Subbab 4m – Perikanan Laut dan Air Tawar: Hilirisasi Komoditas Spesifik sebagai Sumber PAD Pesisir Selatan**, disusun dalam bentuk:

- Alinea naratif berbasis fakta
- Langkah-langkah strategis
- Kelembagaan dan pemanfaatan aset daerah
- Kemitraan lintas sektor
- Estimasi PAD tahunan
- Tahapan pelaksanaan 2025–2029

4m. Perikanan Laut dan Air Tawar: Hilirisasi Komoditas Spesifik sebagai Sumber PAD Inklusif dan Berkelanjutan

Kabupaten Pesisir Selatan adalah daerah pesisir dengan garis pantai sepanjang ±218 km serta memiliki kawasan darat dan dataran rendah yang cocok untuk perikanan air tawar. Sektor perikanan menjadi tulang punggung mata pencaharian masyarakat di kecamatan seperti **Lunang, Sutera, Lengayang, Koto XI Tarusan, dan Batang Kapas**. Namun sayangnya, meski produksinya tinggi, kontribusi sektor ini terhadap **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** masih sangat rendah karena minimnya hilirisasi, lemahnya kelembagaan, dan belum adanya sistem fiskalisasi budidaya dan penjualan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk membalikkan kondisi ini dengan mengembangkan **sentra budidaya perikanan laut dan air tawar berbasis IoT, koperasi produksi, rumah pengolahan modern, dan ekosistem pasar digital**. Pendekatan ini akan menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja, dan menciptakan sumber PAD yang baru dan berkelanjutan.

Komoditas Spesifik yang Dikembangkan

Jenis Ikan Laut	Jenis Produk Hilir
Tuna sirip kuning, cakalang	Fillet beku, rendang tuna, abon, sarden kaleng
Kerapu tikus, kakap putih	Live fish, fillet premium, sashimi, daging asap
Gurita (<i>octopus cyanea</i>)	Kerupuk gurita, seafood frozen, mie gurita, snack

Jenis Ikan Air Tawar	Jenis Produk Hilir
Nila merah, patin, lele	Bakso ikan, fillet, pepes, makanan MBG
Ikan gabus	Ekstrak albumin, kapsul herbal, bubuk pengobatan
Belut, mujair	Sambal belut, sate belut, keripik gurih

Langkah-Langkah Strategis

1. Klasterisasi Budidaya Perikanan Laut dan Tawar

- Budidaya laut (keramba jaring apung) di Amping Parak, Salido, Carocok Tarusan
- Budidaya air tawar (bioflok, kolam terpal) di Lengayang, Sutera, Lunang
- Pelatihan teknologi IoT (sensor kualitas air, suhu, pakan otomatis)
- Sistem dashboard digital untuk memantau panen, omzet, dan kewajiban fiskal

2. Pendirian Rumah Produksi dan Mini Cold Storage

- Setiap zona produksi memiliki unit:
 - Rumah pengolahan (abon, bakso, fillet, nugget)
 - Cold storage 3–5 ton kapasitas
- Produk dilabeli “**Ikan Pessel**”, dan wajib masuk sistem lisensi dan pelaporan PAD

3. Aktivasi Pasar Ikan Digital: PesselFish.id

- Platform e-commerce ikan segar dan olahan
- Sistem rating, pembayaran QRIS, pengemasan, dan logistik koperasi
- Integrasi langsung dengan MBG, warung sehat nagari, dan restoran sekolah

4. Pembentukan Koperasi & Perusda Perikanan

- Koperasi budidaya → pelaksana harian budidaya dan pengolahan
- Perusda “Pessel Bahari Sejahtera” → pemilik lisensi, marketplace, dan pengelola aset

5. Sertifikasi Halal, Ekspor Mikro, dan Paspor Ekspor

- Produk unggulan diberi sertifikasi halal & NIB ekspor
- Ekspor mikro difokuskan ke Malaysia, Timur Tengah, diaspora Asia Selatan
- Sistem Paspor Ekspor Digital → pencatatan DHE, lisensi, dan pajak ekspor



Kemitraan dan Pemanfaatan Aset Daerah

Komponen	Detail
Aset Inbreng	Tanah Pemda (3 lokasi), eks UPT Dinas Kelautan, gudang kosong
Mitra Teknis	eFishery, BRIN, BPOM, KKP, Unand, ISI
Mitra Pembeli	PT Perikanan Nusantara, diaspora Malaysia, supermarket halal
Digital & Keuangan	Kominfo, Bank Nagari, BRI, Gojek Logistics

Estimasi Potensi PAD Tahunan

Sumber PAD	Estimasi (Rp / Tahun)
Fee lisensi produk & retribusi produksi	Rp 400 – 600 juta
Retribusi pasar digital ikan (PesselFish.id)	Rp 200 – 300 juta
Pajak mikro koperasi perikanan	Rp 150 – 200 juta
Royalti ekspor mikro dan produk halal	Rp 300 – 500 juta
Total Potensi PAD Tahunan	Rp 1,1 – 1,6 miliar

Tahapan Pelaksanaan (2025–2029)

Tahun	Agenda Strategis
2025	Identifikasi komoditas unggulan, pelatihan IoT budidaya, pendirian koperasi
2026	Pembangunan rumah produksi, pemasangan cold storage, aktivasi dashboard panen
2027	Sertifikasi halal & uji ekspor, peluncuran PesselFish.id
2028	Skala produksi, aktivasi Paspor Ekspor UMKM
2029	Ekspansi pasar ekspor dan distribusi PAD melalui sistem daring & koperasi

Perikanan adalah emas biru Pesisir Selatan. Dengan strategi klasterisasi budidaya, penguatan kelembagaan koperasi, sistem pelaporan digital, dan integrasi ke pasar ekspor mikro, kabupaten ini tidak hanya dapat

menaikkan pendapatan nelayan dan petani ikan, tetapi juga menciptakan **sumber PAD yang tangguh, terukur, dan berdaya saing global**. Inisiatif ini juga mendukung program pangan sehat nasional, ketahanan gizi lokal, dan penciptaan lapangan kerja berbasis potensi asli nagari.

4n. Agrowisata dan Kampung Hortikultura Berbasis Digital: Integrasi Pertanian, Wisata, dan Retribusi PAD

Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya kaya akan pantai dan hasil laut, tetapi juga memiliki kawasan dataran tinggi dan perbukitan yang sangat cocok untuk pengembangan **hortikultura tropis** seperti cabai, tomat, jeruk, durian, manggis, salak, hingga bunga hias. Namun, mayoritas hasil hortikultura masih dijual dalam bentuk mentah dan musiman, dengan ketergantungan tinggi pada tengkulak. Belum ada integrasi yang kuat antara pertanian, pariwisata, dan digitalisasi sebagai sumber PAD.

Oleh karena itu, Pemkab dapat mengembangkan **Kampung Hortikultura Digital & Agrowisata**, sebuah konsep yang menggabungkan pertanian bernilai tinggi dengan destinasi wisata edukatif dan digitalisasi transaksi. Model ini akan menjadi sumber PAD dari **retribusi masuk, lisensi merek sayuran, wisata edukasi, dan penjualan produk online**.

Komponen Strategis dan Implementasi

1. Lokasi Prioritas dan Komoditas Unggulan

- Kawasan:
 - Bukit Bendera di Batang Kapas
 - Air Haji dan Bayang Utara (buah tropis & sayuran)
 - Lengayang (sentra cabai organik & tomat dataran tinggi)
- Komoditas unggulan:
 - Cabai rawit, tomat unggul, durian lokal, manggis, stroberi, melon
 - Bunga potong & tanaman hias (anggrek, krisan)

2. Pengembangan Sarana Agrowisata Edukatif

- Rumah kaca (greenhouse) teknologi rendah hingga medium (hidroponik, smart irrigation)
- Kafe edukasi pertanian, kebun petik buah, wisata tanam panen
- Tracking panen via QR Code → bisa ditelusuri oleh pengunjung
- Tiket masuk, booth hasil panen, dan food court lokal dikelola oleh koperasi nagari

3. Digitalisasi dan Branding Produk Hortikultura

- Semua produk hortikultura dilabeli “**Hijau Pessel**”
- Penjualan dilakukan di marketplace khusus: **KampungHijau.id**
- Sertifikasi organik, halal, dan pasar premium sekolah/koperasi MBG

4. Kelembagaan dan Skema Fiskal

- Koperasi hortikultura sebagai pelaksana
- Perusda Pangan atau pariwisata menjadi mitra lisensi, penjual tiket, dan penyedia branding
- Aset inbreng: lahan kebun percontohan milik pemda, gedung UPT pertanian, dan kios kosong

Mitra Potensial

Mitra Kelembagaan	Peran
Dinas Pertanian Sumbar	Bibit, pelatihan, pupuk organik
Bappenas/Ditjen Hortikultura	Dana DAK tematik hortikultura
Unand/Politanik	Pendampingan dan digitalisasi pertanian
Startup Agritech (RiTx, eFarming)	IoT dan pelatihan smart farming



Estimasi Potensi PAD

Sumber PAD	Estimasi (Rp/tahun)
Retribusi agrowisata (tiket masuk, booth)	Rp 200 – 300 juta
Lisensi branding produk “Hijau Pessel”	Rp 150 – 250 juta
Penjualan produk via marketplace	Rp 100 – 200 juta
Pajak mikro dan retribusi koperasi	Rp 100 juta
Total Potensi PAD	Rp 550 – 850 juta/tahun

Tahapan Implementasi (2025–2029)

Tahun	Agenda Strategis
2025	Penentuan lokasi, pelatihan petani, pembangunan rumah kaca mini
2026	Aktivasi wisata petik buah dan sistem digital QR code hasil panen
2027	Peluncuran marketplace dan sertifikasi “Hijau Pessel”
2028	Ekspansi produk hortikultura dan sistem pelacakan hasil tani
2029	Skala besar: kerja sama ekspor buah tropis lokal dan sistem retribusi terintegrasi

Integrasi pertanian bernilai tinggi, wisata edukatif, dan sistem digital akan menjadi tonggak baru diversifikasi sumber PAD Pesisir Selatan. Kampung Hortikultura bukan hanya menjual produk, tapi **menjual pengalaman, pengetahuan, dan rasa lokal**. Dengan sistem fiskalisasi modern dan partisipatif, sub-sektor ini bisa menjadi **model ekonomi berbasis desa dan alam** yang sangat relevan dalam era transisi ekologis.

4o. Data Center Daerah: Infrastruktur Digital Strategis untuk Kedaulatan Data dan Peningkatan PAD Berbasis Layanan Teknologi

Di era ekonomi digital dan pemerintahan berbasis elektronik, **data menjadi aset strategis yang setara dengan kekayaan sumber daya alam**. Pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan besar terkait tata

kelola data yang terpecah, tidak terstandar, dan rentan terhadap kebocoran. Di sisi lain, kebutuhan terhadap **penyimpanan, pengolahan, dan pengamanan data publik** terus meningkat seiring dengan digitalisasi layanan publik, sistem perpajakan, QRIS, sekolah digital, kesehatan daring, serta pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki luas geografis besar dan kompleksitas data nagari, Pesisir Selatan memiliki alasan kuat untuk membangun **Data Center Daerah (DCD)** yang modern, efisien, dan produktif. Lebih dari itu, data center ini **tidak hanya sebagai infrastruktur teknis**, tetapi juga sebagai **model bisnis fiskal digital** yang mampu menciptakan PAD dari layanan penyimpanan dan integrasi data bagi OPD, nagari, sekolah, koperasi, BUMD, bahkan sektor swasta digital.

Fungsi Strategis Data Center Daerah

Fungsi	Uraian
Pusat Layanan Data Terpadu	Menyimpan dan mengelola seluruh data fiskal, kependudukan, aset, pendidikan, kesehatan, dan PAD
Pusat Layanan QRIS & Pembayaran Daerah	Menjadi server lokal yang menyimpan data transaksi pajak dan retribusi berbasis QRIS daerah
Hosting Digital Nagari dan Sekolah	Menyediakan cloud service untuk website nagari, dashboard sekolah, dan koperasi digital
Cloud UMKM dan Ekosistem Bisnis Daerah	Menyediakan penyimpanan digital murah untuk UMKM, koperasi, marketplace, hingga NFT daerah
Big Data Analitik dan AI Fiskal	Menyediakan machine learning untuk proyeksi PAD, analisis belanja, dan prediksi kebutuhan layanan publik

Langkah-Langkah Strategis Pembangunan

1. Identifikasi Lokasi dan Aset

- Eks bangunan Kantor Dinas Kominfo atau ruang gedung BLK lama dijadikan lokasi server room utama
- Aset di-*inbrent* ke Perusda Teknologi Digital Daerah

2. Desain Infrastruktur

- Tier III Data Center (on-premise hybrid)
- Redundant power system, pendingin, firewall & enkripsi
- 30–50 rak server, koneksi fiber dedicated 1–10 Gbps

3. Pembentukan BUMD Teknologi Digital

- Nama: **Perusda Pessel Digital Solusi**
- Fungsi:
 - Operator teknis data center
 - Penyedia layanan hosting & pemrosesan data
 - Penyedia sistem backup untuk OPD dan Nagari

4. Pemasaran Layanan dan Monetisasi

- Menyewakan cloud storage kepada:
 - OPD (dashboard fiskal, perpajakan, pendidikan)
 - Nagari (sistem keuangan, e-voting, data warga)
 - Sekolah dan UMKM (website, e-commerce, data akademik)
 - Koperasi (server transaksi)
- Pelatihan teknologi digital dan pengelolaan dashboard

Mitra Strategis dan Potensi Kerja Sama

Komponen	Mitra Strategis
Infrastruktur	Kominfo RI, PT Telkom, DELL, Huawei Cloud
SDM & pelatihan	Poltek Negeri Painan, Unand, Cisco Academy, BPPTIK
Hukum & keamanan	BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), Kemendagri
Komersialisasi	UMKM digital, BUMNag, koperasi, marketplace lokal

Estimasi Potensi PAD Tahunan

Sumber PAD	Estimasi (Rp / Tahun)
Fee layanan cloud storage OPD & nagari	Rp 200 – 300 juta
Penyewaan hosting UMKM dan koperasi	Rp 150 – 250 juta
Pelatihan digital dan sertifikasi teknis	Rp 100 – 200 juta
Pajak mikro sektor digital daerah	Rp 100 juta
Total Potensi PAD Tahunan	Rp 550 – 850 juta

Tahapan Implementasi (2025–2029)

Tahun	Agenda Strategis
2025	Identifikasi lokasi, infrastruktur dasar, MoU Telkom–Kominfo
2026	Instalasi server, pembentukan Perusda, pelatihan SDM teknis
2027	Aktivasi sistem data OPD & dashboard PAD
2028	Komersialisasi cloud untuk koperasi, UMKM, sekolah
2029	Skala besar: ekspor layanan hosting digital lintas daerah (Nagari Cloud Sumbar)

Data Center Daerah bukan sekadar infrastruktur IT, tetapi **jantung kedaulatan fiskal dan ekonomi digital** Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan pendekatan ekosistem digital daerah, layanan berbasis cloud, dan integrasi antar sektor, Pessel tidak hanya bisa menciptakan sumber PAD baru, tetapi juga menjadi **motor penggerak literasi digital, ketahanan siber, dan transformasi ekonomi nagari berbasis teknologi**.

4p. Pabrik Drone dan Teknologi UAV: Industri Strategis Berbasis Inovasi Lokal untuk Keamanan, Pertanian, dan PAD Daerah

Di era industri 4.0, **drone (UAV – Unmanned Aerial Vehicle)** bukan lagi teknologi eksklusif militer, tapi telah merambah ke sektor pertanian presisi, pemetaan, penanggulangan bencana, pengawasan maritim, dan logistik jarak pendek. Nilai industri drone global diproyeksikan mencapai USD 63 miliar pada 2025, dan Indonesia sendiri mengimpor 80% kebutuhan drone dari luar negeri.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki banyak kebutuhan strategis yang dapat dijawab oleh teknologi UAV, seperti:

- Pengawasan kawasan pesisir dan hutan lindung
- Pemetaan lahan sawah, gambir, dan perikanan
- Pemantauan bencana longsor dan banjir
- Pertanian presisi (spraying drone, pemupukan, sensor NDVI)

Dengan potensi SDM teknik dari Politeknik Negeri Painan, dukungan ruang lahan industri, dan visi transformasi ekonomi digital, **Pesisir Selatan layak membangun Pabrik Mini Drone dan Teknologi UAV Daerah** berbasis kemitraan lokal dan nasional.



Produk Drone Prioritas

Tipe Drone	Fungsi Utama
Drone Sprayer (Agrikultur)	Penyemprotan pupuk & pestisida, pemantauan NDVI

Drone Pemetaan	Fotogrametri pertanian, kehutanan, pesisir
Drone Maritim	Pantauan perikanan, pemantauan kapal ilegal
Drone Long-Range Fixed-Wing	Pemantauan bencana, pengawasan tutupan hutan
Mini Drone Pendidikan & UMKM	Edukasi teknik dan produksi film lokal

Langkah-Langkah Strategis

1. Pembangunan Pabrik Mini Drone & Inkubator UAV Lokal

- Lokasi: lahan eks-Dinas Perindustrian atau area UPT teknik lama (± 1 ha)
- Fasilitas:
 - Ruang perakitan dan kalibrasi
 - Lab desain CAD & pencetakan 3D part drone
 - Lapangan uji terbang
 - Area pelatihan teknisi UAV

2. Pembentukan Perusda Teknologi UAV

- Nama: **Perusda Pessel AeroTech Nusantara**
- Fungsi:
 - Riset & produksi drone (jenis tertentu)
 - Pelatihan pilot drone bersertifikat
 - Penjualan, servis, dan sewa UAV (Drone as a Service – DaaS)
 - Lisensi & retribusi bagi usaha drone lokal

3. Kolaborasi dengan SMK, Poltek, dan TNI

- SMK teknik & Poltek Negeri Painan sebagai pengembang SDM dan inovator
- TNI AL dan Kodim setempat sebagai pengguna drone maritim & pemetaan pertahanan wilayah
- Koperasi pertanian & nelayan sebagai pengguna akhir (subsidi drone per kelompok)

4. Komersialisasi & Monetisasi PAD

- Sewa dan lisensi drone bagi sektor pertanian, perkebunan gambir, bencana, dan pemetaan PBB
- Penjualan drone ke sekolah, pemerintah, dan sektor swasta
- Pelatihan pilot drone: Rp 3–5 juta per peserta (BLK teknologi UAV)
- Produk ekspor mikro drone edukasi dan pertanian ke Malaysia, Timor Leste, Afrika

Mitra Strategis

Mitra	Peran
PT Dirgantara Indonesia / UGM UAV Lab	Teknologi dan prototipe UAV lokal
BPPT / BRIN	Riset & validasi sertifikasi produk
Kemenhub & Kominfo	Sertifikasi radio & UAV pilot
Kementan / Kemendagri	Pengguna sektor pertanian & pemetaan desa
Startup UAV (Aeroterrscan, Jatis Mobile)	Komersialisasi dan integrasi cloud drone

Estimasi Potensi PAD Tahunan

Sumber PAD	Estimasi (Rp / Tahun)
Fee produksi & penjualan drone	Rp 500 – 800 juta
Pelatihan & sertifikasi pilot drone	Rp 200 – 300 juta
Retribusi sewa drone pertanian dan pemetaan	Rp 200 – 400 juta
Royalti lisensi & teknologi UAV daerah	Rp 100 juta
Total Potensi PAD Tahunan	Rp 1 – 1,6 miliar



Tahapan Implementasi (2025–2029)

Tahun	Agenda Strategis
2025	Identifikasi lokasi, pelatihan teknisi UAV, MoU dengan PTDI dan BRIN
2026	Pembangunan pabrik, instalasi lab dan uji terbang, uji prototipe lokal
2027	Produksi batch 1 untuk sektor pertanian, peluncuran DaaS (Drone-as-a-Service)
2028	Skema ekspor mikro dan lisensi nasional, sertifikasi pilot lokal
2029	Integrasi UAV dengan sistem data center daerah & dashboard pertanian digital

Pabrik drone dan teknologi UAV daerah merupakan manifestasi dari transformasi digital berbasis kemandirian teknologi lokal. Melalui kolaborasi pendidikan vokasi, startup, dan pemerintah, Kabupaten Pesisir Selatan dapat menjadi pelopor **kota drone Indonesia Barat** yang bukan hanya menyumbang PAD, tetapi juga mencetak talenta teknologi dan memperkuat ketahanan wilayah.

ROADMAP HILIRISASI DRONE KABUPATEN PESIR SELATAN

Sektor Fokus: Pertanian – Kebencanaan – Keamanan Daerah (2025–2030)

Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai **Pusat Inovasi Teknologi Drone Terapan** di Sumatera Barat untuk mendukung ketahanan pangan, mitigasi bencana, keamanan lokal, dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis industri digital.

Tahapan dan Peta Jalan

Tahun	Fokus Pembangunan	Output Kunci
2025	Perencanaan dan Inkubasi Industri	- Peta kebutuhan drone (wilayah pertanian, rawan bencana, zona patroli)- Studi kelayakan pabrik perakitan- MoU dengan startup drone nasional dan universitas teknis- Identifikasi lokasi inkubasi (ex: Lunang, Surantih)

2026	Pengembangan Infrastruktur Dasar dan SDM	- Pendirian Pusat Teknologi Drone Nagari (PusTek Drone)- Pelatihan operator drone pertanian & mitigasi bencana- Pembangunan hanggar mini & lab uji terbang di eks SMK Teknik
2027	Pilot Produksi dan Pengujian Drone Lokal (Agro & Rescue Class)	- Produksi drone semisederhana untuk:▪ Penyemprotan pupuk/air▪ Foto udara lahan▪ Deteksi banjir/longsor- Pengujian untuk kebun gambir, sawah, dan sempadan sungai
2028	Lisensi & Integrasi Sistem Monitoring Daerah (Command Center)	- Integrasi drone ke Dashboard Pemda untuk:▪ Pemantauan musim tanam▪ Deteksi bencana berbasis AI▪ Patroli nagari terpencil- Pendaftaran lisensi dan retribusi pemanfaatan drone
2029	Komersialisasi & Ekspansi Hilirisasi Drone	- Ekspor drone modular kecil untuk nagari lain di Sumbang- Penjualan unit drone kepada kelompok tani, BPBD, dan Pol-PP- Kontrak layanan udara survei dan keamanan lokal
2030	Pusat Teknologi Drone Sumbang dan PAD Digital	- PAD dari lisensi, ekspor unit, servis dan pelatihan- Penguatan branding: "Pessel Drone Center"- Ekosistem digitalisasi drone: Blockchain data udara, asuransi lahan, dan early warning climate

Aplikasi Drone per Sektor

1. Pertanian

- Penyemprotan pupuk cair & pestisida
- Pemetaan lahan & analisis kesuburan berbasis NDVI
- Pendataan potensi tanam & hama

2. Kebencanaan

- Deteksi longsor, banjir, dan abrasi pantai
- Mapping daerah rawan dan jalur evakuasi
- Pengiriman bantuan ringan via drone VTOL

3. Keamanan Lokal

- Patroli wilayah rawan perambahan hutan dan perbatasan nagari
- Pengawasan pasar malam, event budaya, dan zona wisata
- Dukungan untuk Pol-PP dan Damkar dalam crowd monitoring

Potensi Lokasi Industri Drone Lokal

Lokasi	Keunggulan
Lunang Silaut	Akses logistik ke kawasan perbatasan dan lahan pertanian luas
Surantih – IV Jurai	Basis pertanian gambir dan akses ke jalur pantai rawan bencana
SMK Teknik Tarusan	Lokasi inkubasi SDM muda & basis pelatihan robotika
Kawasan Industri Hijau Painan	Integrasi dengan industri digital, logistik, dan energi lokal

Skema KPBU Drone dan Ekosistem Bisnis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan Strategis

- Mendorong hilirisasi teknologi drone terapan (pertanian, bencana, keamanan) melalui kemitraan sektor swasta
- Menghindari beban APBD penuh dengan memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
- Menciptakan sumber PAD baru dari layanan berbasis udara (drone service), penjualan unit, pelatihan, dan lisensi
- Menumbuhkan ekosistem bisnis digital, agro-teknologi, dan logistik berbasis drone di tingkat kabupaten

Struktur Skema KPBU Drone Pessel (Tipe Build–Operate–Transfer)

Komponen KPBU	Penjelasan
Otoritas Penanggung Jawab (PJPK)	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Bupati / Dinas Kominfo / Bappeda)
Badan Usaha Pelaksana	Konsorsium mitra swasta (startup drone, BUMD teknologi, investor lokal)
Obyek KPBU	Pabrik drone mini, sistem layanan udara, pelatihan operator, sistem komando digital

Masa Kerja Sama	10–15 tahun
Sumber Pembayaran	Viability Gap Fund (VGF), PAD sharing dari operasional, dan fee lisensi

Ruang Lingkup KPBU

Komponen Infrastruktur	Dibiayai & Dioperasikan oleh BU	Status Aset
Pabrik drone mini (workshop + QC)	✓	Ditransfer ke Pemda setelah 15 tahun
Command center drone	✓ + Pemda	Aset daerah sejak awal (inbeng)
Sistem pelatihan & sertifikasi	✓	BOT – lisensi eksklusif 10 tahun
Produksi & distribusi unit drone	✓	BUMD mitra / joint venture

Ekosistem Bisnis Drone Daerah

Pelaku Lokal	Peran Bisnis PAD
BUMD Teknologi Daerah	Menjadi mitra resmi operasional dan distribusi
Startup Mitra Drone	R&D, manufaktur, servis, dan penjualan komersial
SMK / Politeknik Lokal	Layanan pelatihan, sertifikasi teknisi/operator
Dinas Pertanian / BPBD / Satpol PP	Konsumen utama layanan drone (kontrak layanan)
Nagari / BUMNag / UMKM	Pelanggan sewa drone pertanian atau keamanan nagari

Skema PAD Sharing dan Layanan

Sumber Pendapatan Drone	Pelaksana (KPBU)	Share PAD ke Pemda
Penjualan unit drone	BU Swasta	5–10% dari harga unit
Kontrak layanan (sewa per hektar/penerbangan)	BU + BUMD	20–30% dari nilai kontrak
Pelatihan operator & sertifikasi	BUMD + Mitra	Flat fee/tahun: Rp 100–200 juta
Lisensi dan perizinan produksi	Pemda	100% ke PAD (retribusi)
Royalti data & gambar udara	BU + Pemda	30–40% hasil jual ke pihak ketiga

Contoh Output Produk Drone KPBU

Tipe Drone	Fungsi	Harga Jual per Unit	Target Pengguna
Drone Agro Mini	Penyemprotan pupuk/pestisida	Rp 15–25 juta	Petani gambir, sawah, koperasi nagari
Drone Mapping	Pemetaan lahan & bencana	Rp 30–50 juta	Dinas Pertanian, BPBD, Bappeda
Drone Patroli VTOL	Keamanan dan crowd monitoring	Rp 40–60 juta	Pol-PP, nagari wisata, pasar

Contoh KPBU Serupa di Indonesia

- KPBU Smart Airport Drone – Banyuwangi: layanan drone untuk mapping runway dan pertanian sekitar bandara
- KPBU Industrial Drone & Geospasial – Bekasi: pengembangan manufaktur dan pusat servis bersama startup lokal
- Kolaborasi Pemkot Semarang x Aeroterras: drone untuk layanan perizinan IMB & pengawasan aset

Langkah-Langkah Akselerasi KPBU Drone

- Feasibility Study oleh Pemda dan mitra independen (dengan dukungan BRIN/Bappenas)
- Penetapan Skema PJP, dan Penawaran Mitra Swasta (market sounding)
- Perda / Perbup Insentif Investasi Drone dan insentif fiskal PAD
- Pembentukan BUMD Teknologi Pessel atau kerja sama dengan BUMD provinsi
- Penyusunan Business Plan, Master Plan Drone, dan SOP Unit KPBU

KPBU bukan hanya cara membangun infrastruktur, tetapi juga cara cerdas membangun teknologi tanpa membebani APBD. Dengan sistem drone sebagai layanan, sumber data, dan produk ekonomi, Pesisir Selatan dapat menciptakan sumber PAD dari udara—secara nyata dan berkelanjutan.

Value for Money Analysis

Komponen	KPBU Drone	Skema Tradisional	Penilaian
Total Biaya Investasi	Rp 45 miliar (oleh mitra swasta)	Rp 50 miliar (APBD)	☑ KPBU lebih efisien
Manfaat fiskal (PAD)	Rp 1–1,5 miliar/tahun (15 tahun)	Rp 0,2–0,4 miliar/tahun	☑ KPBU unggul
Transfer Risiko	60–80% ke swasta	100% ke Pemda	☑ KPBU unggul
Transfer Aset ke Pemda	Ya (tahun ke-15)	Sudah milik sejak awal	🔄 Sama
Inovasi Teknologi & SDM	Dikelola profesional, berkembang	Keterbatasan SDM dan update	☑ KPBU unggul
Fleksibilitas Fiskal Daerah	Tinggi (tidak membebani APBD)	Terbatas, tergantung anggaran	☑ KPBU unggul
VfM Keseluruhan	Rp 18–22 miliar lebih hemat	–	☑ Pilih KPBU

Hasil Simulasi dan Rekomendasi

- Skema KPBU memberikan manfaat fiskal bersih yang signifikan, tanpa membebani belanja modal daerah
- Risiko teknologi dan operasional ditanggung pihak ketiga → Pemda fokus pada regulasi dan pengawasan
- Potensi PAD dari lisensi drone, pelatihan, dan layanan udara → lebih tinggi dari skema konvensional
- Cocok dengan arahan efisiensi belanja Inpres No. 1 Tahun 2025 dan PMK 24/2024 tentang akuntabilitas transfer daerah

4q. Pembangunan PLTS Skala Besar: Energi Surya untuk Efisiensi Fiskal, Transisi Hijau, dan PAD Strategis Pesisir Selatan

Indonesia menargetkan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025 dan Net Zero Emission (NZE) tahun 2060. PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) menjadi tulang punggung utama dalam pencapaian target tersebut, karena ketersediaan sinar matahari yang tinggi sepanjang tahun. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi radiasi matahari antara **4,8–5,4 kWh/m²/hari**, yang termasuk tinggi untuk standar Indonesia bagian barat.

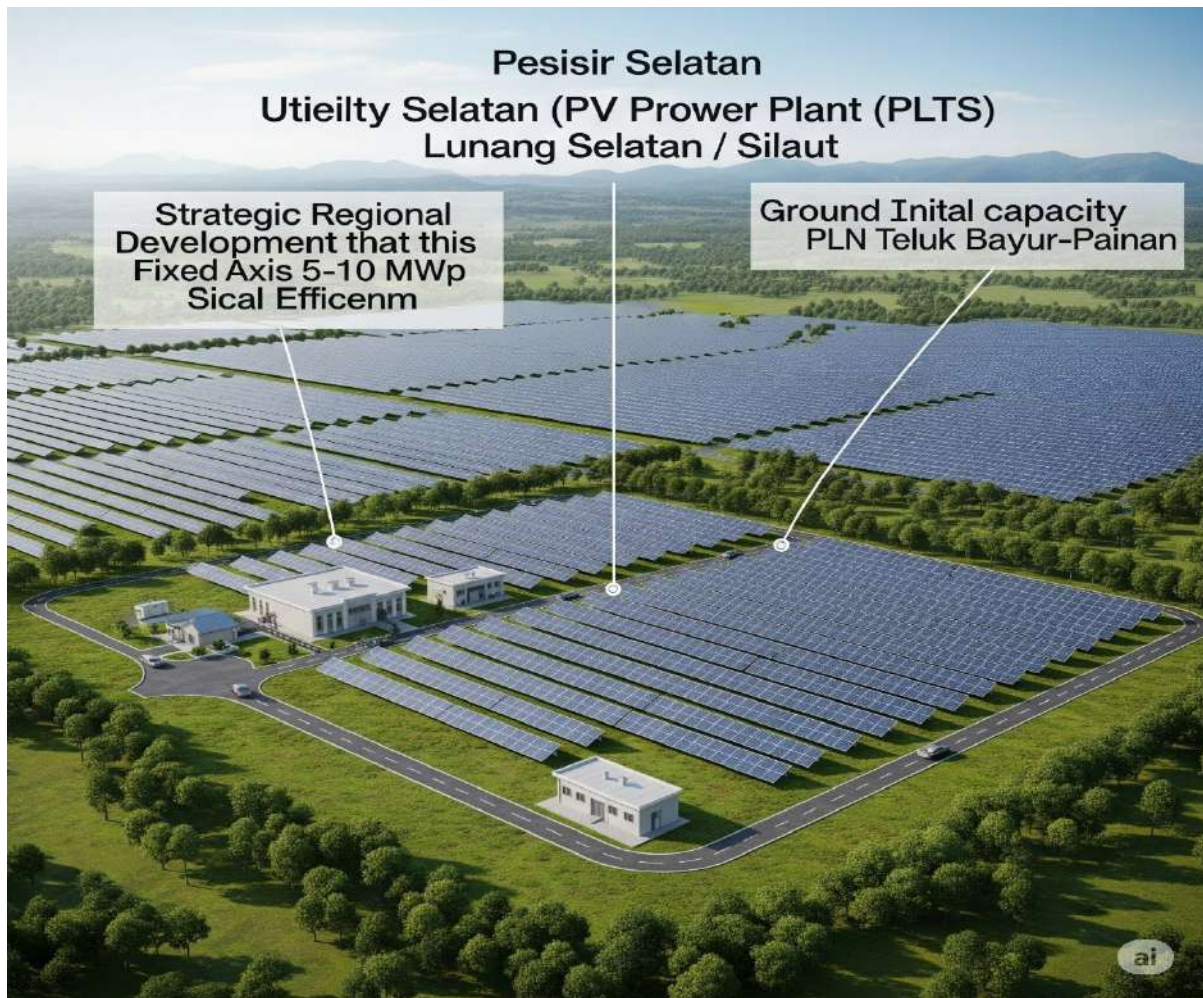
Namun, hingga kini, sebagian besar pemanfaatan energi masih bergantung pada listrik konvensional dari PLN dan diesel untuk daerah terpencil, yang membebani belanja APBD dan tidak memberikan kontribusi fiskal jangka panjang. Untuk itu, Kabupaten Pesisir Selatan berencana **membangun PLTS Skala Besar (Utility Scale)** dengan kapasitas awal **5–10 MWp**, dengan model kerja sama investasi hijau dan inbreng lahan milik Pemda.

Lokasi, Infrastruktur, dan Skema Teknis

Komponen	Keterangan
Lokasi	Lahan tidur eks-Perkebunan Dinas atau eks-lahan transmigrasi di Lunang Selatan / Silaut, ±10–15 ha
Jenis PLTS	Utility Scale PV (ground-mounted, fixed tilt atau single axis tracker)
Kapasitas Awal	5 MWp (2026), ekspansi hingga 10–15 MWp (2029)
Model Operasi	BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) atau KPBU Energi dengan Perusda sebagai partner lokal
Koneksi Grid	Dihubungkan ke jaringan PLN Teluk Bayur–Painan (Interkoneksi Sumatera Barat bagian selatan)

Kelembagaan dan Monetisasi PAD

Instrumen	Fungsi dan Dampak PAD
Perusda Energi Pessel Hijau	Menerima bagi hasil energi, mengelola fee BOOT, dan mengelola offset karbon
Inbreng Aset Lahan	Lahan Pemda disewakan atau dijadikan equity partner → PAD dari sewa tanah & share
Penerimaan PAD	Dari pajak energi, retribusi infrastruktur, carbon credit, dan pelatihan tenaga kerja PLTS



Estimasi Potensi PAD Tahunan

Sumber PAD	Estimasi (Rp / Tahun)
Bagi hasil produksi listrik (PPA)	Rp 1 – 1,5 miliar
Sewa lahan BOOT	Rp 300 – 500 juta
Offset karbon (GHG reduction)	Rp 200 – 400 juta
Pelatihan teknisi PLTS	Rp 100 – 200 juta
Total Potensi PAD	Rp 1,6 – 2,6 miliar/tahun

Mitra Strategis dan Dukungan

Mitra	Peran
Kementerian ESDM dan Bappenas	Dukungan KPBU dan bauran energi daerah
PT PLN	Offtaker listrik (PPA 25 tahun)
Investor Hijau (Sarulla, Medco, Suryagen)	Penyandang dana dan EPC (Engineering-Procurement-Construction)
Kominfo/BRIN/Poltek Painan	SDM teknis, sistem pelatihan vokasi energi terbarukan

Tahapan Implementasi (2025–2029)

Tahun	Agenda Strategis
2025	Feasibility Study, MoU PLN, pemetaan lokasi dan negosiasi investor
2026	Groundbreaking PLTS 5 MWp, pembentukan Perusda Energi, dan pengadaan panel surya
2027	Koneksi ke jaringan PLN, dimulainya penjualan energi ke sistem
2028	Ekspansi kapasitas ke 10 MWp, pelatihan teknisi PLTS dan sertifikasi pekerja lokal
2029	Pusat Komando Energi Hijau Daerah & Offset Karbon Global, edukasi dan tur energi

Dampak Strategis

- Menjadi **sumber PAD energi baru non-konvensional pertama di Sumbar**
- Menurunkan tagihan listrik Pemda dan bangunan publik hingga 30%
- Mendorong penciptaan **green jobs lokal** dan ekonomi sirkular energi
- Meningkatkan citra Pesisir Selatan sebagai kabupaten transisi hijau nasional
- Berkontribusi langsung terhadap **National Determined Contribution (NDC)** Indonesia

PLTS skala besar bukan hanya instrumen teknis, tapi **lompatan fiskal dan ekologis** menuju kemandirian daerah. Dengan model investasi publik–swasta, dukungan Perusda, dan strategi PAD berbasiskan bauran energi dan offset karbon, Pesisir Selatan dapat menjadi pionir **ekonomi energi hijau berbasis daerah** di Sumatera Barat. Energi yang bersih bukan hanya menyinari, tapi juga **membiayai pembangunan**.

DESAIN TEKNIS MODULAR PLTS 10–30 MWp

Lokasi Usulan: Lunang Silaut / Surantih / Koto XI Tarusan

Tipe: Utility Scale, On-Grid (PLN Interconnected)

Skema: Modular Clustered Design (5 MWp per blok)

1. Spesifikasi Teknis Umum (Per 5 MWp Modul)

Komponen	Spesifikasi Teknis
Panel Surya (PV Modules)	Monocrystalline Tier-1, 540–600 Wp
Jumlah Panel / 5 MWp	±8.900 – 9.500 unit
Area Lahan / 5 MWp	±5 – 6,5 ha (1 MWp ≈ 1 – 1,3 ha)
Inverter	String Inverter, 110–150 kW/unit (IP66)
Jumlah Inverter / 5 MWp	±40–45 unit
Mounting System	Fixed Tilt (25°) atau Single-Axis Tracker
Structure Material	Galvanized Steel atau Aluminium Alloy
SCADA & Monitoring	Web-based SCADA, Remote Alert, API-ready
Lifetime Sistem	25–30 tahun

2. Desain Modular Clustering (Skalabilitas 10–30 MWp)

Skala Proyek	Jumlah Modul	Total Panel	Luas Area
10 MWp	2 Modul	±18.000 panel	±12 – 13 ha
20 MWp	4 Modul	±36.000 panel	±24 – 26 ha
30 MWp	6 Modul	±54.000 panel	±35 – 40 ha

Catatan: Sistem modular memudahkan pembangunan bertahap sesuai kesiapan pembiayaan atau infrastruktur PLN.

3. Sistem Listrik dan Interkoneksi

Komponen	Spesifikasi
Voltage DC Nominal	1.500 Vdc (High Voltage DC String)
Transformator Step-Up	0,6/20 kV atau 0,6/33 kV
Main Switchgear	20–33 kV Panel Distribusi Outdoor
Grid Synchronization	Sesuai standar PLN (IEEE 519, IEC 62109)
Energi Output per 5 MWp	±6.800–7.500 MWh per tahun
Losses (sistem + shading)	Maks. 13%

4. Monitoring & SCADA System

- **Fungsi:**
 - Monitoring performa panel, inverter, transformator
 - Deteksi dini error dan anomali
 - Data historis untuk estimasi PAD berbasis produksi listrik
- **Fitur Khusus:**
 - Dashboard publik untuk PAD tracking dan efisiensi sistem
 - Integrasi dengan sistem IoT cuaca dan panel surya pintar

5. Dampak dan Potensi Energi

Indikator	Nilai Per 5 MWp	Nilai Total (30 MWp)
Produksi Listrik / Tahun	±7.000 MWh	±42.000 MWh
Jumlah Rumah Terlayani (900 VA)	±5.800 rumah	±35.000 rumah
Potensi Penurunan Emisi CO ₂	±5.000 ton CO ₂ /tahun	±30.000 ton CO ₂ /tahun

Indikator	Nilai Per 5 MWp	Nilai Total (30 MWp)
Nilai Potensi Carbon Credit	Rp 600 – 800 juta/tahun	Rp 3 – 4,5 miliar/tahun

6. Gambar Denah Awal (Konsep Tata Letak per 5 MWp)

Tata Letak per Modul 5 MWp :



Total area 5 MWp: ±6 ha.

Jarak antar modul: 3–5 m (untuk akses perawatan & keamanan).

7. Kebutuhan Pendukung

Komponen	Keterangan
Lahan	Milik Pemda/Nagari atau HGU tidur
Akses Jalan	Min. 4 m lebar, tanah padat
Jaringan PLN	Minimal 20 kV feeder (substation terdekat)
Izin Lingkungan	UKL-UPL atau AMDAL (≥10 MWp)
Izin Pemanfaatan Energi	Harus disusun bersama PT PLN & ESDM

8. Estimasi Biaya Investasi Modular

Skala Proyek	Biaya Perkiraan (All-in)	Catatan
5 MWp	Rp 60 miliar	EPC turnkey + SCADA + trafo
10 MWp	Rp 120 miliar	Ekonomi skala lebih efisien
30 MWp	Rp 330 – 360 miliar	Termasuk command center besar

9. Opsi Peningkatan

- **Single Axis Tracker (±12% output gain)**
- **Baterai Penyimpanan (BESS)** – opsional, ±Rp 6–8 miliar/MWh
- **Smart Grid & Load Balancing** – integrasi dengan energi lokal (mikrohidro/diesel hybrid)

Desain teknis modular PLTS 10–30 MWp ini cocok untuk wilayah seperti Pesisir Selatan dengan iradiasi tinggi, lahan luas, dan kebutuhan elektrifikasi serta ekspansi energi hijau. Modularitas memungkinkan fleksibilitas investasi dan pembangunan bertahap, serta memaksimalkan PAD daerah dari retribusi energi, sewa lahan, carbon credit, hingga penyertaan modal BUMD.

Skema Pembiayaan KPBU untuk PLTS Utility Scale 5 MWp, 10 MWp, dan 30 MWp di Kabupaten Pesisir Selatan. Penyajian ini disusun lengkap untuk menggambarkan fleksibilitas investasi dan besaran dampak fiskal berdasarkan skala kapasitas proyek.

GABUNGAN SKEMA PEMBIAYAAN KPBU PLTS UTILITY SCALE

Lokasi: Kabupaten Pesisir Selatan

Model: Build–Operate–Transfer (BOT)

Durasi: 15 Tahun KPBU | Transfer Aset ke Pemda/BUMD

1. Ringkasan Skema per Skala

Komponen	PLTS 5 MWp	PLTS 10 MWp	PLTS 30 MWp
Estimasi Investasi (CAPEX)	Rp 60 miliar	Rp 120 miliar	Rp 360 miliar
Luas Lahan	±6 ha	±12–13 ha	±35–40 ha
Produksi Energi / Tahun	±7 GWh	±14 GWh	±42 GWh
PAD Potensial / Tahun	Rp 750 juta – 1 M	Rp 1,5 – 1,8 M	Rp 4,5 – 5,5 M
CO ₂ Offset / Tahun	±5.000 ton	±10.000 ton	±30.000 ton
Carbon Credit / Tahun	Rp 300–400 juta	Rp 600–800 juta	Rp 1,8–2,4 miliar
IRR Proyek	±12–14%	±13–14,5%	±14–15%
Skema Pembiayaan	KPBU + VGF + Equity + Loan	Sama	Sama

2. Struktur Pembiayaan Gabungan

Sumber Pembiayaan	5 MWp	10 MWp	30 MWp	Komposisi (%)
Ekuitas Investor	Rp 18 M	Rp 36 M	Rp 108 M	30%
Pinjaman Perbankan	Rp 36 M	Rp 72 M	Rp 216 M	60%
VGF (Hibah Pusat)	Rp 6 M	Rp 12 M	Rp 36 M	10%
Total Investasi	Rp 60 M	Rp 120 M	Rp 360 M	100%

3. Sumber PAD per Skala

Komponen Sumber PAD	5 MWp	10 MWp	30 MWp
Sewa Lahan	Rp 100–150 juta	Rp 200–250 juta	Rp 600–750 juta
Retribusi Energi	Rp 500–650 juta	Rp 800–1.000 juta	Rp 2,4–3,0 miliar
Carbon Credit	Rp 300 juta	Rp 600–800 juta	Rp 1,8–2,4 miliar
Royalti Teknologi / Data	Rp 50–100 juta	Rp 100–150 juta	Rp 250–300 juta
Total PAD Potensial/Tahun	Rp 950 juta – 1,2 M	Rp 1,6 – 2,2 M	Rp 5,0 – 6,4 M

4. Jadwal Pembangunan Modular

Tahun	5 MWp	10 MWp	30 MWp
2025	FS + Market Sounding	FS + MoU PLN	FS, Pra-FS, dan Naskah KPBU
2026	Tender + DED + VGF	DED + VGF Final	Penentuan lokasi & land banking
2027	Konstruksi EPC	Konstruksi EPC	Fase 1: 10 MWp
2028	Operasional 5 MWp	Operasional 10 MWp	Fase 2: 10 MWp
2029			Fase 3: 10 MWp
2030–2040	Operasi penuh & PAD	Operasi penuh & PAD	Operasi penuh & PAD

5. Analisis Keuangan

Indikator	5 MWp	10 MWp	30 MWp
Levelized Cost (LCOE)	Rp 1.150/kWh	Rp 1.050/kWh	Rp 950–1.000/kWh
Harga jual ke PLN	Rp 1.250/kWh	Rp 1.300/kWh	Rp 1.300/kWh
NPV	Rp +20 miliar	Rp +45 miliar	Rp +140 miliar
Payback Period	8–9 tahun	7–8 tahun	6–7 tahun

6. Opsi Fleksibel

- Pemda dapat mulai dengan **5 MWp sebagai pilot**, lalu memperluas menjadi **10 atau 30 MWp** secara bertahap.
- Sistem modular memungkinkan **investasi bertahap**, mengurangi risiko awal.
- Dukungan VGF dan KPBU membuat proyek tetap bankable meskipun PAD masih dalam skala awal.

7. Keunggulan Skema Gabungan

Aspek	Penjelasan
Fleksibel & scalable	Mulai dari kecil, dapat diperluas sesuai fiskal & minat investor
Ramah fiskal	Tidak membebani APBD secara langsung, PAD aktif
Mitigasi risiko tinggi	Teknologi, biaya, dan operasional ditanggung oleh Badan Usaha
Transfer Aset ke Pemda	Aset PLTS menjadi milik Pemda/BUMD setelah tahun ke-15 tanpa biaya tambahan
Efisiensi fiskal	PAD dari retribusi energi, karbon, data, dan sewa

4r. PABRIK VAKSIN LOKAL PESIR SELATAN: Strategi Kemandirian Kesehatan dan Sumber PAD Inovatif

1. Latar Belakang dan Urgensi

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi pionir dalam sektor kesehatan preventif di wilayah barat Sumatra. Pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya kemandirian daerah dalam suplai farmasi, termasuk vaksin dan produk bioteknologi. Pendirian **Pabrik Vaksin Lokal** tidak hanya berorientasi pada kebutuhan daerah sendiri, tetapi juga sebagai potensi bisnis regional dan nasional.

Dengan potensi pasar imunisasi anak, remaja, hewan ternak, dan kebutuhan vaksin bencana (misalnya leptospirosis, flu burung, anthrax), pabrik vaksin dapat menjadi salah satu sektor *bioindustri strategis* yang memberikan nilai tambah tinggi dan sekaligus membuka ruang **PAD inovatif** dari sektor kesehatan.

2. Spesifikasi Rencana Pabrik Vaksin

Komponen	Rencana Implementasi
Lokasi Usulan	Batang Kapas / Painan Timur (lahan 3–5 ha milik Pemda)
Jenis Produk	Vaksin hewan (rabies, anthrax), vaksin manusia (BCG, DPT, hepatitis)
Target Produksi Awal	±5 juta dosis/tahun
Sertifikasi & Standar	BPOM, GMP, Halal MUI, ISO 9001 & 13485
Model Operasi	KPBU – Build–Operate–Transfer (BOT)
Kebutuhan SDM	80–120 tenaga kerja (bioteknologi, mikrobiologi, farmasi)



3. Nilai Investasi dan Skema Pembiayaan

Komponen	Nilai Perkiraan (Rp)	Keterangan
Konstruksi & Infrastruktur	Rp 75 miliar	Gedung produksi, laboratorium, QC, dll
Peralatan & Mesin Biotek	Rp 50 miliar	Fermentor, biosafety, cold chain
Studi & Sertifikasi	Rp 10 miliar	Uji klinis, BPOM, DED
Modal Awal Operasi (5 tahun)	Rp 30 miliar	Bahan baku, tenaga ahli, logistik
Total Estimasi	Rp 165 miliar	Skala menengah (regional)

4. Skema KPBU Pabrik Vaksin

Komponen Skema	Deskripsi
PJPK	Pemkab Pesisir Selatan (dapat didelegasikan ke Dinas Kesehatan/BUMD)
Badan Usaha Pelaksana	Konsorsium Biofarmasi Nasional / Mitra Luar Negeri (vaksin)
Skema	Build–Operate–Transfer (BOT) 20 tahun
Sumber Dana	Equity 30%, Loan 50%, VGF 20% (PT SMI/Bappenas)
Transfer Aset	Setelah 20 tahun pabrik menjadi milik Pemda / BUMD Kesehatan
Sharing PAD	Royalti, sewa, dividen BUMD

5. Proyeksi PAD & Dampak Ekonomi

Sumber PAD dan Dampak	Estimasi Nilai per Tahun
Dividen BUMD Vaksin (30% saham)	Rp 3–5 miliar

Sewa Lahan	Rp 200–300 juta
Royalti Inovasi & Lisensi	Rp 1 miliar
Retribusi Industri Kesehatan	Rp 500 juta
Total Potensi PAD	Rp 5 – 7 miliar/tahun
Tenaga Kerja Diserap	120–150 orang
Ekspor Potensial (2029–2035)	±Rp 50 miliar/tahun (regional ASEAN & Afrika)



6. Tahapan Implementasi (Roadmap 2025–2030)

Tahun	Kegiatan Utama
2025	FS + MoU mitra vaksin + Pra-KPBU + identifikasi lahan
2026	Tender KPBU + DED + perizinan & VGF
2027	Konstruksi & instalasi alat + rekrutmen teknis
2028	Sertifikasi BPOM, Halal, ISO + produksi pilot batch
2029	Operasional penuh + penjualan dalam negeri + PAD aktif
2030+	Ekspansi ekspor vaksin ke Global South

7. Mitra Potensial

- **Bio Farma (BUMN)** – transfer teknologi dan jaminan pasar nasional
- **IFC / GAVI / WHO** – pendanaan dan akselerasi ekspor vaksin
- **Universitas Andalas / UNP** – dukungan R&D dan SDM farmasi lokal
- **Investor Biotek Korea, India, Brazil** – mitra joint venture KPBU

8. Diferensiasi Nilai Tambah

- a. Pertama di Sumatera Barat dan luar Jawa
- b. Mendukung ketahanan kesehatan dan peternakan
- c. Mengurangi ketergantungan vaksin impor
- d. Potensi PAD tinggi dan inklusif
- e. Sinergi dengan BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit Nagari



BAB V

PENINGKATAN SDM MELALUI SKEMA LPDP
UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN
FISKAL DAN SEKTOR STRATEGIS



BAB V

PENINGKATAN SDM MELALUI SKEMA LPDP UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN FISKAL DAN SEKTOR STRATEGIS

5.a. Peningkatan SDM 50% S2 melalui LPDP

Strategis:

- Target peningkatan SDM strategis Pemkab Pesisir Selatan hingga 50% ASN dan putra-putri daerah berpendidikan S2 pada tahun 2029.
- Skema beasiswa dilakukan melalui kerja sama **LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia** dan difokuskan pada bidang yang mendukung transformasi fiskal dan sektor prioritas pembangunan.
- Seleksi terbuka bagi ASN dan masyarakat umum dengan integrasi kebutuhan strategis tiap perangkat daerah.
- Penyelarasan antara kebutuhan institusi dan kompetensi akademik sebagai dasar seleksi.

Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi tantangan besar dalam melakukan reformasi fiskal dan transformasi

ekonomi daerah secara inklusif, berbasis data dan inovasi. Dalam konteks tersebut, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas fundamental. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten menetapkan target strategis: **50% ASN dan kader potensial daerah menyelesaikan pendidikan S2 melalui skema LPDP Daerah hingga tahun 2029**, bekerja sama dengan **Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia**.

Skema ini akan menjadi motor utama peningkatan kualitas kebijakan fiskal, daya saing birokrasi, serta pencapaian proyek-proyek pembangunan strategis yang membutuhkan kemampuan teknis, analitis, dan kepemimpinan tinggi. Program ini tidak hanya diperuntukkan bagi ASN aktif, tetapi juga terbuka untuk putra-putri nagari berprestasi yang bersedia kembali dan mengabdikan diri di sektor publik.



program ini dalam RPJMD dan RKPD setiap tahunnya, serta menetapkan daftar bidang studi prioritas yang berkaitan langsung dengan arah kebijakan pembangunan. Untuk memaksimalkan dampak, seleksi peserta akan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan SDM pada masing-masing **Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis**, seperti:

- **Badan Pendapatan Daerah (Bapenda):** untuk mencetak analis perpajakan, perancang regulasi fiskal, dan digitalisasi sistem PAD.
- **Bappeda:** untuk menguatkan kapasitas perencana ekonomi daerah, penilai KPBU, dan evaluator dampak fiskal.
- **Dinas Kominfo:** untuk mendukung transformasi digital layanan publik dan integrasi data fiskal berbasis teknologi.
- **Dinas Kesehatan:** sebagai penopang SDM dalam proyek strategis seperti pabrik vaksin, sistem layanan preventif, dan farmasi lokal.
- **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan:** dalam rangka mengembangkan agroindustri, pangan strategis, dan sistem pertanian berbasis teknologi.
- **Dinas Lingkungan Hidup:** untuk mendukung pengembangan ekonomi sirkular, pajak karbon, dan tata kelola jasa lingkungan.



- **BUMD dan Unit KPBU:** SDM S2 akan memperkuat manajemen usaha daerah dan perencanaan proyek infrastruktur berbasis investasi.

Pemerintah akan melakukan rekrutmen dan seleksi berbasis kebutuhan sektoral, disertai dengan kontrak belajar dan perjanjian imbal balik untuk memastikan bahwa SDM lulusan LPDP benar-benar kembali dan ditempatkan pada posisi strategis yang memberi kontribusi nyata terhadap pendapatan dan tata kelola fiskal daerah.

Berikut adalah penjabaran ulang dan **pendalaman subbab 5.b “Imbal Balik dan Kontribusi PAD pada Masa Datang dari 50% SDM Pendidikan S2”** dalam format **point dan alinea ilmiah panjang**, disertai estimasi dan praktik nyata yang dapat diterapkan di Kabupaten Pesisir Selatan.

5.b. Imbal Balik dan Kontribusi PAD pada Masa Datang dari 50% SDM Pendidikan S2

1. Imbal Balik Strategis: Penguatan Posisi dan Fungsi ASN di Sektor PAD

Peningkatan kapasitas ASN dan kader muda daerah melalui beasiswa LPDP Kementerian Keuangan diarahkan agar menjadi investasi SDM strategis. Imbal baliknya tidak sekadar bersifat administratif (misalnya kembali bekerja di instansi asal), tetapi bersifat fungsional dan terukur terhadap output fiskal. Setiap lulusan LPDP akan ditempatkan secara **terstruktur di unit kerja prioritas** seperti Bapenda, Bappeda, Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, atau di BUMD dan Unit KPBU Daerah. Mereka akan diberikan mandat spesifik sebagai agen perubahan dalam mendesain sistem perpajakan daerah digital, mengembangkan model pembiayaan berbasis investasi (KPBU), menyusun proposal hibah dan VGF, atau membangun sistem fiskalisasi aset dan retribusi daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.

2. Kontribusi Nyata terhadap PAD: Estimasi dan Dampak

Secara konservatif, satu orang lulusan LPDP yang ditempatkan secara strategis dapat menghasilkan tambahan PAD sebesar **Rp 2–5 miliar per tahun**, baik melalui pembukaan sumber pendapatan baru (misalnya retribusi digital, carbon credit, lisensi budaya, digitalisasi parkir), maupun melalui efisiensi dan penurunan kebocoran pajak eksisting. Jika dalam lima tahun terdapat 100–125 alumni S2 yang tersebar di seluruh OPD dan unit fiskal strategis, maka potensi kontribusi mereka terhadap **peningkatan PAD kumulatif bisa mencapai Rp 200 miliar hingga Rp 500 miliar** pada satu siklus RPJMD (2025–2029). Estimasi ini bahkan belum memasukkan multiplier effect seperti peningkatan kredibilitas proyek daerah di mata investor, atau peningkatan skor kinerja fiskal sebagai parameter alokasi DAK insentif.

3. Peran Alumni dalam Proyek Strategis dan Reformasi Sistem

Sebagai contoh konkret, alumni LPDP dari bidang teknologi informasi publik dapat ditugaskan membangun dan mengelola **Dashboard PAD Real-Time** untuk seluruh titik pemungutan PAD seperti pasar, restoran, hotel, PBB-P2, dan retribusi sampah. Sementara itu, alumni dari bidang hukum pajak atau manajemen publik dapat merumuskan revisi Perda pajak dan retribusi agar selaras dengan UU HKPD, serta menyusun analisis potensi fiskal per nagari berbasis geospasial.

Lulusan dari program bioteknologi dan farmasi dapat memimpin percepatan pendirian **Pabrik Vaksin KPBU** atau menjadi direktur teknis BUMD Farmasi Daerah. Lulusan dari program perencanaan infrastruktur dan ekonomi pembangunan dapat menyusun proposal KPBU PLTS Utility Scale, Rice Milling Unit, atau Pusat Inovasi Pertanian. Semua proyek strategis tersebut pada dasarnya memiliki komponen fiskal—baik berupa peningkatan PAD langsung, efisiensi belanja, maupun peningkatan nilai aset daerah.

4. Akuntabilitas Imbal Balik: Sistem Laporan dan Evaluasi Kinerja

Setiap alumni LPDP diwajibkan menyusun **Laporan Kontribusi PAD Tahunan** yang memuat aktivitas, inovasi, dan hasil fiskal yang dicapai. Pemerintah daerah dapat menyusun indikator kinerja alumni, misalnya:

- Berapa proyek strategis yang dipimpin?
- Berapa peraturan atau sistem fiskal yang diperbarui?
- Berapa nilai tambahan PAD yang dikontribusikan langsung/tidak langsung?
- Berapa investor atau donor yang berhasil dibawa masuk ke proyek daerah?

Sebagai bentuk insentif, alumni berprestasi dapat memperoleh promosi cepat ke posisi fungsional strategis seperti perancang kebijakan fiskal daerah, Kepala UPT PAD Digital, Direktur BUMD, atau posisi kunci pada unit KPBU dan investasi daerah.

5. Rekomendasi Kebijakan Daerah

Agar kontribusi SDM LPDP terhadap PAD lebih terukur dan optimal, maka beberapa kebijakan penting yang bisa diambil antara lain:

- Peraturan Bupati tentang *Penempatan dan Kontribusi Alumni Beasiswa Strategis Daerah*.
- Integrasi outcome SDM LPDP ke dalam indikator kinerja OPD.
- Penguatan sistem insentif berbasis capaian PAD dari alumni.
- Pembentukan *Fellowship Alumni LPDP Daerah* untuk memperkuat ekosistem pengaruh alumni dalam sistem fiskal daerah.

5.c. PNS dari Universitas Negeri Terbaik

Strategis:

- ASN strategis diarahkan untuk studi lanjut S2 di universitas negeri terbaik nasional dan global.
- Lulusan perguruan tinggi unggulan diprioritaskan menempati posisi pengambil keputusan fiskal dan pembangunan daerah.
- Integrasi seleksi LPDP daerah dengan standar akademik dan kualifikasi institusi pendidikan tinggi.
- Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan kampus terbaik untuk riset bersama dan magang kebijakan.



Sebagai bagian dari transformasi kelembagaan fiskal dan peningkatan kualitas layanan publik, Kabupaten Pesisir Selatan memandang penting untuk tidak hanya meningkatkan jumlah SDM berpendidikan S2, tetapi juga memastikan bahwa mereka berasal dari institusi pendidikan terbaik—baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, Pemkab Pesisir Selatan menetapkan kebijakan afirmatif untuk

mengarahkan aparatur sipil negara (ASN) strategis yang menerima beasiswa LPDP Daerah agar mengambil studi di universitas negeri terbaik, seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran, Universitas Andalas, serta universitas luar negeri yang termasuk dalam Top 500 QS World University Rankings.

Pendekatan ini berangkat dari keyakinan bahwa kualitas pendidikan tinggi yang unggul tidak hanya memberikan keahlian teknis, tetapi juga memperluas cara pandang, jaringan kerja (networking), serta memperkuat integritas dan daya saing alumni dalam menyusun kebijakan publik yang efektif dan responsif terhadap perubahan global. Lulusan dari universitas unggulan akan memiliki akses pada riset mutakhir, forum kebijakan internasional, dan pendekatan analitis berbasis evidence-based policy making yang sangat relevan untuk menghadapi kompleksitas pengelolaan fiskal daerah dan pembangunan multisektor.

ASN lulusan perguruan tinggi unggulan ini akan diberikan jalur akselerasi pengembangan karier, terutama untuk mengisi posisi teknokratik kunci di Bapenda, Bappeda, Unit KPBU, BUMD strategis, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Kominfo. Misalnya, alumni ITB di bidang energi akan ditempatkan sebagai konsultan teknis proyek KPBU PLTS 5–30 MW, atau alumni UGM bidang perpajakan dapat menjadi penyusun revisi regulasi fiskal daerah dan Perda Retribusi Berbasis Elastic Revenue Modeling. Demikian pula, lulusan luar negeri di bidang public policy dapat menjadi negosiator strategis daerah dalam menarik investor dan hibah internasional, termasuk melalui skema green financing, carbon credit, maupun kemitraan pembangunan inovatif.

Untuk memastikan keberhasilan pendekatan ini, Pemkab Pesisir Selatan akan menyusun indikator prioritas berdasarkan akreditasi institusi pendidikan dan rekam jejak akademik, serta menyusun kerjasama strategis dengan universitas terkemuka, seperti program riset bersama, magang ASN di lembaga riset kampus, dan pembukaan kelas eksekutif lintas daerah. Langkah ini sekaligus menjadikan Pemkab sebagai pelopor daerah berbasis technocracy dan merit system yang didukung oleh lembaga akademik bereputasi tinggi.



BAB VI

KOPERASI MERAH PUTIH NAGARI

BAB VI

KOPERASI MERAH PUTIH NAGARI

6.a. Struktur dan Fungsi Koperasi Merah Putih Nagari (KMPN)

Fokus pada Bidang Usaha Inti dan Dampaknya terhadap PAD

Koperasi Merah Putih Nagari (KMPN) dibentuk sebagai koperasi sektor produksi yang bertujuan untuk mengelola dan memonetisasi potensi ekonomi lokal secara langsung dan terstruktur. Struktur kelembagaan koperasi berada di tingkat nagari, dengan dukungan kelembagaan kabupaten. Fokusnya diarahkan ke **5 (lima) bidang usaha inti** yang disesuaikan dengan karakteristik ekonomi lokal Pesisir Selatan dan diarahkan untuk menghasilkan kontribusi nyata terhadap PAD.

Bidang Fokus Utama:

1. **Pangan Pokok dan MBG (Makan Bergizi Gratis)**
Koperasi mengelola produksi, pengolahan, dan distribusi beras, sayur, dan daging lokal yang digunakan dalam program MBG. Contohnya, KMPN Nagari Bayang mengelola sawah pokok murah dengan integrasi dapur sehat sekolah. Kontribusi ke PAD berasal dari lisensi dapur MBG, retribusi distribusi pangan, dan QRIS dari penjualan koperasi.
2. **Perikanan Darat dan Olahan**
Fokus pada pembudidayaan ikan air tawar (nila, lele, gurami) dan pengolahannya menjadi produk kemasan (ikan asap, abon ikan, filet segar). Misalnya, Nagari Lunang mengembangkan kolam terpal berbasis koperasi dan e-logistik mini. Kontribusi PAD berasal dari lisensi produksi, pajak mikro, dan layanan logistik koperasi.
3. **Herbal dan Kosmetik Lokal**
Pemanfaatan komoditas unggulan seperti jahe merah, kunyit hitam, dan serai wangi untuk produk herbal dan kosmetik. Produk ini dikelola oleh koperasi dan dijual dengan lisensi daerah "Herbal Gadang". Koperasi membayar royalti produk, lisensi halal digital, dan kontribusi PAD dari kemitraan dengan BUMD Farmasi.
4. **Ekowisata dan Budaya Nagari**
KMPN mengelola paket wisata lokal, homestay, pertunjukan budaya, dan penyewaan peralatan. Contoh: Nagari Tapan mengelola paket wisata mangrove dan kuliner lokal. Pendapatan berasal dari retribusi wisata, lisensi budaya, dan QRIS dari transaksi wisata.
5. **Digital Marketplace dan Logistik UMKM**
KMPN mendirikan platform digital lokal (e-Warung, e-Pasar Nagari) dan jaringan logistik mini untuk UMKM. Mereka menyediakan layanan e-payment, kurir koperasi, dan pemesanan daring. Kontribusi PAD berasal dari fee transaksi digital, retribusi logistik, dan pengelolaan lisensi dagang.

Fungsi Strategis Koperasi dalam Sistem Fiskal Daerah:

- **Penggerak Ekonomi Lokal Berbasis Produksi:** Mengurangi ketergantungan nagari pada pihak luar dalam penyediaan pangan, energi, dan kebutuhan dasar.
- **Agregator dan Kanal Distribusi Produk Rakyat:** Menjembatani petani, nelayan, dan pengrajin dengan pasar dan sektor publik seperti sekolah, rumah sakit, dan kantor.
- **Kontributor PAD yang Terukur dan Tertib:** Melalui sistem pelaporan omzet koperasi ke dashboard PAD, seluruh aktivitas dikenai kewajiban fiskal berdasarkan skema retribusi, lisensi, atau royalti.

6.b. Sektor Fokus dan Kontribusi PAD

Poin Strategis:

- Penetapan sektor prioritas koperasi didasarkan pada potensi ekonomi lokal, keterkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, dan peluang monetisasi fiskal.
- Setiap sektor didesain untuk berkontribusi langsung terhadap PAD melalui retribusi usaha, lisensi produk, royalti, hingga sistem QRIS koperasi.
- Lima sektor utama diproyeksikan dapat menghasilkan kontribusi PAD daerah secara agregat sebesar **Rp 4 miliar–5,7 miliar per tahun** jika dikelola optimal di 25 nagari utama.

Koperasi Merah Putih Nagari (KMPN) dirancang untuk bergerak dalam sektor-sektor ekonomi rakyat yang memiliki potensi langsung terhadap konsumsi masyarakat lokal dan ekspansi pasar. Pemilihan sektor fokus dilakukan berdasarkan pemetaan ekonomi unggulan nagari, kemudahan akses pasar, serta skema pembiayaan yang bisa dikembangkan melalui kerja sama dengan BUMD, koperasi kabupaten, maupun mitra KPBU dan CSR.

Fokus ini tidak hanya menjamin keberlanjutan usaha koperasi, tetapi juga menciptakan **jalur fiskalisasi baru bagi PAD daerah** yang selama ini belum digarap secara sistematis.

No	Sektor Fokus	Contoh Pelaksana	Nagari	Rincian Sumber Omzet Koperasi	Estimasi Omzet Tahunan	Potensi PAD (Rp)
1	Pangan Strategis & MBG	Bayang, Kapas	Batang	Penjualan beras MBG, katering sekolah/dapur sehat, beras retail di warung koperasi, olahan sayur, sambal kemasan, beras kemasan brand lokal	Rp 12–15 miliar	Rp 1,5 miliar
2	Herbal & Kosmetik Lokal	Tapan, Air Pura		Produksi dan penjualan jahe merah bubuk, kunyit kapsul, minyak serai wangi, sabun herbal, krim wajah lokal, kemitraan koperasi-BUMD farmasi	Rp 6–8 miliar	Rp 800 juta
3	Perikanan Darat & Olahan	Lunang, Basa Ampek Balai Tapan		Budidaya ikan nila dan lele terpal, pengolahan ikan abon/asap/filet, kolam koperasi terintegrasi MBG, warung makan ikan, pemasaran digital ikan segar	Rp 4–6 miliar	Rp 500 juta
4	Digital Marketplace & Logistik UMKM	Sutera, Lengayang		Platform e-Warung Nagari, layanan antar berbasis koperasi, gudang mini koperasi, jasa distribusi produk UMKM, agregator pasar daring lokal, pembayaran QRIS	Rp 7–10 miliar	Rp 1–1,3 miliar
5	Ekowisata & Budaya Nagari	Koto XI Tarusan, Inderapura		Paket wisata budaya, homestay koperasi, pertunjukan adat, jasa pemandu wisata, warung oleh-oleh khas, penyewaan perahu/motor trail, retribusi lokasi wisata	Rp 5–7 miliar	Rp 600–800 juta

Dampak Jangka Panjang:

Dengan penguatan sektor-sektor ini melalui Koperasi Merah Putih Nagari, pemerintah daerah dapat menciptakan basis fiskal baru yang stabil dan berbasis ekonomi rakyat. Tidak hanya memberikan ruang partisipasi ekonomi yang adil bagi masyarakat nagari, tetapi juga membuka peluang ekspor produk lokal, mengembangkan sistem lisensi dan insentif fiskal berbasis performa koperasi, serta menciptakan struktur PAD yang lebih beragam, resilient, dan adil secara sosial.

Berikut adalah penjabaran lengkap dan mendalam untuk **6.c. Model Implementasi dan Contoh Lapangan dari Koperasi Merah Putih Nagari (KMPN)** di Kabupaten Pesisir Selatan, dalam format poin dan alinea panjang:

6.c. Model Implementasi dan Contoh Lapangan

Poin Strategis Implementasi:

- Pelaksanaan KMPN dimulai dari nagari-nagari prioritas berbasis sektor unggulan yang terpetakan.
- Model implementasi dilakukan secara bertahap: pembentukan kelembagaan → pembangunan unit usaha → integrasi digital → pelaporan ke PAD.
- Terdapat skema monitoring, pelatihan SDM koperasi, insentif awal, dan integrasi ke dashboard PAD real-time.

Implementasi Koperasi Merah Putih Nagari (KMPN) di Kabupaten Pesisir Selatan akan dimulai secara bertahap, dimulai dari **10 nagari percontohan** di tiga kluster pengembangan utama: kluster pangan–herbal di wilayah tengah dan utara, kluster perikanan dan ekowisata di wilayah selatan, serta kluster logistik–pasar digital di wilayah pesisir. Model ini disesuaikan dengan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat, serta mempertimbangkan kesiapan infrastruktur sosial dan ekonomi di masing-masing nagari. Pelaksanaan KMPN

tidak hanya berfokus pada kelembagaan koperasi semata, namun mengintegrasikan seluruh ekosistem pendukung: SDM, aset nagari, pasar, teknologi, serta regulasi dan retribusi daerah.

Langkah Implementasi Bertahap:

Tahap	Langkah Implementasi	Penjelasan
1	Identifikasi dan Seleksi Nagari Prioritas	Berdasarkan potensi komoditas unggulan, kesiapan masyarakat, dan infrastruktur digital dasar.
2	Pembentukan Koperasi Berbasis Komoditas	Penyusunan AD/ART, legalitas notaris, pelatihan pengurus, penggalangan modal awal (APBDesa/APBD/KPBU/CSR).
3	Pendirian Unit Usaha Koperasi	Pendirian fisik usaha: lumbung pangan, rumah herbal, kolam terpal, warung wisata, gudang logistik, dapur MBG koperasi.
4	Integrasi ke Platform Digital dan Sistem Pembayaran QRIS	Koperasi wajib menggunakan QRIS koperasi, aplikasi pelaporan, dan e-katalog produk lokal.
5	Pemungutan PAD Berbasis Lisensi dan Retribusi Digital	Penetapan retribusi tetap + variabel (berdasarkan omzet) per koperasi melalui dashboard PAD digital.
6	Monitoring dan Evaluasi Berkala	Dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Bapenda bersama Bappeda, DJPb, dan BUMD aggregator koperasi.



Contoh Lapangan KMPN:

Nagari	Komoditas Fokus	Jenis Usaha Koperasi	Estimasi PAD per Tahun
Nagari Bayang	Beras organik & jahe merah	Lumbung pangan MBG, warung digital, rumah pengolahan sambal kemasan	Rp 250 juta
Nagari Lunang	Ikan nila, wisata mangrove	Budidaya kolam terpal, pengolahan filet, penyewaan perahu wisata	Rp 200 juta
Nagari Tapan	Serai wangi, kunyit, sabun herbal	Pabrik sabun herbal koperasi, pasar digital produk herbal	Rp 300 juta

Nagari	Komoditas Fokus	Jenis Usaha Koperasi	Estimasi PAD per Tahun
Nagari Sutura	Logistik dan UMKM	Gudang UMKM, layanan kurir koperasi, warung digital koperasi	Rp 150 juta
Nagari Koto XI Tarusan	Wisata budaya & kuliner lokal	Manajemen event budaya, penyewaan motor trail wisata, festival kuliner Nagari	Rp 180 juta

Dampak Sistemik:

Model ini diproyeksikan akan:

- Menyerap lebih dari **5.000 tenaga kerja lokal** di sektor produktif koperasi hingga 2029.
- Meningkatkan omzet koperasi hingga **Rp 50 miliar per tahun** di tahun ketiga implementasi.
- Meningkatkan PAD daerah melalui retribusi, lisensi, dan royalti hingga **Rp 5 miliar per tahun** dari koperasi-koperasi yang aktif.

Skema Insentif dan Dukungan:

- Hibah modal awal koperasi dari APBD atau CSR (Rp 100–300 juta per koperasi awal).
- Subsidi pajak/retribusi tahun pertama untuk koperasi yang mencapai target omzet.
- Pendampingan dan pelatihan koperasi oleh Dinas Koperasi dan mitra perguruan tinggi (UNAND, Politeknik Pertanian Payakumbuh).



BAB VII

INFRASTRUKTUR FISKAL DAN FISKALISASI
NAGARI UNTUK KEMAJUAN EKONOMI
DAERAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN



BAB VII

INFRASTRUKTUR FISKAL DAN FISKALISASI NAGARI UNTUK KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

7.a. Digitalisasi Fiskal Nagari

- Membangun sistem digital terintegrasi keuangan nagari berbasis cloud dan real-time.
- Menyediakan kanal pembayaran digital (QRIS Nagari) untuk semua transaksi nagari.
- Mendorong konsolidasi fiskal antar-nagari dan pelaporan berbasis output.
- Menghubungkan sistem keuangan nagari dengan dashboard PAD kabupaten.

Digitalisasi fiskal nagari adalah fondasi utama dalam memperkuat struktur fiskal akar rumput dan memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam konteks geografis yang luas dan topografi yang menantang, digitalisasi menjadi solusi efektif untuk menjangkau nagari-nagari terpencil, menyederhanakan pelaporan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi fiskal. Pemerintah kabupaten akan membangun dan menyediakan **sistem informasi keuangan nagari terintegrasi berbasis cloud**, yang memungkinkan pencatatan, pelaporan, dan pemantauan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran secara real-time. Sistem ini akan kompatibel dengan aplikasi keuangan desa yang telah dikembangkan oleh Kemendagri (Siskeudes), namun diperluas dengan modul pelaporan PAD nagari, QRIS pendapatan, dan konektivitas dengan dashboard PAD kabupaten.

Setiap nagari akan didorong untuk mengimplementasikan **QRIS Nagari** yang digunakan sebagai instrumen pembayaran digital untuk layanan seperti sewa pasar nagari, pengurusan administrasi, retribusi air bersih, kontribusi masyarakat atas jasa pengangkutan sampah, hingga tiket masuk wisata nagari. QRIS ini terhubung langsung ke akun bank nagari dan sistem pelaporan daerah, memungkinkan pelacakan transaksi secara harian dan audit yang lebih efisien. Selain itu, sistem ini mendukung peningkatan literasi keuangan masyarakat dan mempercepat proses fiskalisasi objek penerimaan yang selama ini belum tercatat.

Lebih jauh, digitalisasi fiskal nagari akan membuka jalan bagi **konsolidasi fiskal antar-nagari**, terutama dalam program-program berbasis kawasan seperti pengelolaan sampah bersama, pasar regional, dan koperasi lintas nagari. Sistem digital akan memungkinkan penyusunan laporan fiskal agregat untuk mendukung keputusan berbasis data dalam penyusunan RKPD kabupaten. Selain itu, Pemkab juga dapat mengintegrasikan indikator kinerja fiskal nagari ke dalam mekanisme insentif Transfer Fiskal Berbasis Kinerja (TFBK) yang akan diterapkan mulai 2026.

Untuk memastikan keberhasilan program ini, Pemkab akan menyediakan pelatihan teknis dan manajerial bagi perangkat nagari, pengadaan perangkat digital (tablet, QR code stand, printer thermal), serta insentif berbasis kinerja bagi nagari yang berhasil mengintegrasikan sistem digital dan meningkatkan rasio penerimaan non-transfer. Skema ini tidak hanya menjadikan nagari lebih mandiri secara fiskal, tetapi juga memperkuat posisi fiskal kabupaten dalam membangun kemandirian fiskal daerah secara keseluruhan.

7.b. Fiskalisasi Aset Nagari

- Inventarisasi ulang dan digitalisasi seluruh aset milik nagari (berwujud dan tidak berwujud).
- Mendorong pemanfaatan aset untuk aktivitas ekonomi koperasi atau BUMNag.
- Menetapkan skema retribusi, sewa, atau lisensi atas aset nagari yang dimonetisasi.
- Semua transaksi aset nagari dimasukkan dalam sistem pelaporan PAD kabupaten.

Sebagian besar nagari di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki aset yang selama ini belum dioptimalkan sebagai sumber pendapatan, baik aset berwujud seperti tanah, pasar, bangunan, dan fasilitas umum, maupun aset tak berwujud seperti nama produk lokal, warisan budaya, dan hak pengelolaan wisata. Saat ini, mayoritas aset hanya tercatat secara administratif, tidak memiliki valuasi ekonomi, dan belum digunakan dalam skema yang menghasilkan arus kas atau kontribusi fiskal. Untuk itu, **fiskalisasi aset nagari** menjadi strategi penting dalam memperluas basis PAD yang adil dan berbasis potensi lokal.

Langkah awalnya adalah **pendataan ulang dan digitalisasi seluruh aset nagari**. Proses ini dilakukan melalui integrasi sistem inventarisasi nagari ke dalam platform aset daerah kabupaten yang dikelola oleh BPKAD dan Dinas Kominfo. Setiap aset akan diberikan Nomor Aset Nagari Digital (NAND) yang memuat informasi geospasial, status hukum, ukuran, serta potensi pemanfaatan ekonomi. Misalnya, **tanah kosong milik Nagari Koto XI Tarusan** seluas 2 hektar yang selama ini tidak termanfaatkan dapat dinilai ulang dan digunakan sebagai lokasi pembangunan rumah produksi herbal oleh koperasi, dengan sistem sewa atau bagi hasil.

Setelah aset terdata, pemerintah akan mendorong skema pemanfaatan melalui model **Kerja Sama Operasional (KSO)** dengan koperasi atau BUMNag. Contoh konkret: pasar tradisional nagari yang tidak optimal bisa dikelola ulang oleh Koperasi Merah Putih Nagari dengan skema retribusi sewa harian digital (QRIS), lalu sebagian dari pendapatan tersebut dilaporkan dan disetor ke rekening PAD kabupaten. Sementara itu, **aset tak berwujud** seperti nama produk kuliner khas atau lisensi wisata (contohnya: “Ikan Salai Lunang”) akan dikenakan lisensi penggunaan, yang dikelola koperasi dan disetor secara berkala ke kas daerah sebagai royalti.

Agar fiskalisasi ini berjalan efektif, Pemkab Pesisir Selatan akan menyusun regulasi dalam bentuk **Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan dan Fiskalisasi Aset Nagari**, yang memuat: (1) kriteria aset yang dapat dimonetisasi, (2) tarif sewa dan lisensi, (3) skema pelaporan dan sanksi, serta (4) mekanisme insentif bagi nagari yang berhasil meningkatkan kontribusi fiskal dari asetnya. Pemerintah juga akan membentuk Tim Penilai Aset Nagari yang terdiri dari BPKAD, Dinas PUPR, dan unsur perguruan tinggi untuk melakukan valuasi profesional terhadap aset strategis.

Contoh Nyata Fiskalisasi Aset Nagari:

Nagari	Aset	Pemanfaatan	Skema Fiskal	Estimasi PAD / Tahun
Bayang	Bangunan pasar lama (600 m ²)	Disewakan ke koperasi sebagai warung digital	Sewa tetap Rp 3 jt/bln	Rp 36 juta
Lunang	Lahan kosong 2 ha	Kolam ikan koperasi & gudang logistik	Bagi hasil 15% dari omzet	Rp 50–80 juta
Tapan	Nama lisensi “Salai Tapan”	Digunakan UMKM kuliner lokal	Lisensi tahunan	Rp 10–20 juta
Koto XI Tarusan	Area wisata alam	Lokasi parkir & penyewaan motor wisata	Retribusi masuk + sharing	Rp 75 juta

Melalui kebijakan ini, **aset nagari tidak lagi menjadi beban anggaran, tetapi justru menjadi sumber kekuatan fiskal lokal**, membuka lapangan kerja, mendorong inovasi koperasi, dan memperluas cakupan PAD berbasis aset. Kebijakan fiskalisasi aset juga menjadi bagian dari reformasi fiskal yang menjamin keberlanjutan pembangunan nagari dan kabupaten dalam jangka panjang.

Berikut penjabaran **7.c. Transfer Fiskal Berbasis Kinerja (TFBK)** sebagai bagian dari *Bab VII: Infrastruktur Fiskal dan Fiskalisasi Nagari* untuk Kabupaten Pesisir Selatan, disusun dalam bentuk poin dan alinea panjang:

7.c. Penataan Transfer Fiskal Berbasis Kinerja (TFBK)

- TFBK adalah mekanisme pemberian dana transfer dari kabupaten ke nagari yang didasarkan pada capaian kinerja, bukan sekadar alokasi merata.
- Tujuannya adalah mendorong efisiensi, inovasi, dan akuntabilitas fiskal nagari.
- Indikator kinerja mencakup aspek pengelolaan PAD nagari, pelaporan keuangan, keberhasilan program prioritas, dan kontribusi ekonomi lokal.
- Nagari dengan kinerja baik diberi insentif fiskal, sedangkan nagari yang stagnan tidak akan memperoleh tambahan alokasi.

Transformasi fiskal daerah memerlukan pendekatan insentif yang mendorong perubahan perilaku fiskal di tingkat paling bawah, yaitu nagari. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan mengimplementasikan **Transfer Fiskal Berbasis Kinerja (TFBK)** mulai tahun anggaran 2026 sebagai pendekatan baru dalam menyalurkan Dana Transfer Nagari. Skema ini mengakhiri pola alokasi merata dan menggantikannya dengan pendekatan berbasis hasil. TFBK tidak hanya mendorong efisiensi dan inovasi, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dalam pemanfaatan dana publik serta memperkuat fiskalisasi potensi ekonomi nagari.

Dalam skema TFBK, setiap nagari akan dinilai menggunakan indikator kinerja yang terukur dan transparan. Penilaian dilakukan setahun sekali oleh Tim Evaluasi Fiskal Kabupaten yang terdiri dari Bappeda, Dinas PMD, BPKAD, Bapenda, dan Inspektorat. Adapun indikator utama TFBK meliputi:

Kategori	Indikator Kinerja	Bobot (%)
Kinerja PAD Nagari	Jumlah penerimaan non-transfer (retribusi, QRIS, lisensi nagari)	25%
Pelaporan Keuangan	Tepat waktu, akurat, dan sesuai standar pelaporan elektronik	20%
Program Prioritas	Implementasi program MBG, ekowisata, koperasi merah putih, zero waste	25%
Kinerja SDM & Digital	Penggunaan sistem QRIS, aplikasi fiskal, dashboard kinerja nagari	15%
Inovasi Ekonomi	Produk unggulan, ekspor nagari, lisensi budaya, event berbayar	15%

Setiap indikator memiliki nilai evaluasi dan skoring yang dituangkan dalam **dashboard fiskal nagari**. Hasil evaluasi ini menjadi dasar alokasi tambahan transfer fiskal, insentif, atau pendampingan teknis dari kabupaten.

Contoh Skema Insentif TFBK:

Nilai Kinerja Nagari Status Kinerja

> 85 poin

Nagari Unggul

70–85 poin

Nagari Berkembang

< 70 poin

Nagari Kurang Aktif

Insentif Tambahan

Tambahan dana Rp 500 juta + prioritas program BUMNag

Tambahan dana Rp 250 juta + pelatihan manajerial

Tidak mendapat insentif, wajib pendampingan khusus

Dampak yang Diharapkan:

- Meningkatnya partisipasi fiskal nagari secara aktif untuk mendukung PAD kabupaten.
- Dipercepatnya adopsi digitalisasi fiskal dan pemanfaatan aset ekonomi lokal.
- Terbangunnya kompetisi sehat antar nagari dalam inovasi pelayanan publik dan kewirausahaan sosial.
- Meningkatnya kualitas penggunaan Dana Desa yang berbasis output, bukan hanya penyerapan.





BAB VIII

PENINGKATAN DANA TRANSFER DAERAH
DAN SINERGI PERPAJAKAN PUSAT–DAERAH



BAB VIII

PENINGKATAN DANA TRANSFER DAERAH DAN SINERGI PERPAJAKAN PUSAT–DAERAH

8.a. Perbaikan Database Parameter Transfer ke Daerah

Poin Strategis:

- Parameter Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sangat bergantung pada kualitas dan validitas data daerah.
- Pemutakhiran database menjadi keharusan untuk memastikan perhitungan TKDD mencerminkan kondisi fiskal riil daerah.
- Data strategis mencakup jumlah penduduk, kemiskinan, indeks pelayanan dasar, luas wilayah, dan kapasitas fiskal.

Penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKDD) oleh pemerintah pusat, baik dalam bentuk DAU, DAK, maupun DBH, bergantung pada sejumlah parameter data yang bersifat dinamis dan teknis. Dalam praktiknya, ketidakakuratan atau keterlambatan pembaruan data di tingkat daerah kerap menyebabkan turunnya alokasi dana transfer yang seharusnya dapat diperoleh. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menjadikan **perbaikan dan pemutakhiran database parameter fiskal** sebagai salah satu prioritas strategis fiskal lima tahun ke depan. Pendekatan ini bertujuan agar alokasi TKDD benar-benar mencerminkan **kebutuhan, kapasitas fiskal, dan kinerja daerah secara objektif dan adil**.

Beberapa parameter kunci yang akan diperbaiki dan diintegrasikan secara digital antara lain: jumlah penduduk (berdasarkan NIK dan data Dukcapil), data kemiskinan dan IPM (BPS dan Dinsos), data capaian pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar), luas wilayah efektif, jumlah satuan pendidikan dan fasilitas layanan, serta indikator capaian PAD dan kapasitas belanja daerah. Semua parameter ini akan dihubungkan secara *real-time* dengan **Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)** dan **Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)** yang dikelola oleh Kemendagri dan Kemenkeu.

Sebagai contoh, jika data jumlah penduduk miskin tidak dimutakhirkan secara berkala, maka alokasi DAK nonfisik seperti Dana BOS, BOK, dan bantuan operasional PAUD bisa turun secara signifikan. Hal serupa berlaku pada parameter cakupan jalan desa atau Puskesmas aktif dalam perhitungan DAK fisik bidang infrastruktur dan kesehatan. Maka, setiap OPD teknis seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas PMD, dan Dinsos akan diwajibkan untuk menyampaikan data sektoral secara digital setiap triwulan melalui **Pusat Data Fiskal Daerah**.

Untuk itu, akan dibentuk **Tim Konsolidasi Data Fiskal Terpadu** yang diketuai oleh Bappeda dan BPKAD, beranggotakan seluruh OPD penyedia data. Tim ini bertugas melakukan verifikasi silang, validasi lapangan, dan sinkronisasi dengan data pusat. Setiap OPD yang berhasil memperbaiki parameter yang berkontribusi pada peningkatan TKDD akan mendapatkan insentif kinerja berupa anggaran tambahan program prioritas atau insentif fiskal internal daerah.

Target Tahunan Perbaikan Data dan Dampaknya:

Tahun	Parameter Diperbaiki	Dampak terhadap Transfer Daerah
2025	Jumlah penduduk & kemiskinan by name by address	Potensi kenaikan alokasi DAU hingga Rp 10–15 miliar
2026	Infrastruktur dasar desa dan jalan nagari	Potensi kenaikan DAK fisik hingga Rp 12 miliar
2027	Indeks pelayanan pendidikan & kesehatan	Potensi tambahan DAK nonfisik dan insentif kinerja sektoral
2028	Kinerja pengelolaan PAD & rasio belanja produktif	Memperkuat posisi fiskal untuk DAK afirmasi & IF kinerja
2029	Kapasitas fiskal riil (ICOR, PDRB, PAD/kapita)	Perbaikan skor kapasitas fiskal dan redistribusi DBH

Dengan perbaikan database yang terstruktur dan terdigitalisasi, Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan peningkatan Dana Transfer ke Daerah sebesar **Rp 100–150 miliar kumulatif selama 2025–2029**, tanpa harus mengandalkan mekanisme lobi, melainkan dengan bukti kinerja dan akurasi data.

Berikut adalah penyajian **Subbab 8.b. Dukungan Aktif terhadap Pemungutan Pajak Pusat (PPH dan PPN)** dalam format **point disertai alinea panjang** yang memperjelas maksud, strategi, dan dampaknya bagi Kabupaten Pesisir Selatan:

8.b. Dukungan Aktif terhadap Pemungutan Pajak Pusat (PPH dan PPN)

1. Peraturan Daerah tentang Nomor Identitas Kegiatan Usaha (NITKU)

Untuk meningkatkan transparansi fiskal dan memperluas basis pajak nasional dari pelaku usaha luar daerah yang beroperasi di Pesisir Selatan, Pemerintah Kabupaten akan menyusun **Peraturan Daerah (Perda) tentang Nomor Identitas Kegiatan Usaha (NITKU)**. NITKU berfungsi sebagai *identifikasi fiskal lokal* yang wajib dimiliki oleh kontraktor, pelaku bisnis retail besar, penyedia jasa, maupun subkontraktor yang berasal dari luar wilayah administratif kabupaten. NITKU akan menjadi syarat utama dalam pengajuan izin usaha, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengoperasian bisnis di wilayah Pesisir Selatan. Nomor ini harus disandingkan dengan **NPWP Cabang**, untuk memastikan semua pelaku usaha menyumbang penerimaan fiskal nasional dari aktivitas ekonominya di daerah ini. Kebijakan ini penting karena saat ini banyak pelaku usaha luar yang meraih keuntungan besar tanpa kontribusi pajak yang proporsional, sehingga menyebabkan ketimpangan fiskal antarwilayah.

2. Integrasi Data Usaha Antar-OPD dengan KPP Pratama

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani data kegiatan ekonomi lokal, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Koperasi dan UKM, hingga Bapenda, akan diwajibkan **mengirimkan data usaha secara berkala dan langsung ke KPP Pratama Painan dan Padang**, sebagai bentuk keterbukaan dan dukungan aktif terhadap penguatan basis perpajakan pusat. Pendekatan ini akan dilakukan tanpa menunggu permintaan resmi dari pihak KPP, melainkan bersifat *proaktif* melalui sistem pertukaran data digital terintegrasi atau berbasis API. Melalui sistem ini, DJP akan memiliki akses langsung terhadap basis data wajib pajak baru, data transaksi usaha, hingga proyek pembangunan yang sedang berlangsung di daerah. Langkah ini bertujuan mengurangi *information asymmetry* antara daerah dan pusat dalam hal fiskal, serta mendorong sistem pelaporan yang lebih efisien dan berbasis data lapangan.

3. Joint Audit dan Joint Collection dengan KPP Pratama

Untuk mempercepat peningkatan penerimaan pajak pusat dari sektor-sektor ekonomi strategis, Pemkab Pesisir Selatan akan menjalin kerja sama erat dengan KPP Pratama dalam bentuk **Tim Gabungan Joint Audit dan Joint Collection**. Tim ini akan menyasar sektor dengan tingkat kepatuhan rendah namun omzet tinggi seperti sektor pariwisata, jasa konstruksi, digital economy (marketplace lokal), serta perdagangan besar. Melalui audit bersama berbasis data lokal dan nasional, diharapkan akurasi dalam pemeriksaan perpajakan meningkat dan potensi kebocoran penerimaan dapat ditekan secara signifikan. Joint audit ini juga dapat digunakan untuk verifikasi silang antara data pengeluaran APBD dengan penerimaan negara, serta meningkatkan transparansi dalam belanja pemerintah. Joint collection akan mengintensifkan proses penagihan dan pelunasan tunggakan pajak yang selama ini tidak tersentuh oleh sistem pusat karena keterbatasan jangkauan.

4. Program Edukasi Wajib Pajak Lokal “Nagari Taat Pajak”

Pemkab bersama Kanwil DJP Sumbar akan mengembangkan program edukasi perpajakan yang bernama **“Nagari Taat Pajak”**, yang menyasar koperasi, UMKM, BUMNag, serta pelaku jasa di seluruh nagari. Program ini bertujuan meningkatkan literasi fiskal dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak pusat seperti PPh dan PPN, serta memahami manfaat nyata DBH yang dikembalikan ke daerah dalam bentuk infrastruktur, layanan dasar, dan insentif fiskal. Edukasi akan mencakup pelatihan pembuatan e-faktur, pelaporan SPT, penggunaan QRIS usaha kecil, serta pengenalan hak dan kewajiban perpajakan. Pelatihan akan dilakukan secara hybrid (luring dan daring) serta dikaitkan dengan pelatihan kelembagaan koperasi dan BUMNag. Harapannya, terjadi peningkatan jumlah wajib pajak aktif di sektor informal yang selama ini belum tercatat, sekaligus memperkuat kesadaran fiskal sejak level komunitas.

Dampak yang Diharapkan:

Dengan menjalankan empat pendekatan strategis tersebut secara simultan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan peningkatan **kontribusi DBH dari PPh dan PPN sebesar Rp 30–50 miliar** dalam lima tahun mendatang (2025–2029). Dampak tidak langsungnya adalah meningkatnya *tax compliance*, basis data usaha yang lebih tertib, dan konektivitas fiskal antara pusat dan daerah yang lebih sinergis. Strategi ini juga menempatkan Pemkab bukan hanya sebagai pengguna dana transfer, tetapi sebagai mitra aktif negara dalam membangun basis penerimaan negara yang kuat dan berkelanjutan.

5. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh OPD secara Maksimal

Seluruh OPD diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dalam setiap transaksi belanja barang/jasa dan kontrak APBD. Pajak yang terutang seperti PPh Pasal 21, 22, 23 dan PPN harus dipungut, disetor, dan dilaporkan tepat waktu sesuai ketentuan. Setiap kelalaian dalam pelaporan pajak belanja OPD dapat merugikan negara dan mengurangi potensi DBH daerah.

Sebagai bagian dari sinergi fiskal pusat–daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan atas transaksi belanja APBD. Selama ini, seringkali ditemui permasalahan dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh bendahara pengeluaran OPD, baik karena ketidaktahuan, keterlambatan, maupun kelalaian administrasi. Oleh karena itu, Kabupaten Pesisir Selatan akan memperkuat sistem kontrol internal dan pendampingan kepada setiap OPD untuk memastikan bahwa seluruh pajak yang terutang dari belanja daerah dapat dipungut dan disetor tepat waktu.

Jenis pajak yang wajib dikelola oleh OPD antara lain: PPh Pasal 21 (honorarium dan pegawai), Pasal 22 (pengadaan barang), Pasal 23 (jasa), serta PPN atas pembelian dan kontrak jasa/barang. Ketepatan pelaporan dan penyetoran pajak ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan hukum, tetapi juga menjadi basis penerimaan negara yang dikembalikan ke daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) PPh dan PPN. Maka, peningkatan kinerja perpajakan OPD secara langsung dapat memengaruhi naiknya alokasi dana transfer ke daerah.

Langkah nyata yang akan diambil antara lain:

- Pelatihan rutin bendahara pengeluaran dan PPK oleh KPP Pratama dan BPKAD,
- Sistem pelaporan digital transaksi OPD yang terintegrasi dengan e-SPM dan e-Bupot,
- Evaluasi berkala kinerja pajak OPD, yang menjadi bagian dari kinerja keuangan daerah,
- Penerapan reward–punishment fiskal bagi OPD yang taat atau lalai dalam pelaporan pajak belanja.

Dengan pendekatan ini, Pemkab tidak hanya mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk taat pajak, tetapi juga memberi contoh konkret melalui kepatuhan internal birokrasi, sehingga menumbuhkan *fiskal culture* yang kredibel dan terintegrasi.

8.c. Peningkatan Insentif Fiskal Berbasis Kinerja

Dalam kerangka hubungan keuangan antara pusat dan daerah, skema **Insentif Fiskal Berbasis Kinerja (IFBK)** merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang menunjukkan capaian kinerja tertentu—baik dalam aspek pelayanan dasar, pengendalian inflasi, belanja untuk produk dalam negeri, maupun dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Pesisir Selatan melihat peluang besar dari skema ini sebagai **jalan paralel** untuk memperkuat kapasitas fiskalnya.

Secara makro, **peningkatan penerimaan pajak pusat**—baik dari sektor PPh, PPN, dan pajak lainnya—akan berdampak langsung terhadap kenaikan **pendapatan nasional secara agregat**. Ketika pendapatan negara meningkat, maka **alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKDD)**, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Insentif Fiskal dapat diperluas oleh pemerintah pusat. Dalam logika ini, **kinerja fiskal lokal yang baik akan memperbesar porsi yang diterima oleh suatu daerah**, baik karena kontribusi langsung (seperti DBH) maupun karena penilaian kinerja (seperti IFBK).

Secara simultan, ketika **pendapatan daerah meningkat**—baik melalui PAD, DBH, maupun IFBK—maka ruang fiskal daerah pun akan melebar. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki **fleksibilitas anggaran** yang lebih tinggi untuk membiayai program prioritas pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, hingga investasi pada sektor ekonomi produktif. Dengan demikian, terdapat efek pengganda (*multiplier effect*) fiskal: **peningkatan pendapatan fiskal → peningkatan kapasitas pembangunan → peningkatan aktivitas ekonomi → peningkatan basis pajak**, dan siklus ini terus berulang dalam format pertumbuhan yang berkelanjutan.

Garis Besar Strategi Kabupaten Pesisir Selatan:

1. **Fokus pada indikator utama penerima Insentif Fiskal Nasional**, seperti:
 - Pengendalian inflasi daerah,
 - Penurunan stunting,
 - Belanja produk dalam negeri (PDN),
 - Belanja pendidikan dan kesehatan minimal,
 - Peningkatan realisasi PAD.
2. **Integrasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program prioritas daerah** dengan sistem pusat (SIPD, KRISNA, OM-SPAN), sehingga selaras dengan indikator penilaian IFBK dari Kemenkeu dan Bappenas.
3. **Menetapkan target penerimaan Insentif Fiskal nasional minimal Rp 20 miliar per tahun hingga 2029**, dengan fokus pada kinerja yang terdokumentasi, dapat diverifikasi, dan dilaporkan secara digital.

Dengan pendekatan ini, Kabupaten Pesisir Selatan menempatkan diri tidak hanya sebagai pengguna anggaran, tetapi juga sebagai produsen nilai fiskal, baik melalui optimalisasi penerimaan daerah maupun kontribusi pada sistem fiskal nasional. Pendekatan kinerja menjadi jembatan antara kapasitas fiskal dan kualitas pembangunan daerah secara menyeluruh.

8.d. Strategi Menghadapi PMK 24/2024 tentang Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah

Garis Besar:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2024 mengatur bahwa pemerintah pusat dapat melakukan **penundaan atau pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKDD)** apabila pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban belanja tertentu dalam APBD, terutama **belanja wajib** seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur layanan dasar, serta pemenuhan target Indikator Kinerja Daerah. Regulasi ini menjadi *early warning* bahwa alokasi TKDD tidak lagi bersifat tetap, melainkan **berbasis pada kepatuhan dan kinerja nyata** dari pemerintah daerah.

PMK 24/2024 menandai pergeseran serius dalam pendekatan pengelolaan fiskal nasional, dari sistem *alokatif* menjadi *performance-based*. Artinya, apabila pemerintah daerah tidak memenuhi **alokasi minimum** belanja wajib—misalnya 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan, serta belanja mandatory lainnya seperti pengentasan stunting dan pemenuhan upah minimum ASN—maka **penyaluran dana pusat akan ditunda, bahkan dapat dipotong secara langsung**. Kondisi ini sangat berisiko bagi daerah yang masih sangat tergantung pada transfer pusat, seperti Kabupaten Pesisir Selatan, yang 60% lebih struktur APBD-nya bersumber dari TKDD. Untuk mengantisipasi risiko ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan mengambil tiga langkah strategis:

1. Pembentukan Tim Monitoring Belanja Wajib Lintas-OPD

Tim ini diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan OPD teknis lainnya. Tugas utama tim ini adalah memantau **pemenuhan alokasi minimum belanja wajib secara triwulanan**, menyusun laporan realisasi, dan memastikan bahwa program-program tersebut benar-benar terealisasi secara fisik dan keuangan. Tim ini juga akan menyusun *dashboard pengawasan real-time* yang terintegrasi ke dalam sistem SIPD dan SIKD.

2. Implementasi Sistem Early Warning APBD

Akan dikembangkan modul digital berbasis **Early Warning System (EWS)** dalam platform perencanaan dan keuangan daerah. EWS ini akan memberikan notifikasi otomatis jika terjadi penyimpangan perencanaan atau realisasi terhadap target belanja wajib. Misalnya, apabila pada triwulan II alokasi pendidikan baru terealisasi 30% dari pagu, sistem akan memberikan peringatan kepada kepala OPD dan tim anggaran, agar segera dilakukan realokasi, akselerasi belanja, atau revisi APBD tepat waktu.

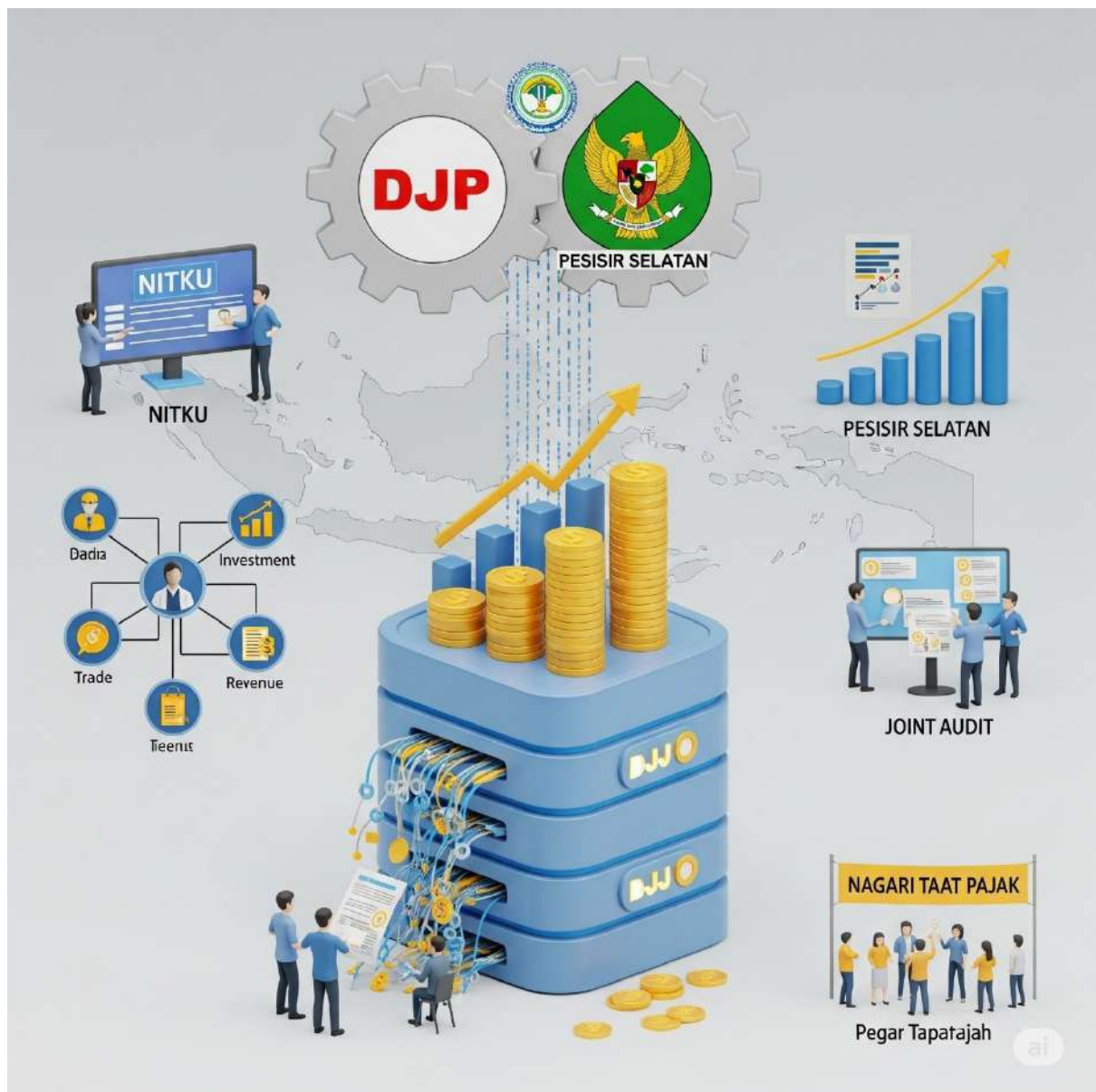
3. Harmonisasi RKPD dan KUA-PPAS dengan Ketentuan PMK

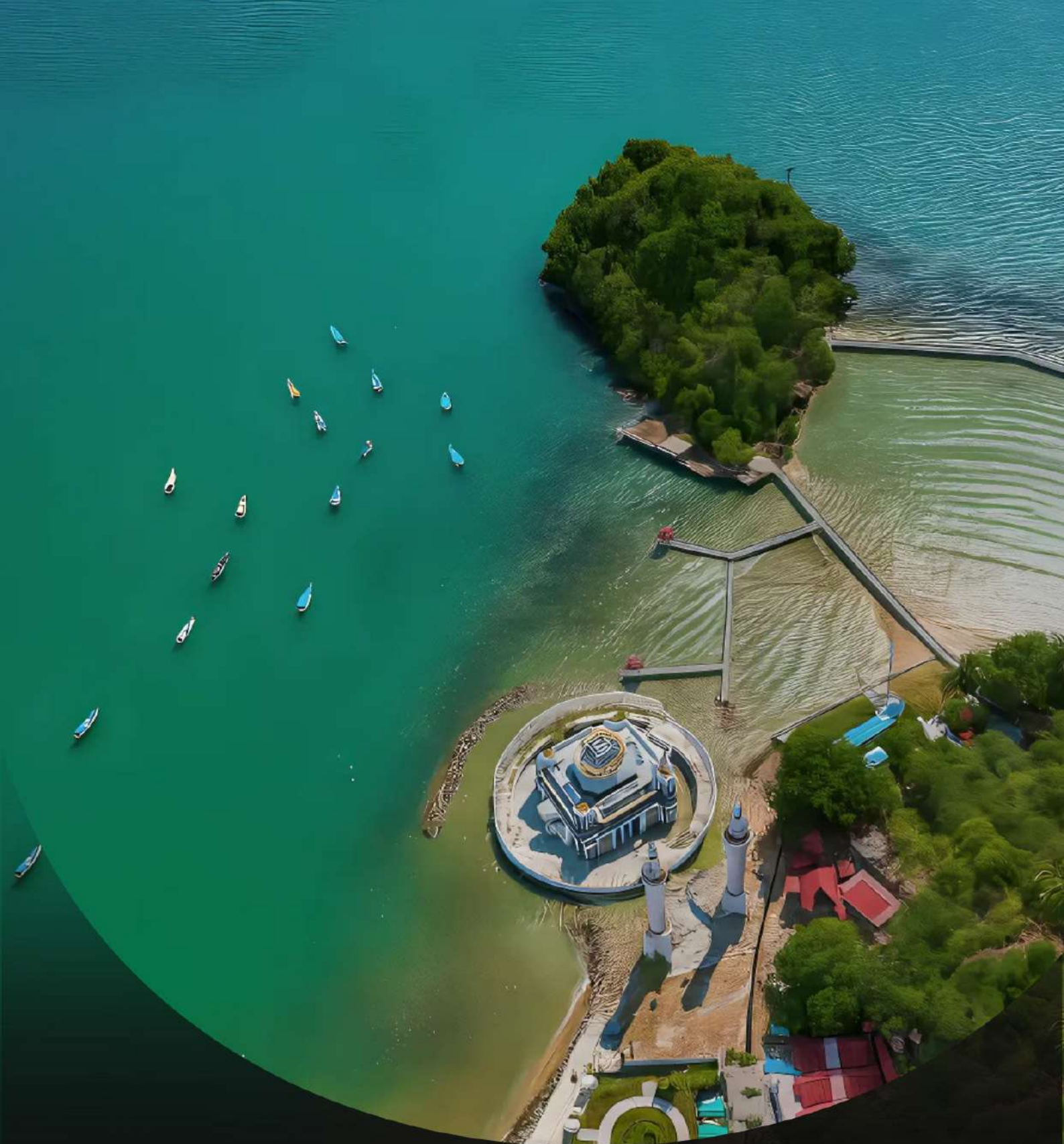
Mulai siklus perencanaan 2025, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan KUA-PPAS akan **memuat kewajiban belanja wajib sebagai komponen taktis dan prioritas utama**. Artinya, belanja wajib tidak hanya menjadi sekadar syarat administratif, tetapi menjadi prioritas yang diukur secara output dan outcome. Setiap program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar juga akan diminta menyusun indikator kinerja utama (IKU) yang dapat dilaporkan sebagai bukti kinerja ke Kemenkeu.

Contoh Risiko dan Dampaknya:

Jenis Belanja Wajib	Alokasi Minimal (%)	Risiko Jika Tidak Dipenuhi	Dampak Fiskal
Pendidikan	20% dari APBD	Penundaan DAU 2 bulan	Penurunan likuiditas kas daerah
Kesehatan	10% dari APBD	Pemotongan DAK nonfisik	Hilangnya bantuan operasional
Infrastruktur Dasar	Berbasis target TKDD	Penurunan pagu DAK tahun berikutnya	Terganggunya program infrastruktur
Stunting, Inflasi, PDN	Khusus IF Kinerja	Tidak mendapat Insentif Fiskal Kinerja	Kehilangan potensi Rp 20 miliar

Strategi ini tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga menjadi bagian dari reformasi fiskal daerah. Dengan **kedisiplinan perencanaan dan ketepatan realisasi belanja wajib**, Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya menghindari risiko pemotongan dana, tetapi justru membuka peluang untuk **menjadi penerima tambahan insentif dan memperkuat reputasi fiskalnya** di tingkat nasional.





BAB IX

SINERGI FISKAL PUSAT–DAERAH UNTUK
TRANSFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA



BAB IX

SINERGI FISKAL PUSAT–DAERAH UNTUK TRANSFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA

9.a. Penguatan Forum Koordinasi Fiskal Daerah

- Membentuk dan mengaktifkan forum koordinasi lintas instansi fiskal daerah secara rutin dan terstruktur.
- Menyatukan strategi belanja, pendapatan, dan kebijakan fiskal pusat secara responsif dan berbasis data.
- Menjadikan forum sebagai wadah advokasi fiskal, resolusi teknis, dan sinkronisasi kebijakan antar tingkatan pemerintahan.

Penguatan koordinasi fiskal antar pemangku kepentingan daerah menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan fiskal baru yang semakin kompleks. Kabupaten Pesisir Selatan akan membentuk **Forum Koordinasi Fiskal Daerah** yang beranggotakan unsur BPKAD, Bapenda, Bappeda, Dinas Perizinan, Dinas Koperasi/UMKM, serta institusi vertikal seperti **Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kanwil DJP, Kanwil DJPb, KPBC dan KPKNL**, sebagai perwakilan pusat di daerah. Forum ini bersifat fungsional dan menjadi tempat untuk merumuskan, memantau, dan mengevaluasi berbagai isu strategis fiskal secara lintas lembaga.

Forum ini akan menjalankan fungsi **sinkronisasi kebijakan fiskal pusat-daerah** dalam aspek belanja wajib, penyerapan TKDD, optimalisasi PAD, pengendalian belanja pegawai, dan implementasi regulasi nasional seperti PMK 24/2024, UU HKPD, maupun kebijakan insentif fiskal. Setiap triwulan, forum akan mengadakan rapat koordinasi yang disertai dengan pemaparan dashboard fiskal daerah, pemutakhiran data transfer pusat, capaian indikator fiskal, serta rekomendasi perbaikan kelembagaan pengelolaan PAD. Forum ini juga akan dilapisi dengan **unit kerja teknis lintas-OPD**, agar keputusan forum dapat langsung ditindaklanjuti ke dalam sistem anggaran.

Selain itu, Forum Koordinasi Fiskal juga akan **melibatkan pemerintah nagari, BUMNag, koperasi lokal, dan komunitas fiskal seperti pelaku UMKM dan tokoh masyarakat**. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan *ownership* masyarakat terhadap kebijakan fiskal daerah dan memperkuat akuntabilitas. Pemkab juga akan menyediakan *platform digital partisipatif* agar pelaku lokal dapat menyampaikan masukan terkait kendala penerimaan daerah, kualitas belanja publik, dan efisiensi pelayanan.

Dengan penguatan forum ini, diharapkan tercipta keselarasan fiskal antara pusat dan daerah, pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data, serta kemampuan fiskal daerah yang lebih antisipatif terhadap dinamika nasional dan global.

9.b. Integrasi Data Fiskal dan Dashboard Bersama

- Mengembangkan **dashboard fiskal terintegrasi** yang menggabungkan data pendapatan, belanja, TKDD, dan indikator kinerja daerah.
- Integrasi dengan sistem pusat seperti **SIPD, SIKD, OM-SPAN, dan SID** untuk memastikan transparansi dan konsistensi data fiskal.
- Mendukung pengambilan kebijakan berbasis data (*data-driven policy*) serta meningkatkan akuntabilitas fiskal publik.

Dalam era pemerintahan digital dan sistem fiskal berbasis kinerja, data merupakan elemen paling fundamental dalam perumusan kebijakan keuangan yang efektif dan kredibel. Kabupaten Pesisir Selatan menyadari bahwa selama ini masih terdapat fragmentasi dalam sistem informasi fiskal antar-OPD dan kurangnya keterhubungan antara sistem lokal dengan sistem nasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah akan membangun dan mengoperasikan dashboard fiskal bersama yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kemendagri, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) milik DJPK Kemenkeu, serta OM-SPAN dan SID (Sistem Informasi Dana Desa).

Dashboard ini akan menyajikan secara real-time berbagai indikator strategis fiskal daerah seperti:

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per jenis pajak dan retribusi,
- Serapan Dana Transfer (DAU, DAK, DBH, IF) per sumber dan per jenis belanja,
- Rasio belanja pegawai dan belanja modal,
- Rasio kemandirian fiskal, belanja wajib (pendidikan, kesehatan),

- Serta indikator kinerja daerah terkait capaian program pembangunan.

Integrasi ini bertujuan agar seluruh pengambilan keputusan anggaran dan kebijakan fiskal bersifat berbasis bukti (evidence-based policy). Selain itu, dashboard fiskal akan menjadi alat bantu evaluasi kinerja perangkat daerah dan pengambilan keputusan strategis lintas waktu secara terukur dan responsif. Sistem ini juga akan terkoneksi dengan dashboard pengawasan Kementerian Keuangan dan Kemendagri, sehingga mempercepat klarifikasi, audit, dan validasi data lintas pemerintahan.

Selain sisi teknis, dashboard ini akan memiliki fitur user interface publik yang memungkinkan keterlibatan masyarakat sipil, DPRD, media, dan akademisi untuk memantau kondisi fiskal daerah secara transparan. Peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan fiskal diharapkan dapat menekan moral hazard, meningkatkan akuntabilitas, dan mempercepat koreksi kebijakan.

Langkah Implementasi:

1. Konsolidasi sistem informasi keuangan antar-OPD, termasuk BPKAD, Bapenda, Bappeda, Inspektorat, dan dinas teknis.
2. Sinkronisasi koneksi sistem lokal dengan SIPD–SIKD–SPAN, dengan bantuan teknis dari Kanwil DJPb dan Ditjen Bina Keuangan Daerah.
3. Penyiapan SDM dashboard dan operator lintas sektor untuk input dan pembacaan data fiskal.
4. Penyusunan protokol pemanfaatan dan pembaruan data, termasuk SOP pelaporan, frekuensi update, dan proses validasi antar unit.
5. Peluncuran dashboard publik dengan fitur interaktif untuk edukasi fiskal dan transparansi anggaran.

Dengan sistem yang terintegrasi ini, Pemkab Pesisir Selatan tidak hanya memiliki alat kendali fiskal yang presisi dan dinamis, tetapi juga mampu mengantisipasi tantangan penyaluran dana, mendeteksi penyimpangan sejak dini, dan mengarahkan belanja ke sektor prioritas berbasis data.





BAB X

PENUTUP



BAB X

PENUTUP

Transformasi fiskal daerah bukanlah sekadar instrumen teknokratis, melainkan representasi dari komitmen daerah untuk mandiri secara fiskal, berdaulat dalam pembangunan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan publik. Dokumen strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan langkah konkret untuk menjawab tantangan struktural ketergantungan terhadap transfer pusat, inefisiensi belanja, serta stagnasi fiskal yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang.

Melalui pendekatan komprehensif yang mencakup reformasi kelembagaan, digitalisasi layanan fiskal, monetisasi aset, penguatan ekonomi lokal, hingga peningkatan kapasitas SDM dan sinergi pusat–daerah, Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk mencapai rasio kemandirian fiskal minimal 50% pada tahun 2029, sebagaimana tertuang dalam Roadmap RPJMD dan target pertumbuhan ekonomi 7,3% nasional.

Dokumen ini tidak hanya memuat gagasan besar dan arah kebijakan, tetapi juga menyajikan langkah-langkah teknis, estimasi potensi, peta jalan implementasi, serta kebutuhan kolaborasi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan. Pendekatan berbasis data, partisipatif, dan berorientasi hasil menjadi prinsip dasar yang terus dikuatkan.

Dokumen ini disusun sebagai panduan strategis untuk mendorong transformasi fiskal dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Selatan dalam periode perencanaan 2025–2029. Dengan mengusung semangat **“Menjadi Tuan di Rumah Fiskal Sendiri,”** seluruh isi kajian ini mencerminkan keberanian, ketekunan, dan komitmen untuk membangun struktur fiskal yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan—seiring dengan semakin dinamisnya arah kebijakan transfer ke daerah yang berbasis kinerja, kemampuan fiskal, dan penguatan pendapatan asli daerah.

Transformasi ini bukan semata soal angka atau pertumbuhan nominal PAD, tetapi tentang **perubahan mendasar dalam budaya birokrasi, orientasi belanja, tata kelola aset, peran aktif OPD, serta integrasi teknologi digital dan kelembagaan fiskal nagari.** Seluruh strategi yang disampaikan dalam dokumen ini telah didesain dengan pendekatan multipihak, berbasis data, dan mempertimbangkan praktik terbaik dari berbagai daerah. Dalam ekosistem fiskal baru yang semakin kompetitif, pemerintah daerah yang mampu menggali potensi ekonominya sendiri akan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan arah pembangunan, mengatasi guncangan eksternal, dan memenuhi ekspektasi masyarakat secara berdaulat.

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, melalui penguatan peran **Regional Chief Economist (RCE)** dan pendekatan *Kemenkeu Satu*, berkomitmen untuk menjadi mitra aktif pemerintah daerah dalam merancang dan mengawal strategi fiskal yang inklusif dan produktif. Kami percaya bahwa Kabupaten Pesisir Selatan memiliki semua elemen yang dibutuhkan untuk melompat lebih jauh: potensi ekonomi yang kaya, inovasi kebijakan yang terbuka, kepemimpinan daerah yang progresif, serta dukungan kelembagaan fiskal yang semakin terhubung.

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi referensi utama dalam penyusunan RPJMD, Renstra OPD, kebijakan anggaran tahunan, serta landasan pengambilan keputusan fiskal daerah dalam jangka menengah. Ke depan, kesinambungan pelaksanaan dan penguatan sinergi lintas sektor akan menjadi kunci keberhasilan.

Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atas kolaborasi dan kepercayaannya. Semoga upaya ini menjadi bagian dari ikhtiar besar kita bersama untuk menjadikan fiskal sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2024** tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. **Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat.** (2024). *Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2023*. Padang: BPS.
4. **Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.** (2023). *Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024*. Jakarta.
5. **Kementerian Keuangan RI – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.** (2023). *Data Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023–2024*. Jakarta.
6. **Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat.** (2024). *Laporan Regional Chief Economist: Kajian Kemandirian Fiskal dan Belanja Produktif Sumbar*. Padang.
7. **Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.** (2024). *Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023*. Painan.
8. **Bapenda Kabupaten Pesisir Selatan.** (2023). *Peta Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Layanan Nagari*. Painan.
9. **Bank Indonesia.** (2023). *Laporan Ekonomi Regional Sumatera Barat Triwulan IV 2023*. Padang.
10. **World Bank.** (2020). *Subnational Own-Source Revenue Mobilization in Indonesia: Policy and Practice*. Jakarta: World Bank Indonesia.
11. **OECD.** (2022). *Enhancing Fiscal Decentralisation and Local Public Finance in Indonesia*. Paris: OECD Publishing.
12. **Kementerian Investasi/BKPM.** (2023). *Peta Peluang Investasi Kabupaten Pesisir Selatan*. Jakarta.
13. **UNDP Indonesia.** (2021). *Localizing Sustainable Development Goals (SDGs) Through Fiscal Policy Reform*. Jakarta: UNDP Indonesia.
14. **Kominfo – Gerakan Nasional Literasi Digital.** (2022). *Digitalisasi Ekonomi untuk Daerah: Strategi Inklusif Penguatan PAD*. Jakarta.
15. **Litbang Kompas.** (2022). *Inovasi Fiskal Daerah: Studi Praktik Baik di Kabupaten/Kota Indonesia*. Jakarta: Kompas Research Division.

BIODATA PENULIS

Bayu Agatyan

Bayu Agatyan, lahir di Tarakan pada tanggal 16 Desember 1976. Saya adalah pegawai aktif dari **Direktorat Jenderal Pajak (DJP)**, saat ini mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan tugas **lintas fungsi (Cross-Function)** di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Saat ini menjabat sebagai **Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK)** di **Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat**. Penugasan ini saya jalani dengan penuh dedikasi sebagai bentuk kontribusi terhadap sinergi internal Kementerian Keuangan, khususnya dalam memperkuat pelaporan keuangan pemerintah, mendorong reformasi belanja daerah, dan menciptakan konektivitas fiskal yang produktif antara pusat dan daerah.

Saya menyelesaikan pendidikan **Magister Manajemen Keuangan** di **Universitas Trisakti** pada tahun 2007, setelah sebelumnya memperoleh gelar **Sarjana Teknik Geodesi** dari **Universitas Gadjah Mada**. Pendidikan awal saya tempuh di **STAN Malang** pada program Diploma III Penilai PBB (1994–1997), dan sejak saat itu saya membentuk karier yang lintas bidang: mulai dari valuasi properti, pengawasan pajak, keberatan, hingga transformasi fiskal daerah. Penguatan keilmuannya diperluas melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi profesional internasional, termasuk dari **Japan International Cooperation Agency (JICA)**, **INSPEN Malaysia**, dan **International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)** Belanda, khususnya dalam bidang transfer pricing dan indirect taxation.

Dalam perjalanan karier saya, saya tidak hanya bertugas secara administratif, tetapi juga aktif menyusun **berbagai kajian strategis, naskah kebijakan, dan studi lintas sektor**. Saya percaya bahwa setiap belanja pemerintah harus mampu menciptakan nilai tambah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan menghasilkan pembaruan mindset fiskal. Hingga saat ini, telah menyusun dan berkontribusi **dokumen kajian strategis**, mulai dari studi kelayakan smart farming gambir, diplomasi ekspor komoditas unggulan, zona logistik baterai (EV Corridor), pengelolaan sampah Zero TPA, hingga pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang. Beberapa Kajian yang telah diselesaikan:

- 1. Smart Farming dan Industrialisasi Gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota**
Kajian yang merancang skema pertanian presisi berbasis IoT dan hilirisasi produk gambir untuk ekspor, lengkap dengan simulasi ROI, kelembagaan petani, dan dashboard monitoring digital.
- 2. Konsep Pengelolaan Sampah Zero TPA untuk 20 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat**
Proposal lomba lintas daerah untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R, tanpa ketergantungan pada TPA, serta mendorong perubahan mindset dan kolaborasi regional.
- 3. Blueprint Transformasi Kota Padang sebagai Financial & Service City 2045**
Kajian makro yang menyatukan transformasi digital, fiskal, dan ekonomi kreatif untuk menjadikan Padang sebagai pusat jasa keuangan regional berbasis ekspor, devisa, dan teknologi blockchain.
- 4. Kajian Pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang 2025–2029**
Telah masuk dalam RPJMD Provinsi Sumbar tahun 2025–2029, kajian ini menjadi dasar strategis menjadikan Teluk Tapang sebagai simpul logistik ekspor komoditas unggulan kawasan barat Sumatera.
- 5. Kajian Hilirisasi Perkebunan Gambir di Lima Puluh Kota dan Pesisir Selatan**
Mendorong terbentuknya *Desa Devisa Pertama di Sumatera Barat* berbasis ekspor gambir, dengan strategi kelembagaan, teknologi pengolahan, dan branding global.
- 6. Kajian Strategi Peningkatan PAD dan Transformasi Fiskal Pesisir Selatan**
Kajian mendalam tentang optimalisasi PBB, pemanfaatan aset daerah, digitalisasi pajak daerah, dan persiapan belanja pegawai maksimal 30% dari PAD tahun 2027.
- 7. Kajian Lompatan Strategis Sumbar 2025–2029: Dari Nagari ke Global, dari Aset Tidur ke Sumber Devisa**
Narasi baru pembangunan fiskal Sumbar berbasis perubahan paradigma: menghidupkan aset pasif menjadi mesin devisa aktif, mendobrak keterbatasan fiskal melalui konektivitas global.
- 8. Kajian RPJMD 20 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat**
Memberikan masukan strategis terhadap visi fiskal daerah, dengan misi utama meningkatkan kemandirian fiskal hingga 50% melalui belanja produktif dan inovasi sumber pendapatan. Kajian ini menjadi dasar perubahan mindset semua Kab/Kota dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah serta menyongsong penerapan UU 1 tahun 2022 tentang HKPD dan PMK 24 tahun 2024.
- 9. Kajian Rice Milling Unit (RMU) Pesisir Selatan**
Rancangan industrialisasi pascapanen beras lokal berbasis rantai pasok dan teknologi penggilingan modern, sebagai upaya substitusi impor dan penguatan ketahanan pangan.

10. Kajian Zona Logistik Baterai Listrik (EV Corridor) Kabupaten Sijunjung

Menyusun feasibility study lengkap kawasan ekonomi baru berbasis industri baterai dan mineral kritis, terintegrasi dengan PP 8/2025 dan strategi energi hijau nasional.

11. Kajian Pembangunan Penjara Koruptor di Kepulauan Mentawai

Kajian geostrategis dan tata kelola kelembagaan untuk mewujudkan kawasan isolasi koruptor nasional berbasis keamanan tinggi dan pendekatan rehabilitatif.

12. Kajian Pengembangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di Kepulauan Mentawai

Merancang peta jalan energi bersih Mentawai berbasis PLTS, termasuk pemetaan lokasi, kapasitas instalasi, pembiayaan KPBU/SMV, serta integrasi ke grid lokal.

13. Kajian Digitalisasi Pembayaran PBB P2 melalui QRIS, NFT di Kota Pariaman

Memberikan solusi kemudahan pembayaran PBB P2 dan menjadi pilot project proses perubahan fiskal.

Aktif dalam pengembangan inovasi fiskal seperti penerapan **Blockchain untuk transparansi pelaporan daerah**, pengembangan **kredit karbon sebagai sumber PAD**, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung perluasan PBB-P2 dan retribusi daerah.

Sebagai aparatur negara, saya percaya bahwa perubahan adalah keniscayaan. Saya selalu berusaha menjadi bagian dari solusi—bukan hanya dalam menjalankan tugas, tetapi juga dalam **menciptakan ide-ide baru, mendobrak batas sektoral**, dan memperkuat jembatan fiskal antara pusat dan daerah dan menjalankan fungsi *Regional Chief Economic dan Financial Advisory* lebih tepat sasaran dan membuat perubahan yang pasti.

Moto hidup saya:

"Perubahan itu pasti. Selalu terdepan. Pokoknya BISA."